



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGEMBANGAN PROGRAM KEPELOPORAN
PEMUDA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

TESIS

**ALFA SAPUTRA
080644176**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGEMBANGAN PROGRAM KEPELOPORAN
PEMUDA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains

**ALFA SAPUTRA
080644176**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Alfa Saputra

NPM : 080644176

Tanda tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Alfa Saputra
NPM : 080644176
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan
Judul Tesis : Analisis Pengembangan Program Kepeloporan
Pemuda Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

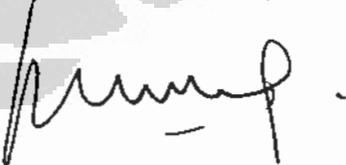
Pembimbing : Dr. M. Budi Setiawan, M.Eng

()

Penguji : Dr. Tafsir Nurhamid

()

Penguji : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberi amanah luar biasa ini sehingga Peneliti dapat menempuh pendidikan di Program Pengkajian Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Universitas Indonesia selama dua tahun ini tanpa kendala yang berarti. Pada bagian ini, peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Candra Wijaya selaku PLH Ketua Program Pasca Sarjana UI.
2. Prof. Roni Rahman Nitibaskara selaku Ka. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI.
3. Dr. Amy S. Rahayu, M.Si. selaku koordinator konsentrasi Kajian Pengembangan Kepemimpinan UI.
4. Dr. Muhammad Budi Setiawan, M.Eng. atas kesabaran dan segala masukannya selama proses bimbingan dan penulisan tesis ini.
5. Dr. Tafsir Nurhamid selaku penguji pada sidang tesis yang Peneliti tesis.
6. Seluruh dosen Program Pengkajian Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Pasca Sarjana UI, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah dibagi dan diajarkan kepada penulis sehingga mampu menempuh pendidikan ini dengan baik.
7. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajaran di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI, yang telah menjadi sponsor atas studi Penulis dan memperkenankan Penulis melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan, Saudara, dan Sahabatku di angkatan III Kepemimpinan UI yang telah dengan rela menemani suka, duka, canda, tawa, bahkan air mata selama menempuh pendidikan yang sungguh tidak mudah. Terima kasih atas do'a cinta, dan dukungan tulus dari kalian, begitu pula dengan rekan-rekan di Angkatan I, II dan IV yang selalu menyemangati.
9. Seluruh informan dan narasumber yang telah membantu penelitian ini.
10. Rekan-rekan di PG-K Global Islamic School yang telah memberikan berbagai dukungan selaman masa study sampai penulisan tesis.

11. Rekan-rekan IYMC khususnya Matnur, Ifo, Def, Gita, Vira, Tika, Iwan, Daus, Mustofa dan lainnya atas kesempatan dan dukungannya sehingga penulis dapat mengecap pendidikan ini.
12. Papa M. Kosim, Mama Djuariah, Papa A. Rosid dan Mama Yuliah yang tak pernah lelah memberi dukungan. Kakak dan adik-adik tercinta, Teh Rully, Isnan, Papang dan Reza yang selalu menyemangati Penulis. Terima kasih atas bantuan kalian selama penelitian hingga saat penulisan tesis.
13. Teman-teman *Darul 'Ilmi*; Nasrudin, Agung, Alan, Joko, Iwan, Heri, Koenfi, Fajar, Hasan, Luqman, Sumy, Umar, Andrie, Murti, Anto dan lainnya yang tak bisa disebut satu per satu. Kalian adalah para pejuang kebaikan yang tak kenal lelah untuk membesarkan generasi muda Islam harapan. *Keep your spirit...!*
14. Sahabat lama yang selalu memotivasi; Riza, Amril, Dullah, Oki, Lukman, Riri, Novi, Kipri, dan lainnya.
15. Istriku terkasih Melina Lestari, M.Pd dan buah hati kami Atalla Yasser Saputra yang memberikan begitu banyak pengorbanan dan kesabaran untuk Penulis.
16. Semua pihak yang mungkin luput dari tulisan ini namun penulis yakin apapun yang telah mereka berikan sangat berarti bagi kesuksesan ini.
Semoga setiap tinta yang tergores di atas lembaran kertas ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 30 Juni 2010



Alfa Saputra

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfa Saputra
NPM : 080644176
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

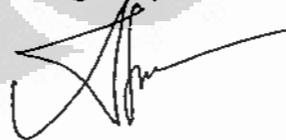
**“Analisis Pengembangan Program Kepeloporan Pemuda
Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2009

Yang menyatakan,



Alfa Saputra

ABSTRAK

Nama : Alfa Saputra
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Judul : Analisis Pengembangan Program Kepeloporan Pemuda
Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia menggambarkan bagaimana peran kepeloporan pemuda dalam memerdekakan bangsa. Kondisi Indonesia yang terpuruk dalam banyak sisi salah satunya disebabkan oleh masih langkanya kepeloporan dalam tubuh bangsa ini. Pelopor adalah orang yang memulai sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk itulah, peran strategis Kemenpora dalam membina dan mengembangkan kepeloporan pemuda di Indonesia sangat diperlukan. Program-program kepeloporan pemuda yang ada di Kemenpora adalah Pemilihan Pemuda Pelopor, Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda. Program. Melalui riset ini, peneliti menganalisis program pengembangan kepeloporan pemuda di Kemenpora RI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni; teori *Kepeloporan*, dan teori *Pengembangan Program (Harty, Wholey & Newcomer)*. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam diperoleh kesimpulan bahwa program kepeloporan pemuda di Kemenpora RI belum berjalan baik dan proses pengembangan program juga berjalan belum sebagaimana mestinya. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kemenpora dalam upaya memperbaiki program kepeloporan pemuda antara lain; redefinisi makna kepeloporan, menata kembali prioritas dalam menentukan target program, menjadikan program pelatihan kepeloporan pemuda sebagai *mainstream*, dan memperbaiki komunikasi dengan stakeholders kepemudaan.

Kata Kunci : Kepeloporan Pemuda, Program Kepeloporan Pemuda,
Pengembangan Program

ABSTRACT

Name : Alfa Saputra
Study Program : National Resilience Studies
Title : Analysis Pioneering Youth Development Program in the
Ministry of Youth And Sports

Long history of struggle of the Indonesian nation describes how pioneering role in liberating the nations youth. Condition of Indonesia, which sank in a lot of side one of them caused by the scarcity of pioneering in the body of this nation. The pioneer is someone who started something that was not there to be there and beneficial to society. For this reason, Kemenpora strategic role in fostering and developing the pioneering youth in Indonesia is very necessary. Pioneering programs Kemenpora youth in the Pioneer Youth Election, Bachelor of Rural Development Acceleration (SP-3) and the Pioneering Youth Training Program. Through this study, researchers analyzed the pioneering youth development program in Kemenpora RI. The approach used in this study is a qualitative approach.

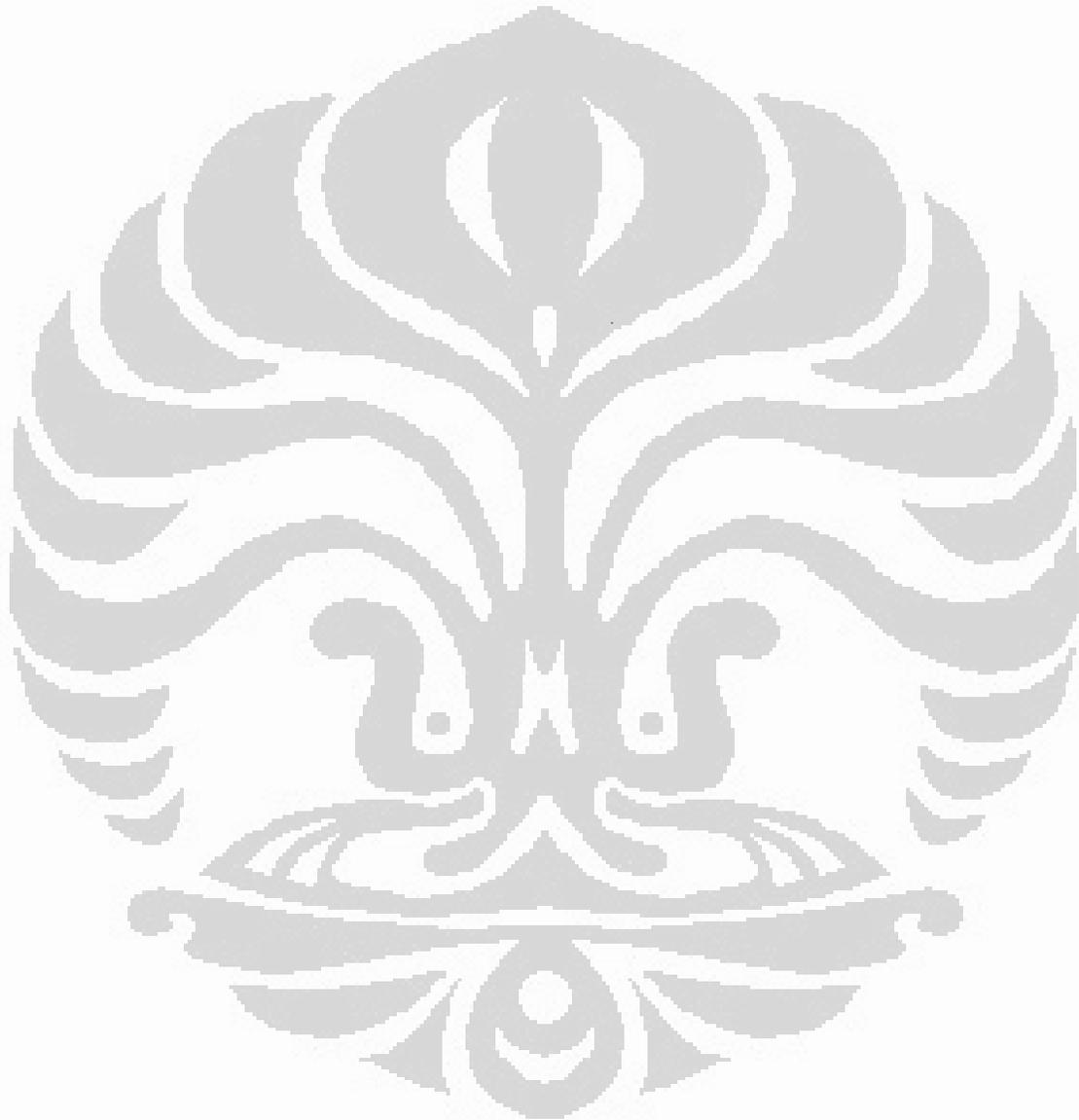
Theory used in this study namely; pioneering theory, and theory of Development Program (Harty, Wholey & Newcomer). Based on this research using depth interviews we concluded that the pioneering program of youth in Kemenpora RI has not gone well and also run the program development process is not as it should. Several steps should be done by Kemenpora in a pioneering effort to improve youth programs, among others, redefined the meaning of pioneering, re-arrange priorities in determining the program targets, making pioneering training program as a mainstream youth, and improving communication with youth groups stakeholders.

Key Words : *Youth Pioneering, Pioneering Youth Programs,
Programs Development*

DAFTAR ISI

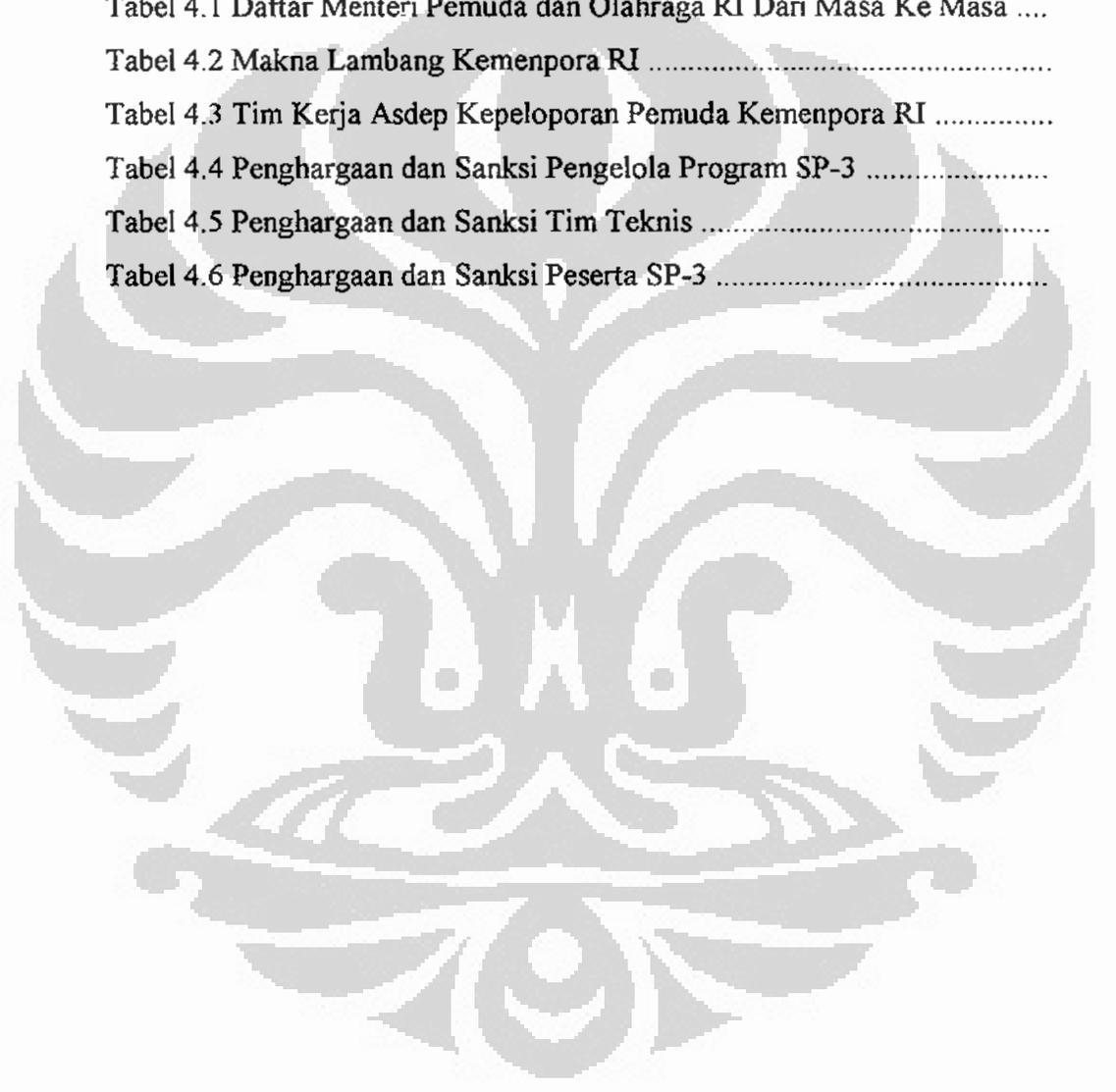
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Signifikansi Penelitian	7
1.6. Alur Pikir Penelitian	8
2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Definisi Kepeloporan	9
2.2. Definisi Pengembangan Program	11
2.3. Operasional Konsep	14
3. METODE PENELITIAN	17
3.1. Teknik Pengumpulan Data	18
3.2. Lokasi Penelitian	20
3.3. Narasumber/Informan	20
3.4. Validitas Data	21
3.5. Instrumen Penelitian	21
4. PEMBAHASAN	22
4.1. Profil Kemenpora RI	22
4.1.1 Deputi II Bidang Kepemimpinan Pemuda	36
4.1.2 Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda	49
4.2. Program-program Kepeloporan Pemuda	50
a. Pemilihan Pemuda Pelopor	50
b. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3)	58
c. Pelatihan Kepeloporan Pemuda	85
4.3. Analisis Kepeloporan	87
4.4 Analisis Strategi Pengembangan Program Kepeloporan Pemuda	93
5. KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	110
5.3. Keterbatasan Penelitian	112

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	117
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	122



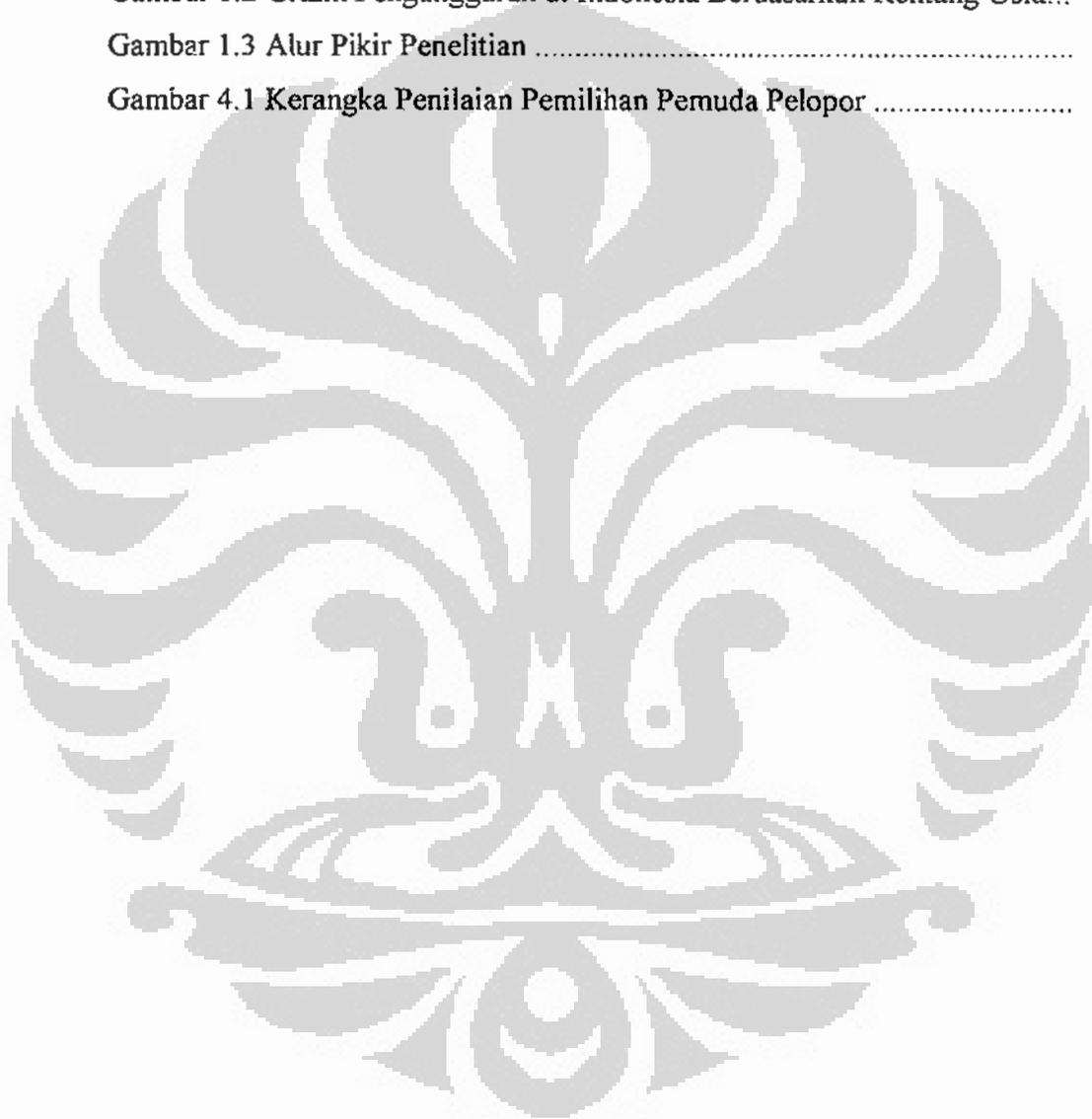
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008	4
Tabel 2.1 Operasional Konsep	14
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	21
Tabel 4.1 Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dari Masa Ke Masa	26
Tabel 4.2 Makna Lambang Kemenpora RI	32
Tabel 4.3 Tim Kerja Asdep Kepeloporan Pemuda Kemenpora RI	50
Tabel 4.4 Penghargaan dan Sanksi Pengelola Program SP-3	83
Tabel 4.5 Penghargaan dan Sanksi Tim Teknis	84
Tabel 4.6 Penghargaan dan Sanksi Peserta SP-3	84



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Grafik Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, tahun 2008.....	4
Gambar 1.2 Grafik Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Rentang Usia...	5
Gambar 1.3 Alur Pikir Penelitian	8
Gambar 4.1 Kerangka Penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor	57



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan model alur pikir penelitian.

1. 1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali dan berkualitas, akan sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab, dan pelaku pembangunan di masa depan, memiliki proporsi yang relatif besar dari penduduk Indonesia, yaitu 27,38 persen untuk tahun 2008 (diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2015, BPS, 2008). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2009-2014) adalah menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007). Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.

Pemuda memiliki posisi penting dalam pembangunan bangsa. Mereka menjadi major *human resources*, kelompok strategis dengan vitalitas "*agent of change*" (unsur perubahan) dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ia juga menjadi pewaris regenerasi masa depan peradaban bangsa. Karena itu, pemuda harus ditempatkan sebagai kelompok strategis dan potensial untuk kepemimpinan nasional. Yang menjadi sumber daya produktif pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, Jumlah Pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang tersebut berumur antara 16 hingga 30 tahun berjumlah kurang lebih sekitar 62,7 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan potensi yang cukup besar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional di masa depan pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan aset strategis dalam menciptakan ketahanan nasional.

Pemuda diposisikan sebagai pemilik idealisme yang bisa menentukan paradigma seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. Sehingga, pemuda ditempatkan sebagai *agent of change* dalam melakukan perubahan yang sangat fundamental sekalipun. Karena, ternyata pemuda sebagai salah satu pusat perubahan alternatif seringkali menjadi tumpuan dan harapan, bila peran perubahan yang seharusnya diemban oleh Negara tidak memuaskan atau terkendala oleh berbagai masalah.

Ada beberapa kilasan sejarah yang mencatat peran pemuda sebagai anak bangsa yang turut berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Pertama, peran dalam kemerdekaan sebuah bangsa. Kedua, peran dalam reformasi Politik sebuah bangsa. Ketiga, Peran dalam Rekonstruksi ideologi sebuah bangsa. Para pemuda Indonesia telah terlibat dalam membebaskan bangsanya dari penjajahan. Mereka melakukan konsolidasi nasional dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928 untuk memadukan militansi, kemampuan berorganisasi, dan sensitivitas global yang menjadi modal semangat perjuangannya mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, melalui sejarah pergerakan yang cukup panjang, gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa telah memberikan bukti perubahan yang signifikan. Titik-titik sejarah gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa di Indonesia dapat dilihat pada tahun 1966 (menuntut pembubaran PKI), tahun 1974 (peristiwa Malari), dan tahun 1998 perjuangan pemuda pelajar dan mahasiswa berhasil meruntuhkan rezim pemerintahan Orde Baru sehingga Indonesia memasuki Orde Reformasi. Citra positif yang melekat pada gerakan pemuda merupakan modal sosial yang cukup untuk menjadi bahan bakar perubahan. Modal dan citra positif tersebut adalah kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan

kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal yang dilakukan tadi lahir dari jiwa kepeloporan sebagai wujud cinta pada tanah air dan bangsa.

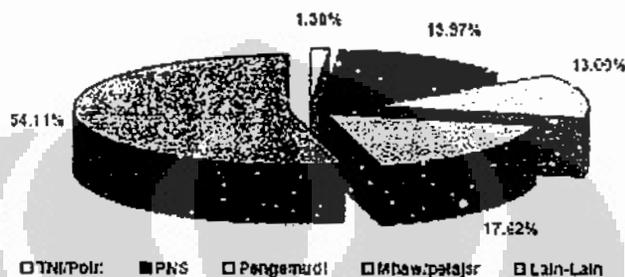
Lain kenyataan dulu, maka lain pula kenyataan kondisi pemuda saat ini. Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif pembangunan bangsa Indonesia ternyata bukan persoalan sederhana. Upaya ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Ironinya, berbagai permasalahan sosial yang muncul tersebut ternyata melibatkan atau dilakukan pemuda. Pemuda merupakan bagian yang sangat penting dalam interaksi sosial kemasyarakatan sebuah bangsa, karena pemuda sebagai entitas yang mendobrak kevakuman-kevakuman sosial. Pemuda ditempatkan sebagai bagian yang sangat menentukan perkembangan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara. Sehingga prestasi dan kepeloporan pemuda akan dapat ternoda oleh perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok pemuda lainnya. Fenomena ini diperburuk lagi dengan proses stigmatisasi penyakit sosial yang melunturkan kepercayaan orangtua, masyarakat, lingkungan pada kemampuan dan integritas pemuda yang sesungguhnya telah menjauhkan pemuda dari lingkungan.

Problematika dan permasalahan kekinian pemuda yang kerap kali muncul di kalangan pemuda seperti tawuran dan kriminalitas, penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya (NAZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular, penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta apresiasi terhadap kalangan pemuda. Apabila permasalahan ini tidak memperoleh perhatian atau penanganan bijaksana, maka akan memiliki dampak yang luas dan mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan nasional, bahkan mungkin akan mengancam integrasi bangsa.

Selain permasalahan penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya (NAZA), minuman keras dan lain sebagainya, pemuda juga bermasalah dalam gangguan kamtibmas pelaku kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) berdasarkan laporan dari Mabes Polri tahun 2008 memperlihatkan tingkat yang cukup memprihatinkan, yaitu pelaku Laka Lantas profesi mahasiswa/ pelajar menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pelaku sebesar 12.298 kejadian di bawah urutan profesi lain-lain sebesar 37.764 kejadian. Kemudian diikuti profesi pengemudi,

PNS, dan TNI/ Polri di peringkat ketiga, keempat dan kelima dengan jumlah pelaku masing-masing sebesar 9.076 kejadian, 4.749 kejadian dan 908 kejadian.

Gambar 1.1 Grafik Persentase Profesi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, tahun 2008



Sumber: Mabes POLRI 2008

POLRI telah mengelompokkan tujuh belas jenis gangguan Kamtibmas sebagai Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus. Ke tujuh belas jenis gangguan yang dimaksud adalah sara, pemogokan, unjuk rasa, Curanmor roda 2, Curanmor roda 4, pencurian kawat telepon, pencurian kayu, pencurian dengan senpi, pencurian dengan senjata tajam, pembajakan, kenakalan remaja, perkelahian TNI/ Polri, perkara koneksitas, Laka Lintas korban mati, laka kereta api korban mati, laka laut korban mati, dan laka udara korban mati dengan jumlah kejadian yang terjadi pada tahun 2008 sebanyak 53.071 kejadian yang dipastikan banyak dilakukan oleh kalangan pemuda.

Tabel 2.1 Persentase Peristiwa Penting Gangguan Kamtibmas (PPGK) Khusus, Tahun 2008

Peristiwa	Persentase
Curanmor Roda 2	59,63
Kecelakaan Lalu Lintas Korban Mati	13,05
Unjuk Rasa	9,70
Curanmor Roda 4	5,95
Pencurian Kayu	5,65
Pencurian dengan Senjata Tajam	2,21
Pencurian Kawat Telepon	1,33
Kecelakaan Kereta Korban Mati	1,20
Pencurian dengan Senjata Api	0,65
Pembajakan	0,28
Pemogokan	0,15
Kecelakaan Laut Korban Mati	0,09
Kenakalan Remaja	0,06
Kecelakaan Udara Korban Mati	0,04

Peristiwa	Persentase
Perkelahian TNI/ POLRI	0,01
SARA	0,00
Perkara Koneksitas	0,00

Kesemua data diatas mengganibarkan betapa kurangnya jiwa kepeloporan dan melakukan nilai-nilai luhur di kalangan pemuda Indonesia saat ini. Permasalahan lain adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda. Sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya angka pengangguran di Indonesia yang berarti terjadi ketidakberdayaan di kalangan pemuda. Ditahun 2006, dicatat oleh Sakernas bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 10,45% dari total jumlah penduduk. Dari angka total tersebut, 62% di antaranya adalah golongan pemuda. Data yang dilansir BPS di tahun 2008, menunjukkan bahwa per periode 2007, jumlah pemuda yang menganggur di Indonesia mencapai 10 juta orang lebih. Sementara “penganggur intelektual” (bergelar sarjana) mencapai 409.890 orang.

Gambar 1.2 Grafik Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: Bank Indonesia, 2007

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing pemuda. Sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/ mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya.

Kepeloporan pemuda yang dahulu memulai aktivitas pergerakan kemerdekaan bangsa saat ini telah mengalami perubahan. Kepeloporan yang diperlukan bangsa saat ini adalah kepeloporan yang dapat menyentuh dan menggerakkan masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dari sebelumnya. Jiwa kepeloporan saat ini menjadi hal yang langka karena tidak banyak pemuda Indonesia yang rela untuk mendarmabaktikan diri untuk menjadi orang yang melangkah di depan sebuah perubahan yang dilandasi semangat kesukarelaan, keikhlasan dan kecintaan terhadap bangsa.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mencoba memfasilitasi pemuda untuk menggiatkan kepeloporan agar bangsa ini bangkit dari ketertinggalannya. Berbagai permasalahan tersebut dihadapkan pada tantangan pembangunan yang masih kompleks. Setidaknya, tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan era globalisasi yang akan memunculkan persoalan baru di bidang kepemudaan. Hal ini akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa di kalangan pemuda juga akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Tantangan lain adalah belum terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kemenpora RI dalam mengembangkan kepeloporan pemuda?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan di bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan program Kemenpora RI dalam mengembangkan kepeloporan pemuda.

1. 4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak berikut:

1. Civitas Akademika

Penelitian ini akan menambah wacana serta sudut pandang baru dalam menganalisis kepeloporan pemuda, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan karena kepeloporan dan kepemimpinan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah (khususnya Kemenpora), baik di level pusat maupun daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rekomendasi akademis untuk meningkatkan kepeloporan pemuda Indonesia.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan

Melalui penelitian ini, diharapkan LSM/ OKP dapat mewacanakan pentingnya kepeloporan dalam membina dan memberdayakan masyarakat.

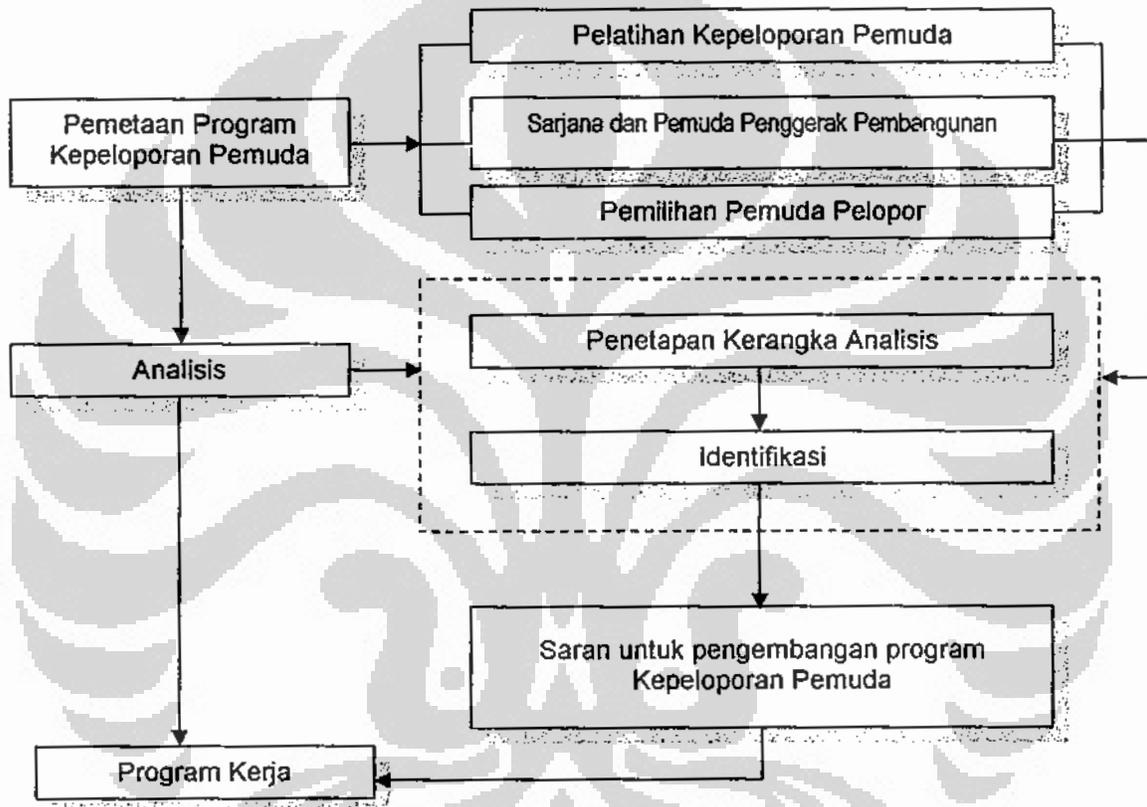
1. 5. Signifikansi Penelitian

Ada dua alasan utama mengapa peneliti memutuskan untuk mengangkat tema ini sebagai bahan untuk diteliti dalam tesis ini. Pertama adalah alasan praktis di mana saat ini kepeloporan adalah suatu hal yang langka dan sangat dipelukan oleh bangsa ini. Alasan kedua merupakan alasan teoritis. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di dalam lingkup civitas akademika Universitas Indonesia mengenai kepeloporan pemuda baik secara pergerakan kemerdekaan dan sejarah budaya, sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik membahas kepeloporan pemuda dan program-program pengembangannya.

Berdasarkan dua alasan tersebut, signifikansi penelitian ini dapat terlihat cukup jelas. Riset ini akan memberi masukan dan sudut pandang lain mengenai kepeloporan pemuda, khususnya secara akademis.

1.6. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1.3 Alur Pikir Penelitian



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam riset ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang akan menjadi pisau analisis bagi penelitian. Pertama, teori kepeloporan. Kedua, teori pengembangan program. Melalui teori-teori atau konsep-konsep tersebut, peneliti akan menelaah program kepeloporan yang ada di Kemempora RI. Sebelum penjelasan yang lebih rinci mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan definisi/ teori dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

2. 1. Definisi Kepeloporan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyamakan pelopor dengan kata “pionir”, artinya “yang berjalan di depan/ terdahulu”, atau “perintis” dan pembuka jalan. Pelopor berarti bahwa mereka mesti berjalan di depan atau membukakan jalan bagi para klien (dalam konteks ini pemuda yang diberdayakan) untuk mencapai model kepemimpinan yang diinginkan. Sikap kepeloporan seseorang dapat dirujuk pada pengertian leksikal bahwa pelopor adalah “pasukan perintis (yang terdepan) gerak pembaharuan (tanpa memperhitungkan resiko yang mungkin dialami)” (KBBI, 2005).

Dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan tertulis dalam pasal 1 ayat 9 bahwa pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Dan dalam pasal 29 ayat 1 tertulis bahwa pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 4 tertulis bahwa pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan sesuai dengan karakteristik/ ciri khas daerah.

Dalam buku panduan program pemilihan pemuda pelopor, kepeloporan adalah akumulasi semangat, sikap dan kesukarelawanan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggungjawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah

gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kepeloporan dalam perspektif kepemimpinan merefleksikan suatu kekuatan (*power*) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap terbentuknya kualitas dan akuntabilitas pemimpin itu sendiri.

Kepeloporan dapat digolongkan menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:

1. Kewirausahaan

Kepeloporan di bidang kewirausahaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi produk yang bertumpu/ berbasis pada sumber daya local sehingga memiliki nilai tambah, seperti sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bernilai ekonomi, serta telah dimanfaatkan dan berhasil meningkatkan perekonomian, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan

Kepeloporan di bidang pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi teknologi pendidikan, metode pembelajaran, dan atau pengembangan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, baik formal, non formal, maupun informal, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan.

3. Teknologi Tepat Guna

Kepeloporan di bidang teknologi tepatguna adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan rekayasa/ rancang bangun teknologi sederhana yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan atau mempermudah kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Senibudaya dan Pariwisata

Kepeloporan senibudaya adalah rangkaian kegiatan secara terpadu dalam mengembangkan/ menemukan/ menciptakan kreasi dan atau pelestarian senibudaya yang dapat menggugah apresiasi senibudaya di masyarakat dan

mengangkat citra seni budaya bangsa Indonesia serta bermanfaat dalam promosi pariwisata Indonesia.

5. Kebaharian dan Kelautan

Kepeloporan Kebaharian dan kelautan adalah prakarsa dan perintisan pemuda dalam memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya laut, biota laut, pantai dan atau terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu kelebihan yang dimiliki pemuda adalah semangat dan energi yang melimpah. Semangat dan energi ini menjadi tenaga yang menggerakkan pemuda sehingga senantiasa berada di garda terdepan dalam mengawal pembangunan. Semangat tersebut mengasah jiwa kepeloporan pemuda sehingga mendorongnya untuk selalu berada di depan dan mengambil peran sebagai pelopor perubahan dan pembangunan. Jiwa kepeloporan pemuda ini terdapat pada berbagai aspek, kepemimpinan, sosial, kewirausahaan, politik, dan lain sebagainya. Jiwa kepeloporan inilah yang harus senantiasa dibangun sehingga pemuda senantiasa menunjukkan jiwa dan semangat kepeloporan dalam mengisi pembangunan. Kepeloporan pemuda tidak hanya berupa gerakan dalam konteks politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam gerakan sosial-keswadayaan sebagai *social workers*, penumbuhan modal sosial, pengembangan seni dan budaya, kegiatan ekonomi kreatif, serta kegiatan olahraga.

2.2. Definisi Pengembangan Program

Organisasi merupakan suatu sistem yang berproses, artinya sistem tersebut tidaklah statis. Sebagai sistem yang berproses maka organisasi memiliki peluang untuk melakukan perubahan atas masukan ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu organisasi seharusnya terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Dikatakan terbuka karena sebagai suatu sistem, organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan sekitarnya, misalnya modal, material, informasi, sumber tenaga manusiawi (masukan/ input).

Proses pengembangan organisasi akan sangat erat kaitannya dengan evaluasi program. Evaluasi program adalah proses menentukan kualitas suatu

program secara sistematis dan bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan (Sanders & Sullins, 2006: 1). Rancangan untuk suatu evaluasi didukung oleh; (1) seperangkat pengukuran kinerja program secara kuantitatif atau kualitatif (2) seperangkat analisis yang digunakan pengukuran untuk menjawab pertanyaan kunci tentang kinerja program. Evaluasi dirancang termasuk cara untuk menggambarkan sumber program, aktivitas program, dan *outcomes* program sebanding dengan metode untuk mengestimasi pengaruh aktivitas program, yaitu, perbedaan antara *outcomes* program dan *outcomes* yang telah terjadi tanpa program (Wholey, Harty, Newcomer, 1994: 11).

Evaluasi program termasuklah pengukuran kinerja program—sumber biaya, aktivitas program, dan *outcomes* program—dan pengujian asumsi sementara yang berhubungan dengan tiga elemen ini. Satu kontribusi potensial penting dari evaluasi program adalah kegunaannya oleh pengambil kebijakan, manager, dan staf untuk mengubah sumber, aktivitas, atau tujuan program untuk meningkatkan kinerja program. Bagaimanapun juga, evaluasi mengandung lebih banyak seni daripada ilmu pengetahuan. Rencana setiap dukungan evaluasi membutuhkan keputusan pekerjaan yang sulit sebagai *evaluator* mencoba untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab. *Evaluator* harus mengimbangi yang dapat dilakukan dan biaya desain dengan keuntungan hasil evaluasi dalam meningkatkan kinerja program atau mengkomunikasikan nilai aktivitas program kepada pengambil kebijakan atau masyarakat umum (Wholey, Harty, & Newcomer, 1994: 15).

Masukan-masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (*output*) berupa barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna. Para pengguna itu nantinya akan memberikan umpan balik yang dapat berperan sebagai masukan dalam proses selanjutnya. Umpan balik tadi sesungguhnya berperan sebagai suatu mekanisme yang turut mengatur kehidupan suatu organisasi. Dari definisi-definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Organisasi merupakan:

- 1) perubahan berencana;
- 2) berorientasi kepada persoalan dan usaha pemecahannya;
- 3) menggunakan pendekatan kesisteman;

- 4) bagian integral dari proses manajemen;
- 5) usaha yang dilakukan secara terus-menerus;
- 6) memberikan perhatian utama kepada peningkatan;
- 7) berorientasi kepada pelaksanaan.

Pengembangan program organisasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda merupakan perubahan terencana yang dilaksanakan secara sadar untuk mempertahankan eksistensi lembaga dan meningkatkan kontribusi institusi bagi pembangunan kepemudaan nasional. Perubahan terencana menurut Moleong (2000), adalah perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan.

Proses Perubahan menurut Lowenthal (1994), terdiri dari 4 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Perubahan, dimulai saat pimpinan puncak organisasi mulai mempertimbangkan dan membahas rencana awal perubahan bersama manajemen tingkat atas dan membentuk tim *change agents*.
2. Tahap Perencanaan Perubahan, dilaksanakan dengan mencanangkan Visi, Misi, dan Prinsip-prinsip utama organisasi. Visi dan Misi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Strategis 3-5 tahun dan Rencana Kerja Tahunan.
3. Tahap Rencana Perubahan, dilaksanakan dengan analisis atas kondisi proses internal organisasi untuk menentukan unit proses yang akan menjadi sasaran perubahan. Rencana perubahan dirancang secara terperinci mencakup *stakeholders* yang terkait, sasaran yang diinginkan, tim yang bertanggung jawab, dan rencana kerja tim. Rancangan perubahan juga perlu mempertimbangkan hambatan yang mungkin terjadi pada rencana perubahan dan faktor budaya yang mempengaruhi implementasi rencana perubahan. Sasaran perubahan ditentukan setelah *ideal process* yang menjadi *benchmark* ditetapkan dan *gap analysis* dilaksanakan dengan membandingkan *ideal process* dengan kondisi riil proses internal organisasi. Sasaran perubahan diperinci dengan standar ukuran keberhasilan dan analisis dampak perubahan. Sasaran perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari seluruh

stakeholders yang terkait. Tahap ini diakhiri dengan implementasi rencana perubahan yang telah dirancang secara terperinci tersebut.

4. Tahap Evaluasi Perubahan, dilaksanakan setelah rencana perubahan diimplementasikan dan didasarkan atas standar ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Evaluasi perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh tim *change agents* dan seluruh manajemen organisasi. Hasil evaluasi perubahan dimaksud kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* untuk revisi dan penyusunan rencana strategis jangka panjang organisasi.

Proses pengembangan program tidak terbatas pada periode tertentu melainkan harus dijalankan secara berkesinambungan. Strategi dan program yang telah dijalankan harus direvisi sesuai hasil evaluasi berkala, dan harus diselaraskan dengan perkembangan pembangunan kepemudaan nasional. Lembaga harus menjadi *learning organization* yang selalu siap memperbaiki kinerja, melaksanakan perubahan yang diperlukan dan proses pembelajaran di setiap unit organisasi, agar lembaga mampu beradaptasi dengan perkembangan yang dituntut atas institusi pemerintah yang menangani kepemudaan dari lingkungan dan *stakeholdersnya*.

2.3. Operasional Konsep

Secara umum proses penggambaran konsep akan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Operasional Konsep

No.	Konsep	Jenis Data	Instrumen	Sumber Data	Indikator	Item Pedoman Wawancara
1.	Kepeloporan	Primer	Wawancara	1. Deputi II Kemempora.	Akumulasi semangat, sikap dan kesukarelawanan	- Definisi kepeloporan
				2. Asdep Kepeloporan Pemuda		- Kepeloporan dan semangat sesukarelawanan
				3. Staf Asdep Kepeloporan Pemuda	Dilandasi kesadaran diri atas tanggungjawab sosial	- Hal yang melatarbelakangi kepeloporan
				4. Pemuda Pelopor	Untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah	- Kepeloporan dan tanggung jawab sosial
						- kepeloporan dan transformasi gagasan

No.	Konsep	Jenis Data	Instrumen	Sumber Data	Indikator	Item Pedoman Wawancara
					gagasan menjadi suatu karya nyata	menjadi gerak nyata.
					Dilaksanakan secara konsisiten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat	- Konsistensi dalam pelaksanaan kepeloporan
					Penggolongan kepeloporan: kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata, kebaharian dan kelautan.	- Jenis pembinaan/ pengembangan kepeloporan yang dilaksanakan di Kemenpora
2.	Pengembangan Organisasi	Primer	Wawancara	1. Deputi II Kemenpora. 2. Asdep Kepeloporan Pemuda 3. Staf Asdep Kepeloporan Pemuda	Evaluasi (kualitatif dan kuantitatif)	- Teknis proses evaluasi program yang ada di Kemenpora - Evaluasi secara kualitatif - Evaluasi secara kuantitatif
					Pengukuran kinerja program (sumber daya, aktivitas dan outcome)	- Cara mengukur kinerja program
					Proses pengembangan pasca evaluasi 1) perubahan terencana; 2) berorientasi kepada persoalan dan usaha pemecahannya; 3) menggunakan pendekatan kesisteman; 4) bagian integral dari proses	- Cara mengembangkan program setelah dievaluasi - Langkah-langkah mengembangkan/ memperbaiki program - Pendekatan manajerial perbaikan program yang digunakan

No.	Konsep	Jenis Data	Instrumen	Sumber Data	Indikator	Item Pedoman Wawancara
					manajemen; 5) usaha yang dilakukan secara terus-menerus; 6) memberikan perhatian utama kepada peningkatan kualitas; 7) berorientasi kepada pelaksanaan.	- Orientasi utama adalah kualitas program

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa hal yang membuat peneliti mengambil keputusan untuk menggunakan pendekatan kualitatif pada tesis ini, yaitu:

- Penelitian terdahulu yang dilakukan dibangun melalui *grounded theory* yang banyak menggunakan metode kualitatif dalam analisisnya.
- Metode Penelitian Kualitatif adalah teknik yang cocok untuk meneliti suatu fenomena sosial, terutama yang terkait dengan konsep mengenai individu karena mengharuskan si peneliti untuk terjun langsung ke dalam lapangan penelitian. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Creswell (2003):

"Qualitative research takes place in the natural setting... This enables the researcher to develop a level of detail about the individual or place and to be highly involved in actual experiences of the participant..."

- Dalam metode ini salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan *key informan*, sehingga eksplorasi dapat dilakukan lebih mendalam dan berkembang, tidak seperti pertanyaan dalam kuesioner yang cenderung terbatas dan sulit untuk dieksplorasi lebih jauh.
- Melalui teknik ini kemampuan analisis peneliti juga akan secara otomatis teruji, karena mekanisme penilaian yang lebih subjektif. Sekaligus suatu tantangan, mengingat sepanjang proses penelitian sangat mungkin terjadi pembaharuan-pembaharuan serta perbaikan selama di lapangan.
- Karena keterlibatan secara langsung dalam pengumpulan data di lapangan hingga proses analisis dan penilaian, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat lebih dipertanggungjawabkan dan mampu memberikan kesempatan untuk memahami secara total permasalahan yang tengah diteliti .

Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa hal-hal atau fenomena-fenomena baru dalam hubungan kepeloporan, program kerja kepeloporan Kemenpora RI dan efektivitasnya. Sebagaimana yang dikemukakan Neuman (2000), melalui penelitian eksplanatif, penelitian ini dibangun untuk mengidentifikasi alasan atau

sebab suatu hal terjadi. Sedangkan berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan, secara spesifik mengambil bentuk *evaluation research* (Neuman, 2000). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan serta menjadi bahan pertimbangan dan memberi masukan bagi pemerintahan RI untuk meningkatkan program kepeloporan pemuda.

3. 1. Teknik Pengumpulan Data

o Wawancara mendalam

Terkait dengan tujuan penelitian, maka wawancara mendalam adalah hal mutlak yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang disampaikan pada penelitian sebelumnya bahwa pengumpulan data mengenai proses sosial kepemimpinan paling baik diperoleh melalui wawancara. Mengingat pentingnya wawancara ini, maka proses pencarian dan penentuan informan yang tepat juga harus diperhatikan. Karena waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian ini sangat terbatas, maka sangat tidak mungkin bila peneliti harus mewawancarai banyak informan. Pada data dan sumber data wawancara mendalam, Peneliti mengolah data dengan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar informan berdasarkan prioritas keterkaitan informan terhadap obyek penelitian.
- b. Menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin digali secara mendalam.
- c. Menyusun jadwal wawancara mendalam antara peneliti dengan informan.
- d. Melakukan wawancara mendalam dengan informan.
- e. Menyusun laporan wawancara mendalam setiap informan.
- f. Membandingkan informasi yang diterima dari beberapa informan.
- g. Menganalisa seluruh informasi dari seluruh informan sebagai kesimpulan data wawancara mendalam.
- h. Menyusun kesimpulan data wawancara mendalam ke dalam laporan penelitian.
- i. Mencantumkan informasi mengenai informan dalam laporan penelitian.

o **Penelusuran dokumen**

Untuk menunjang penelitian, maka penelusuran dokumen-dokumen penting yang terkait dengan program kepeloporan pemuda di Kemenpora menjadi amat berarti. Selain itu melalui dokumen-dokumen tersebut objektivitas peneliti akan lebih terjaga, khususnya dokumen-dokumen yang bisa mendukung proses triangulasi data. Untuk memperolehnya, maka upaya menjalin hubungan baik dengan para informan dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Pada data dan sumber data penelusuran dokumen, Peneliti mengolah data dengan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Penelusuran berbagai data dokumen yang sekiranya terkait dengan tema penelitian dan sumber data instansi/ lembaga yang memiliki dan/ atau menyimpan dokumen tersebut
- b. Menentukan data dokumen dan sumber data instansi/ lembaga yang memiliki dan/ atau menyimpan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Mendapatkan secara sah salinan data dokumen dari sumber data dokumen yang memiliki dan/ atau menyimpan data dokumen tersebut.
- d. Membaca data dokumen.
- e. Menyusun kesimpulan dan/ atau mengutip isi dari data dokumen untuk digunakan dalam penelitian.
- f. Mencantumkan sumber data dokumen dalam laporan penelitian.

o **Tinjauan Pustaka**

Metode ini tidak bisa terlupakan dalam hampir semua penelitian, termasuk penelitian ini. Bagi penelitian dengan metode kualitatif, penggalian informasi yang terangkum dalam berbagai buku, jurnal, maupun referensi lain yang terkait dengan penelitian akan mempermudah dan memperkaya analisis yang dihasilkan melalui penelitian ini. Selain itu, dengan memperkaya diri dengan beragam wacana dalam referensi, maka subjektivitas peneliti akan lebih terjaga. Pada data dan sumber data tinjauan pustaka, Peneliti mengolah data dengan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Penelusuran berbagai data pustaka dan sumber data pustaka yang sekiranya terkait dengan tema penelitian.
- b. Menentukan data pustaka dan sumber data pustaka yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Membaca data pustaka yang digunakan dalam penelitian.
- d. Menyusun kesimpulan dan/ atau mengutip isi dari data pustaka yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mencantumkan sumber data pustaka dalam laporan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan sekitarnya.

3.3. Narasumber/ Informan

Pada laporan hasil penelitiannya, diberikan penekanan pada pentingnya memilih informan yang tepat dalam penelitian ini. Mengingat penelitian ini merupakan sebuah studi yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam riset ini peneliti menggunakan teknik tertentu untuk menentukan informan dengan cara yang digunakan pada penelitian terdahulu. Peneliti akan lebih memfokuskan diri pada narasumber yang terlibat langsung dalam lingkaran inti permasalahan yang terbagi atas tiga level atau tingkatan, yaitu *high management*, *middle management*, *low management* dan *operational level*.

Selain target utama informan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti juga mencoba menggunakan teknik *snowball* dalam menjaring informan kompeten lain yang mungkin terlewat dalam daftar ini namun mampu memberikan informasi yang signifikan bagi penelitian sekaligus sebagai upaya antisipasi bila informan utama tidak dapat diwawancarai. Persyaratan utama bagi informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung baik secara konsep, operasional maupun objek (peserta) dari program.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

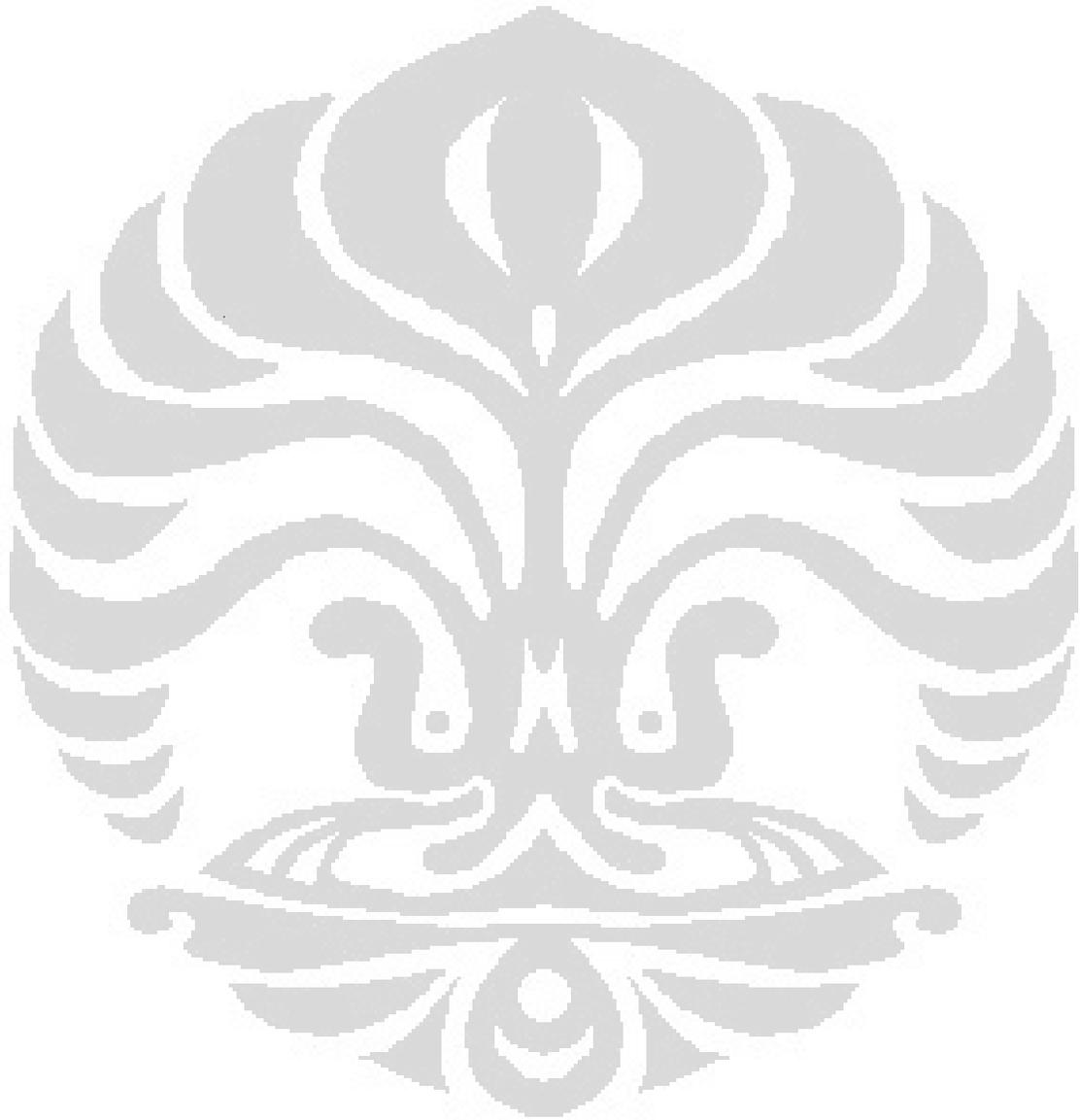
No.	Nama Informan	Jabatan/ Instansi
1.	Dr. M. Budi Setiawan	Deputi II Menpora
2.	Dr. H. Amir Hamzah	Asdep Kepeloporan Pemuda
3.	Drs. Bandingan Daulay	Staf Asdep Kepeloporan Pemuda
4.	Suaeb Mahbub	Pemuda Pelopor dari Jakarta Utara
5.	Clara Anggraeni, S.Sos.	Salah satu peserta program SP3
6.	Andi Faishal Yusthi	Salah satu peserta program pelatihan kepeloporan
7.	Drs. Asmari Yogi	Lurah tempat pelaksanaan program SP3

3.4. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data-data yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti. Pertama menerapkan sistem *triangulasi* dan *member-checking* seperti yang dikemukakan Creswell (2003). *Triangulasi* adalah upaya untuk menguji validitas data dengan membandingkan informasi yang diterima dari para informan dengan data atau dokumen-dokumen lain yang terkait. Sedangkan *member-checking* dilakukan dengan menanyakan informasi yang diperoleh dari satu narasumber kepada narasumber yang lain serta membuat daftar pertanyaan utama yang ditanyakan kepada seluruh narasumber, sehingga terlihat jelas persamaan atau perbedaan dari data yang diperoleh. Kedua, melalui data-data sekunder yang terkait, khususnya dari instansi resmi seperti Kantor Kemenpora RI dan media massa baik cetak maupun elektronik.

3.5. Instrumen Penelitian

Sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, maka instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan utama yang akan diajukan kepada seluruh informan. Pertanyaan ini hanya bersifat sebagai *guidance* atau pedoman semata, kalimat atau bentuk pertanyaan akan disesuaikan bahkan mungkin ditambah atau dikurangi sesuai dengan kapasitas informasi serta fungsi atau peranan yang mereka miliki.



BAB 4

PEMBAHASAN

Pada Bab 4 akan dipaparkan mengenai profil Kemenpora RI, program-program Kepeloporan Pemuda di Kemenpora RI, analisis kepeloporan dan analisis strategi pengembangan program kepeloporan pemuda yang dilakukan oleh Kemenpora RI.

4. 1. Profil Kemenpora RI

Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurus pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga.

Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945. Pada kurun waktu masa kemerdekaan yaitu pada tahun 1945-1949 terdapat dua lembaga pemerintah yang mengurus olahraga yaitu Kementerian PPK dan Kementerian Pemuda Pembangunan. Kementerian Pengajaran diubah namanya menjadi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat PPK dengan Menteri Mr. Todung Gelar Sutan Gunung Mulia. Dan pada saat itu juga dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani di Jawa dengan nama Inspeksi Olahraga, yang dikepalai Sadarjun Siswomartoyo. Sedangkan Kepala Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani adalah R. Poera Martodipoera.

Pada tahun 1957 pada Kabinet Kesatuan VI, Menteri PPK dijabat oleh Sarino Mangunpranoto. Sesuai kebijakan Presiden, diadakan reorganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani (IPPD) yang ada pada Djawatan Pengajaran PP&K dirubah menjadi

Biro Pendidikan Jasmani dengan surat KepMen PP&K tanggal 13 Maret 1957 No. 1778/S dan No.32501/S.

Pada masa ini dibentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan Komite Olahraga Republik Indonesia (KORI). PORI bergiat di ranah olahraga masyarakat sedangkan KORI mengurus hubungan dengan luar negeri. PORI berhasil menyelenggarakan pekan olahraga pertama yang disebut PON I yang diadakan di Surakarta pada tahun 1948. Pada tahun 1950 KORI namanya diubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Agar gerakan olahraga dapat diperhebat dan diluaskan sampai ke pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia maka Presiden Sukarno membentuk Komando Gerakan Olahraga (KOGOR) pada tahun 1961 dan ditunjuk Maladi, Menteri Penerangan, sebagai ketuanya.

Menjelang Asian Games IV tahun 1962 yang digelar di Jakarta, Pemerintah merubah struktur organisasi Kementerian PP & K dari Biro Pendidikan Jasmani ditingkatkan statusnya menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani yang dibentuk melalui SK Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 109751/UU tanggal 14 Desember 1960. Selain itu pada 1962 juga dibentuk Dewan Asian Games (DAGI) sebagai bagian dari upaya menjamin hasil-hasil yang dapat mengharumkan nama Indonesia dalam perlombaan-perlombaan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tertanggal 9 April 1962 menjadi dasar pembentukan Departemen Olahraga. Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1962. Dalam Kepres 131 disebutkan bahwa olahraga mempunyai fungsi yang amat penting di dalam *nation building* Indonesia, yaitu membentuk Manusia Indonesia Baru. Yang dimaksud dengan Manusia Indonesia Baru adalah Manusia Indonesia yang tegak dan kuat fisik, mental, rohani, dan jasmani, berjiwa Pancasila dan pelaksana Amanat Penderitaan Rakyat yang ulet.

Sebagai Menteri Olahraga pertama adalah Maladi, yang dalam tugasnya dapat membentuk jawatan/biro/bagian maupun kantor-kantor cabang di daerah. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil masuk ranking kedua dalam Asian Games IV tahun 1962 dan pada Ganefo (Games of The New Emerging Forces) I tahun 1963 meraih ranking III. Atas keberhasilan itulah maka

Pemerintah mengeluarkan Keppres RI No.263 Tahun 1963 untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia sampai pada taraf internasional yang setinggi-tingginya. Pada tahun 1964 dibentuk Dewan Olahraga Indonesia (DORI).

Pada 12 Februari 1966, Presiden Sukarno membentuk Kabinet Dwikora. Dimana Departemen Olahraga yang dipimpin oleh seorang menteri tetap berada dibawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) dengan Prof. Dr. Prijono sebagai menteri koordinator. Tetapi kabinet ini tidak bertahan lama, karena tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan tiga tuntutananya (Tritura). Akhirnya Presiden Sukarno menyempurnakan kabinetnya yang disebut Kabinet Dwikora yang disempurnakan, diumumkan pada tanggal 27 Maret 1966. Departemen Olahraga tetap berada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) tetapi dipimpin oleh seorang deputi menteri, yang masih dijabat oleh Maladi.

Sidang Umum IV tahun 1966 salah satunya menetapkan pembentukan Kabinet Ampera selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1966. Dalam Kabinet Ampera, Departemen Olahraga dihilangkan, urusan olahraga di urusi setingkat direktorat jenderal. Sama seperti olahraga, bidang pemuda juga diurusi setingkat direktorat jenderal dengan nama Direktorat Jenderal Pemuda dan Pramuka. Dirjen Olahraga adalah Kol. Sukanto Sadjiman sedangkan Dirjen Pemuda dan Pramuka adalah Mutahar, dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto.

Dalam buku Sejarah Olahraga Indonesia (2003) disebutkan pada 1969 dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1969, Dirjen Olahraga dan Dirjen Pemuda dan Pramuka digabung dan diberi nama Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda, dengan Mayjen Supardi sebagai Dirjen. Dirjen Olahraga dan Pemuda memiliki struktur (1) Sekretaris Olahraga Pendidikan; (2) Direktorat Olahraga Pendidikan; (3) Direktorat Keolahragaan; (4) Direktorat Kepemudaan; (5) Direktorat Pendidikan Masyarakat; (6) Direktorat Pendidikan Masyarakat; (7) Direktorat Pendidikan dan Penataran, (8) Direktorat Khusus; (9) Lembaga Pendidikan Kesegaran Jasmani; dan (10) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Prasarana.

Sebelum ditingkatkan menjadi kementerian, Dirjen Olahraga dan Pemuda diubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 1978, pada Kabinet Pembangunan II, pertama kali dibentuk Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda dengan Abdul Ghafur sebagai Menteri Muda. Diawali dari pengarahan Presiden Suharto pada Musyawarah Nasional Olahraga IV pada tanggal 19 Januari 1981 yang menyatakan bahwa kegiatan olahraga harus ditingkatkan dan disebarluaskan maka pada bulan Mei 1983 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983 tentang pembentukan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Keppres tersebut menyebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan penanganan antara lain bidang pemuda dan olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, maka dipandang perlu untuk menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Salah satu tupoksinya berbunyi "pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan tugasnya yang menyangkut bidang tanggung jawab Menpora berkewajiban mengadakan konsultasi dengan Menpora khususnya mengenai segala kegiatan yang menyangkut masalah kepemudaan dan keolahragaan".

Dari tahun 1983 hingga 2000 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga selalu masuk dalam kabinet. Sebagai menteri selanjutnya secara berturut-turut adalah Ir. Akbar Tandjung (1987-1993), Hayono Isman (1993-1998), Agung Laksono (1998), dan Mahadi Sinambela (1999-2000). Tradisi Kabinet Pembangunan salah satunya adalah membentuk Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang menterinya selalu diambil dari tokoh pemuda/mantan aktivis pemuda. Abdul Ghafur merupakan mahasiswa angkatan '66, pentolan KAMI. Begitupun Akbar Tandjung, aktivis angkatan '66 sekaligus sebagai mantan Ketua Umum PB HMI. Hayono Isman dan Agung Laksono adalah aktivis pemuda di jamannya. Bahkan Hayono Isman saat menjabat sebagai Menpora masih sebagai Ketua Umum GM Kosgoro.

Pada Pemerintahan Kabinet Persatuan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dipimpin Menteri Negara, Mahadi Sinambela, mantan aktivis HMI. Tetapi ketika berumur belum genap dua tahun, kementerian ini dilikuidasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Kabinet Gotong Royong, Kementerian

Negara Pemuda dan Olahraga tetap ditiadakan. Urusan kepemudaan dan keolahragaan dimasukkan ke Departemen Pendidikan Nasional dibawah Direktorat Jenderal Olahraga dan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Kabinet Indonesia Bersatu, menghidupkan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga kembali. Adhyaksa Dault, mantan Ketua Umum DPP KNPI periode 1999-2002, dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sengaja menghidupkan kembali kementerian ini karena menganggap penting dan strategis persoalan kepemudaan dan keolahragaan. Dengan tugas Kemenpora adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pemasyarakatan dan perintisan di bidang Pemuda dan Olahraga dalam pemerintahan negara.

Secara singkat, daftar Menteri Pemuda dan Olahraga dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dari Masa Ke Masa

No.	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1.		Wikana	Kabinet Sjahrir II	29 Juni 1946	2 Oktober 1946	Bernama Menteri Negara Urusan Pemuda
			Kabinet Sjahrir III	2 Oktober 1946	27 Juni 1947	Bernama Menteri Negara Urusan Pemuda
			Kabinet Amir Sjarifudin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Bernama Menteri Negara Urusan Pemuda
			Kabinet Amir Sjarifudin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Bernama Menteri Negara Urusan Pemuda

No.	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
2.		Supero	Kabinet Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949 [1]	Bernama Menteri Pembangunan/Pemuda
3.		Maladi	Kabinet Dwikora I	27 Agustus 1964	21 Februari 1966	Bernama Menteri Olah Raga
			Kabinet Dwikora II	21 Februari 1966	27 Maret 1966	Bernama Menteri Olah Raga
4.		dr. Abdul Gafur	Kabinet Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Bernama Menteri Muda Urusan Pemuda
			Kabinet Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988	Berganti nama menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
5.		Ir. Akbar Tanjung	Kabinet Pembangunan V	21 Maret 1987	17 Maret 1993	
6.		Hayono Isman	Kabinet Pembangunan VI	17 Maret 1993	16 Maret 1998	

No.	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
7.		H.R. Agung Laksono	Kabinet Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998	
8.		Drs. Mahadi Sinambela	Kabinet Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	26 Oktober 1999	
		Tidak Ada	Kabinet Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Dihapuskan
		Tidak Ada	Kabinet Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Dihapuskan
9.		Adhyaksa Dault, S.H., M.Si.	Kabinet Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	22 Oktober 2009	Diadakan kembali
10.		Andi Mallarangeng	Kabinet Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	sekarang	Berganti nama menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga

Pada masa ini, Kemenpora memiliki struktur sebagai berikut: (1) Sekretaris Menteri; (2) Deputi Pemberdayaan Pemuda; (3) Deputi Pengembangan Kepemimpinan dan Kaderisasi Pemuda; (4) Deputi Kewirausahaan dan Industri Olahraga; (5) Deputi Pemberdayaan Olahraga; (6) Deputi Peningkatan Prestasi dan Iptek Olahraga; (7) Staf Ahli; (8) Staf Khusus Menteri; (9) Inspektorat; dan (10) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Yang membedakan antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dulu dengan sekarang adalah adanya kewenangan operasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 pada Pasal 140 C disebutkan bahwa Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga juga menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan. Dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan, untuk pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Kembalinya Kemenpora sebagai bagian dari kabinet pemerintahan menimbulkan harapan baru bagi peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Bagi pemuda, tentu saja harapannya adalah perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda semakin meningkat. Apalagi saat ini banyak kalangan generasi muda yang tidak memiliki akses untuk mandiri. Tetapi yang juga menjadi sorotan adalah keinginan agar Kemenpora tidak menjadi badan pengkebiri kreativitas pemuda. Mereka tidak ingin pola Orde Baru, yang melakukan penyeragaman dan kooptasi kembali muncul.

Tidak berbeda dengan pemuda, masyarakat dan kalangan olahraga juga menaruh harapan besar. Apalagi prestasi olahraga Indonesia terlihat semakin merosot. Dalam pandangan masyarakat, prestasi olahraga merupakan tanggung jawab Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Bila telah dibentuk kementerian maka masyarakat hanya ingin melihat peningkatan prestasi olahraga kita. Bila prestasi olahraga Indonesia merosot maka yang disalahkan adalah Kemenpora. Padahal yang diurus oleh Kemenpora tidak hanya olahraga prestasi saja tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 adalah **"Mewujudkan Kepemudaan Dan Keolahragaan Yang Berdaya Saing"**. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 tidak terlepas dari upaya

mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global.”

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: “memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional”.

Sedangkan misi Kemenpora adalah “**Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan Dan Keolahragaan**”. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 mengandung arti:

1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinneka tunggal ika-an untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kependuan/ kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Lambang Kementerian Pemuda dan Olahraga RI adalah sebagai berikut:



Sedangkan makna lambang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Makna Lambang Kemenpora RI



Tangan Kanan Mengepal : Merupakan wujud Tekad, Semangat, Kokoh, Teguh, Kemauan kuat Pemuda untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika. **Tiga pilar pada tangan mengepal** mempunyai makna ketiga peristiwa sejarah yaitu: Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Kemerdekaan Indonesia 1945 yang Pelaku utamanya adalah Pemuda.

Warna Biru mempunyai makna lambang/symbolik : Keliasan Pandangan dan Pikiran, Smart, Bergerak Maju, Inovatif dan Inspiratif, Kedewasaan, Kematangan, Penguasaan Ilmu Pengetahuan, dan Dinamis



Api Obor merupakan perwujudan semangat/spirit Nasionalisme yang tak pernah padam sejak dikobarkan oleh Boedi Oetomo tahun 1908 yang menjadi momentum Kebangkitan Indonesia sebagai Bangsa(Nation)



Tiga Cincin warna Merah melambangkan semangat Kesetupaduan untuk mengembangkan ruang lingkup bidang Olahraga : Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi serta Semangat untuk mengharumkan dan memperjuangkan kehormatan Bangsa Indonesia dan mendorong Keolahragaan Nasional yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa, memperkuat Ketahanan Nasional, serta mengangkat harkat dan martabat dan kehormatan bangsa



Lingkaran oval : Lingkaran adalah bentuk bidang yang sempurna, ini menggambarkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Lembaga Negara yang Solid, Kokoh, Kuat, Smart, Bernurani, Berdedikasi Tinggi yang membidangi Pemuda dan Olahraga yang dilandasi oleh rasa cinta dan tanggungjawab demi bakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warna Merah mempunyai makna kekuatan, kemampuan, dan semangat yang tidak pernah pudar untuk terus memperjuangkan, mempertahankan, serta menumbuhkembangkan Potensi Pemuda dan semangat Olahraga Indonesia untuk terus mengukur prestasi dalam bidang-bidang pembangunan dan prestasi di bidang keolahragaan.

Warna Putih mempunyai arti niat suci tulus ikhlas sebagai landasan pijak dalam semua gerak langkah Kemenpora untuk berkarya nyata dalam mengemba amanah Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang Besar, Bermartabat, Berbudaya dan Disegani di Dunia

Kemenpora mempunyai tanggung jawab besar dalam membina kepeloporan pemuda sesuai dengan arah tujuan pembangunan kepemudaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemenpora 2010 – 2014, yakni: “Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, *pertama* menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan *kedua* meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 adalah *“terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan nasional yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka memajukan bangsa yang berkarakter dan berdaya saing”*.

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2010-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatnya peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - c. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda; serta
 - e. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan.
2. Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kependuan.
3. Meningkatnya pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda, yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq;
 - b. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.
4. Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
5. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:
 - a. Tercapainya posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011;
 - b. Meningkatnya perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; serta
 - c. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan.
6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam rangka peningkatan tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya perencanaan dan evaluasi secara akurat dan tepat waktu;

- b. Terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; serta
 - d. Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
7. Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ditandai dengan terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

Sedangkan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga R.I. sesuai dengan Peraturan Menteri nomor: Per. 0013/Menpora/II/2007 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pemuda dan olahraga;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- c. operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4.1.1 Deputi II Bidang Kepemimpinan Pemuda

Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Deputi II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Susunan Organisasi

Deputi II terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II;
- b. Asisten Deputi Pengembangan Fasilitator Kepemimpinan Pemuda, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II;
- c. Asisten Deputi Pendidikan Kepemudaan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II;
- d. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II;
- e. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Kepemimpinan Pemuda, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II.

Asisten Deputi

Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda

Asisten Deputi I/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi I/II menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda;
2. pengembangan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda;
3. monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda.

Asisten Deputi I/II terdiri dari:

A. **Bidang Pengkajian** mempunyai tugas melaksanakan pengkajian sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan formal;
2. pengkajian sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan non formal.

Bidang Pengkajian terdiri dari:

- a. **Subbidang Kepemimpinan Formal**, mempunyai tugas melakukan pengkajian sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan formal.

b. **Subbidang Kepemimpinan Non Formal**, mempunyai tugas melakukan pengkajian sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan non formal.

B. **Bidang Pengembangan** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengembangan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan formal;
2. pengembangan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan non formal.

Bidang Pengembangan terdiri dari:

- a. **Subbidang Kepemimpinan Formal**, mempunyai tugas melakukan pengembangan sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan formal.
- b. **Subbidang Kepemimpinan Non Formal**, mempunyai tugas melakukan pengembangan sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepemimpinan non formal.

C. **Bidang Monitoring dan Evaluasi** mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. monitoring sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan analisis di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda;
2. evaluasi sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda.

Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:

- a. **Subbidang Monitoring**, mempunyai tugas melakukan monitoring sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan analisis di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda.
- b. **Subbidang Evaluasi**, mempunyai tugas melakukan evaluasi sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan laporan di bidang kaderisasi kepemimpinan pemuda.

Asisten Deputi

Pengembangan Fasilitator Kepemimpinan Pemuda

Asisten Deputi 2/II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan fasilitator kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang peningkatan mutu;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator.

Asisten Deputi 2/II terdiri dari:

A. **Bidang Rekrutmen Fasilitator**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rekrutmen Fasilitator menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan persiapan rekrutmen dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator;
2. penyiapan bahan pelaksanaan rekrutmen dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator.

Bidang Rekrutmen Fasilitator terdiri dari:

- a. **Subbidang Persiapan Rekrutmen**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan persiapan rekrutmen dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator.
- b. **Subbidang Pelaksanaan Rekrutmen**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rekrutmen dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rekrutmen fasilitator.

B. **Bidang Peningkatan Mutu** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peningkatan Mutu menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan program sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan analisis di bidang peningkatan mutu;

2. evaluasi sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan laporan di bidang peningkatan mutu.

Bidang Peningkatan Mutu terdiri dari:

- a. **Subbidang Program Peningkatan Mutu**, mempunyai tugas melakukan penyiapan program sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan analisis di bidang peningkatan mutu.
- b. **Subbidang Evaluasi Peningkatan Mutu**, mempunyai tugas melakukan evaluasi sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan laporan di bidang peningkatan mutu.

C. Bidang Sertifikasi Fasilitator mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sertifikasi Fasilitator menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator;
2. evaluasi program sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator.

Bidang Sertifikasi Fasilitator terdiri dari:

- a. **Subbidang Kerjasama**, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator.
- b. **Subbidang Evaluasi Program**, mempunyai tugas melakukan evaluasi program sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi fasilitator.

Asisten Deputi

Pendidikan Kepemudaan

Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan kepemudaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah.

Asisten Deputi 3/II terdiri dari:

A. Bidang Kesiswaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan program pendidikan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan;
2. monitoring sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan.

Bidang Kesiswaan terdiri dari:

- a. **Subbidang Program Pendidikan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan program pendidikan sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan.

b. **Subbidang Monitoring**, mempunyai tugas melakukan monitoring sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesiswaan.

B. Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan;
2. pemantauan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan.

Bidang Kemahasiswaan terdiri dari:

- a. **Subbidang Penyusunan Kebijakan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan.
- b. **Subbidang Pemantauan**, mempunyai tugas melakukan pemantauan sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemahasiswaan.

C. Bidang Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Luar Sekolah menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah;

2. evaluasi program sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah.

Bidang Luar Sekolah terdiri dari:

- a. **Subbidang Kerjasama**, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah.
- b. **Subbidang Evaluasi Program**, mempunyai tugas melakukan evaluasi program sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang luar sekolah.

Asisten Deputi

Kepeloporan Pemuda

Asisten Deputi 4/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepeloporan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perintisan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan

Asisten Deputi 4/II terdiri dari:

- A. **Bidang Perintisan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perintisan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perintisan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perintisan program dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang perintisan;
2. evaluasi program sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang perintisan.

Bidang Perintisan terdiri dari:

- a. **Subbidang Perintisan Program**, mempunyai tugas melakukan penyiapan perintisan program sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang perintisan.
- b. **Subbidang Evaluasi Program**, mempunyai tugas melakukan evaluasi program sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan di bidang perintisan.

B. Bidang Keterampilan dan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keterampilan dan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan identifikasi dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian;
2. penyiapan promosi dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian.

Bidang Keterampilan dan Keahlian terdiri dari:

- a. **Subbidang Identifikasi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan identifikasi sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian.

b. **Subbidang Promosi**, mempunyai tugas melakukan penyiapan promosi sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian.

C. **Bidang Pembimbingan dan Pendampingan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembimbingan dan Pendampingan menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian motivasi sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan;
2. pemantauan sebagai bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan.

Bidang Pembimbingan dan Pendampingan terdiri dari:

- a. **Subbidang Motivasi**, mempunyai tugas melakukan pemberian motivasi sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan.
- b. **Subbidang Pemantauan**, mempunyai tugas melakukan pemantauan sebagai bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan.

Asisten Deputi

Prasarana dan Sarana Kepemimpinan Pemuda

Asisten Deputi 5/II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana kepemimpinan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi 5/II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana pemberdayaan kepemimpinan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana pengembangan kepemimpinan;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian mutu kepemimpinan.

Asisten Deputi S/II terdiri dari:

A. Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemimpinan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana pemberdayaan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya 213, Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana pemberdayaan kepemimpinan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sarana pemberdayaan kepemimpinan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pemberdayaan kepemimpinan terdiri dari:

- a. **Subbidang Prasarana Pemberdayaan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana pemberdayaan kepemimpinan.
- b. **Subbidang Sarana Pemberdayaan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan

penyusunan laporan di bidang sarana pemberdayaan kepemimpinan.

B. Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemimpinan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana pengembangan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana pengembangan kepemimpinan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana pengembangan kepemimpinan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pengembangan Kepemimpinan terdiri dari:

- a. **Subbidang Prasarana Kepemimpinan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana pengembangan kepemimpinan.
- b. **Subbidang Sarana Kepemimpinan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana pengembangan kepemimpinan.

C. Bidang Pengendalian Mutu Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian mutu kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Mutu Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana pengendalian mutu kepemimpinan;

2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana pengendalian mutu kepemimpinan.

Bidang Pengendalian Mutu Kepemimpinan terdiri dari:

- a. **Subbidang Prasarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana pengendalian mutu kepemimpinan.
- b. **Subbidang Sarana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana pengendalian mutu kepemimpinan.

4.1.2 Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda beserta jajarannya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kepeloporan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perintisan;
2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keterampilan dan keahlian;
3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembimbingan dan pendampingan.

Adapun susunan tim kerja di Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda adalah sbb:

Tabel 4.3 Tim Kerja Asdep Kepeloporan Pemuda Kemenpora RI

Jabatan	Nama
Asdep Kepeloporan Pemuda	Dr. H. Amir Hamzah, SH., M.Hum.
Kabid. Keterampilan dan Keahlian	Bandingan Daulay, M.Pd.
Kabid. Perintisan	Dra. Anastasia, SHP.
Kabid. Pembimbingan dan Pendampingan	Drs. Syafriil

4. 2. Program-program Kepeloporan Pemuda

a. Pemilihan Pemuda Pelopor

A. Latar Belakang

Kepeloporan dalam perspektif kepemimpinan merefleksikan suatu kekuatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap terbentuknya kualitas, akuntabilitas masyarakat dan kepemimpinan itu sendiri. Hal tersebut, mengindikasikan terdapatnya kebutuhan campur tangan manajerial, pengakuan, penghargaan dan pemberdayaannya.

Pemberian anugerah penghargaan untuk mengabadikan figur pemuda-pemuda pelopora secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, dan Nasional dicetuskan pertama kali oleh Menteri Negera Pemuda dan Olahraga RI pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-57 pada tahun 1985.

Krisis multidimensi pada tahun 1998 belum hilang dampaknya hingga kini. Disana-sini muncul berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara serius dan terarah, antara lain: menurunnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan pemuda, memudarnya semangat patriotisme, konsistensi dan sportivitas kebangsaan, serta menipisnya rasa persaudaraan dan empati sosial, kecenderungan menguatnya feodalisme, dekadensi moral, primordialisme serta sentimen antar kelompok.

Maka diperlukan figur pemuda yang dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut yang berperan secara nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepeloporan yang muncul secara alami, berangkat dari kepedulian dan rasa cinta akan bangsa yang muncul dari potensi

asli daerah (lokal) akan diberikan penghargaan oleh pemerintah dalam momentum Pemilihan Pemuda Pelopor.

B. Visi dan Misi Pemilihan Pemuda Pelopor

Visi

Mewujudkan kepeloporan pemuda sebagai garda terdepan perubahan yang bermanfaat.

Misi

Meningkatkan daya guna Kepemudaan dalam Kepeloporan.

C. Tujuan

1. Mewujudkan tujuan pembangunan Nasional diperlukan pemuda yang gigih, inisiasif, loyal, agresif, cerdas, mandiri dan berakhlak mulia.
2. Memberikan pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah terhadap Pemuda Indonesia atas prestasi dan Kontribusi kepeloporan yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, senibudaya dan pariwisata serta kebaharian dan kelautan sebagai inspirasi dan motivasi bagi pemuda lainnya.

D. Target

Terpilihnya 15 orang (maksimal) Pemuda Pelopor tingkat Nasional, masing-masing tiga orang dari terbaik dari tiap bidang.

E. Kriteria Pemuda Pelopor

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki loyalitas terhadap NKRI, serta tidak cacat hukum;
3. Memiliki idealisme, kejujuran, integritas kepribadian, bijaksana, berbudi pekerti dan bermartabat;

4. Memiliki suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih, yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena mampu memberikan nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat.
5. Mendapatkan pegakuan dari pemerintah atas peranan dan kontribusi nyata di bidang yang dipeloporinya.

F. Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia, berusia antar 16 sampai dengan 30 tahun (sebelumnya 35 tahun) dengan melampirkan foto copy akte kelahiran;
2. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/ BUMD), dan tidak sedang mendapatkan beasiswa atau penugasan penelitian dan instansi/ lembaga;
3. Kepeloporan yang dicapai telah diimplementasikan paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. Belum pernah melakukan perbuatan tercela, atau merugikan masyarakat dan/ atau lingkungan (ditandai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat);
5. Sehat yang ditandai dengan Surat Keterangan Dokter;
6. Belum pernah memperoleh terbaik satu, dua atau tiga dalam pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional tahun-tahun sebelumnya.

G. Bidang Kepeloporan

1. Kewirausahaan

Kepeleporan di bidang kewirausahaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi produk yang bertumpu/ berbasis pada sumber daya local sehingga memiliki nilai tambah, seperti sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bernilai ekonomi, serta telah dimanfaatkan dan berhasil meningkatkan perekonomian, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan

Kepeloporan di bidang pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi teknologi pendidikan, metode pembelajaran, dan atau pengembangan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, baik formal, non formal, maupun informal, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan.

3. Teknologi Tepat Guna

Kepeloporan di bidang teknologi tepatguna adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan rekayasa/ rancang bangun teknologi sederhana yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan atau mempermudah kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Senibudaya dan Pariwisata

Kepeloporan senibudaya adalah rangkaian kegiatan secara terpadu dalam mengembangkan/ menemukan/ menciptakan kreasi dan atau pelestarian senibudaya yang dapat menggugah apresiasi senibudaya di masyarakat dan mengangkat citra seni budaya bangsa Indonesia serta bermanfaat dalam promosi pariwisata Indonesia.

5. Kebaharian dan Kelautan

Kepeloporan Kebaharian dan kelautan adalah prakarsa dan perintisan pemuda dalam memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya laut, biota laut, pantai dan atau terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

H. Sistem Pemilihan

Pemilihan Pemuda Pelopor menganut sistem terbuka, artinya pemuda pelopor dapat dicalonkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, ormas, lembaga swadaya masyarakat,

lembaga pemerintah, pers, dan lain-lain. Seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi sampai tingkat nasional.

I. Mekanisme Pemilihan

1. Pemilihan Pemuda Pelopor diumumkan terbuka melalui jalur media massa yaitu: media elektronik dan cetak, organisasi pemuda, ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan instansi pemerintah.
2. Pemuda Pelopor dicalonkan oleh masyarakat luas, organisasi pemuda, LSM, pers dan instansi pemerintah melalui Camat setempat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/ Kota.
3. Pada tingkat pertama, informasi pencalonan pemuda pelopor meliputi identitas diri calon dan uraian singkat tentang nilai kelayakan kepeloporan pemuda yang telah disusun dalam formulir isian yang diketahui oleh Lurah/ Camat.
4. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/ Kota melakukan seleksi verifikasi terhadap kebenaran data calon, melalui seleksi administratif dan pengamatan langsung di lapangan (fact finding).
5. Dewan Juri tingkat Kabupaten/ Kota menilai calon pemuda pelopor yang lolos seleksi administratif dan hasil pengamatan di lapangan (fact finding) yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kabupaten/ Kota. Kemudian ditetapkan tiga orang dari masing-masing bidang untuk diusulkan kepada Bupati/ Walikota sebagai Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/ Kota.
6. Bupati/ walikota menetapkan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/ Kota untuk setiap bidang masing-masing sebanyak tiga orang, dan Bupati/ Walikota mengusulkan kepada Gubernur satu orang terbaik dari masing-masing bidang untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi.

7. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melakukan seleksi verifikasi terhadap kebenaran data calon, melalui seleksi administratif dan pengamatan langsung di lapangan (*fact finding*).
8. Dewan Juri Tingkat Provinsi menilai calon pemuda pelopor yang lolos seleksi administratif dan hasil pengamatan di lapangan (*fact finding*) yang dilakukan oleh panitia pemilihan Provinsi. Kemudian ditetapkan tiga orang dari masing-masing bidang untuk diusulkan kepada Gubernur sebagai pemuda pelopor tingkat Provinsi.
9. Gubernur menetapkan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dari masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, dan Gubernur mengusulkan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI melalui Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional dari masing-masing bidang sebanyak 1 (satu) orang terbaik untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat Nasional.
10. Panitia Nasional mengadakan seleksi administrasi terhadap calon pemuda pelopor yang diusulkan Provinsi. Hasil seleksi administrasi ditindaklanjuti dengan verifikasi ke lapangan (*fact finding*) oleh Panitia Nasional.
11. Panitia Nasional menyampaikan calon pemuda pelopor yang dapat mengikuti seleksi Tingkat Nasional oleh Dewan Juri Tingkat Nasional.
12. Dewan Juri tingkat Nasional melakukan seleksi akhir untuk memilih Pemuda Pelopor tingkat Nasional dan menyampaikan kepada Panitia Nasional untuk dibahas dan diputuskan bersama dengan komposisi setiap bidang yang memenuhi persyaratan sebagai Pemuda Pelopor pencipta, pengembang dan pelestari tingkat Nasional.
13. Panitia Nasional bersama Dewan Juri menyampaikan usulan penetapan Pemuda Pelopor tingkat Nasional tahun 2010 kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI.

J. Tahap Seleksi Pemuda pelopor

a. Tingkat Kabupaten/ Kota dengan kelengkapannya:

1. Surat pengantar dari pemerintah kab./ kota.
2. Profil masing-masing calon Pemuda Pelopor.
3. Deskripsi kepeloporan dan lampiran-lampirannya.
 - piagam/ penghargaan
 - foto pribadi dan dokumentasi kepeloporan.
 - data pendukung lainnya.
4. Surat Keputusan Bupati/ Walikota
5. Tabel rekapitulasi hasil penilaian
6. Berita acara penilaian dan lembar penilaian.

b. Tingkat Provinsi dengan kelengkapannya:

1. Surat pengantar dari pemerintah provinsi
2. Profil masing-masing calon Pemuda Pelopor
3. Deskripsi kepeloporan dan lampiran-lampirannya
 - piagam/ penghargaan
 - foto pribadi dan dokumentasi kepeloporan.
 - data pendukung lainnya.
4. Surat Keputusan Gubernur
5. Tabel rekapitulasi hasil penilaian
6. Berita acara penilaian dan lembar penilaian.

K. Penjurian

1. Penjurian tingkat nasional oleh Dewan Juri yang terdiri dari Tim Independen yang memiliki kompetensi terhadap bidang-bidang yang diseleksi, antara lain:
 - a. tim inti kepeloporan
 - b. pakar dan praktisi setiap unit/ bidang kepeloporan.
 - c. alumni Pemuda Pelopor/ Penggerak Kepeloporan Pemuda.Susunan Dewan Juri tingkat Nasional ditetapkan oleh Keputusan Menpora, Dewan Juri tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur,

dan Dewan Juri tingkat Kab./ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

2. Keputusan Dewan Juri Tingkat Nasional

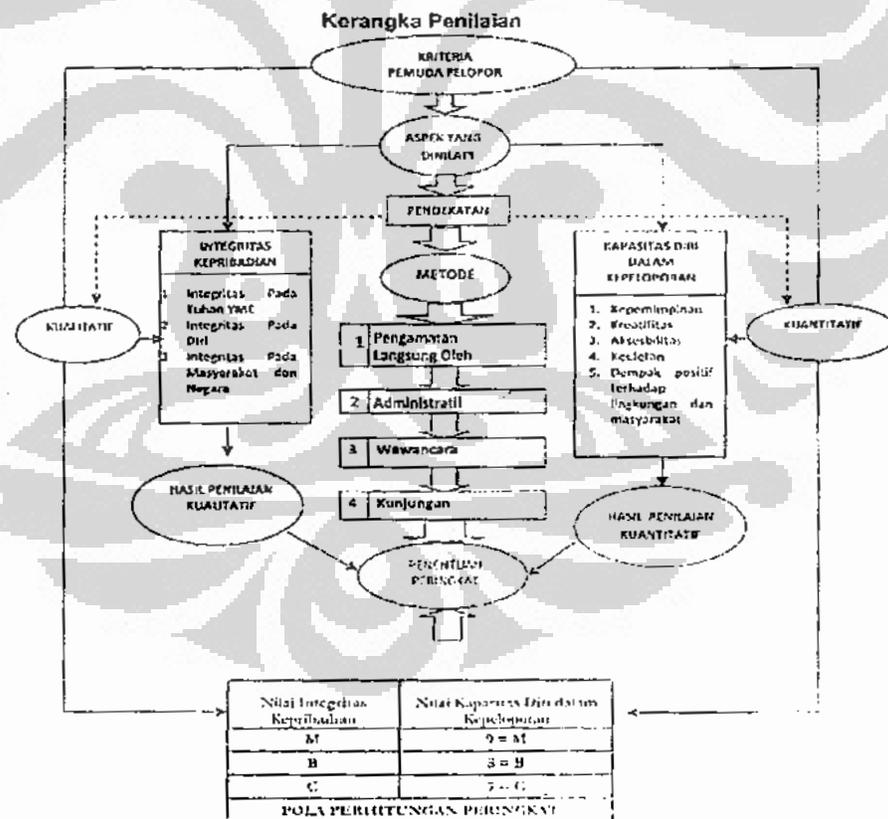
Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

3. Untuk Dewan Juri tingkat provinsi dan Kab./ Kota, proses dan penetapan keputusan mengacu pada format tingkat nasional.

L. Penilaian Pemuda Pelopor

Penilaian Pemuda pelopor dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep dasar tentang kepeloporan pemuda yang dirumuskan dalam definisi, kriteria dan persyaratan dapat digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor



b. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3)

A. Latar Belakang

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) adalah sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang dikontrak untuk memfasilitasi dan menggerakkan pembangunan di wilayah Perdesaan. Selain aspek teknis yang harus dimiliki oleh peserta SP-3, mereka juga diberikan pembekalan untuk dapat memanfaatkan sumber daya setempat secara optimal, sehingga dapat membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan baik untuk dirinya sendiri (kewirausahaan), maupun untuk orang lain. Kriteria untuk menjadi SP3 antara lain; mempunyai sikap kemandirian dan jiwa patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosan-terobosan di Perdesaan dengan meningkatkan profesionalisme dalam mentransfer ilmu dan teknologi di Perdesaan, terutama dalam menyukseskan program gerakan ekonomi kerakyatan. Sejak angkatan I tahun 1989 sampai dengan angkatan ke XII jumlah sarjana yang telah mengikuti program SP3 mencapai 11.735 orang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah SP3 yang mengikuti program sampai dengan bulan Juli 2004 sebanyak 467 orang. Sedangkan program SP3 yang sedang berjalan adalah angkatan XIV berjumlah 490 orang, angkatan XV berjumlah 514 orang dan angkatan XVI berjumlah 500 orang.

Pembangunan merupakan konsekuensi logis dari realita, dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di Perdesaan. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di Perdesaan, untuk mengatasi masalah pembangunan di daerah Perdesaan maka pemerintah membuat program-program yang bermanfaat bagi perkembangan desa dan masyarakat desa, salah satunya adalah program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3). Program SP-3 bertujuan antara lain untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan desa di berbagai sektor, terutama sektor

ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal. Tujuan ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan kecakapan hidup (life skill) kewirausahaan bagi pemuda desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) dan bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap program dari SP-3 di desa mereka. Penelitian ini dilakukan di desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-biru kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data-data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui teknik analisis data. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan setelah dianalisis dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan cukup positif ini dapat dilihat dari keoptimisan dari masyarakat akan keberhasilan dari program ini dan partisipasi masyarakat desa terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) cukup baik dimana sebagian masyarakat terlibat langsung dalam program yang dibuat oleh pihak dari SP-3.

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang demi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan. Kepeloporan dalam jiwa pemuda menjadi salah satu keberhasilan pembangunan, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepeloporan pemuda, pemerintah (Kemenpora) telah mengerahkan tenaga terdidik di Perdesaan melalui program SP-3. Program SP-3 telah berlangsung sejak tahun 1989, dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan

pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan yang dapat mempengaruhi dinamisasi kehidupan pemuda desa, mengembangkan potensi sumber daya kepemudaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda desa.

Program SP-3 ini juga dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan kepeloporan dan kemandirian para peserta program. Melalui program ini diharapkan dapat memperteguh komitmen para sarjana untuk dapat membangun kepemudaan desa dan menjadikan desa sebagai pusat untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting untuk mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan.

Menurut data BPS, pada Februari 2008 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 9,42 juta orang atau sekitar 8,48% dari total angkatan kerja yang berjumlah 111,4 juta orang. Sekitar 78,38% dari penganggur tersebut adalah pemuda usia produktif (15 – 30 tahun). Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebanyak 9,63% berpendidikan setingkat sarjana/ diploma, sedangkan bila dilihat dari penyebaran pengangguran ini sebanyak 5,24 juta orang (52,3%) berada di perkotaan dan sisanya (47,7%) berada di Perdesaan. Sedangkan menurut data BPS pada bulan Desember 2009 terdapat pengangguran terdidik sebanyak 1.013.020 orang yang terdiri dari 486.399 orang lulusan D3 dan 626.621 orang lulusan D1.

Berdasarkan data tersebut, keberadaan program SP-3 diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran terdidik di perkotaan dan meningkatkan kualitas pemuda di Perdesaan, sehingga dapat menurunkan arus urbanisasi dan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam mengembangkan potensi pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri serta berbagai potensi SDA yang tersedia di Perdesaan, pengembangan usaha mikro serta pengembangan usaha yang berbasis teknologi dan informasi tepat guna dan padat karya yang dibangun diatas pilar kearifan lokal dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda.

B. Urgensi

Keberadaan suatu program di tengah-tengah masyarakat seyogyanya dilandaskan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Se jauh mana program tersebut relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat menunjukkan seberapa penting (urgensi) keberadaan program tersebut.

Urgensi Program SP-3 di tengah-tengah masyarakat Indonesia, setidaknya terkait dengan dua permasalahan, yaitu: (1) Pembangunan Perdesaan dan persoalan kemiskinan, (2) Pemuda berpendidikan dan kemandirian.

1. Pembangunan Perdesaan

Pertumbuhan pembangunan di wilayah Perdesaan sejauh ini tampak lambat dan bersifat alami. investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek-proyek baik pemerintah maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Karenanya tingkat kemiskinan di wilayah Perdesaan relatif masih tinggi. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa 64% dari total penduduk miskin di Indonesia tinggal dan menyebar di wilayah Perdesaan. Di samping rendahnya inovasi atau bahkan ketidaksesuaian jenis proyek dengan kebutuhan masyarakat, juga disebabkan faktor terbatasnya sumberdaya manusia terdidik yang mendedikasikan diri pada desa.

Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22/1998 tentang Otonomi Daerah akan diukur sejauhmana perubahan kondisi dan posisi masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan politik menjadi lebih baik dibandingkan era pembangunan yang sentralistis. Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan pembangunan menghendaki distribusi kekuasaan dan wewenang dari pemerintah ke masyarakat. Dengan demikian, ke depan peranan dan keberadaan wilayah Perdesaan sebagai fondasi dalam meningkatkan efektivitas

pembangunan daerah memiliki arti sangat strategis, mengingat desa merupakan basis di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Termasuk pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kedudukan desa bukan sebagai objek melainkan subyek dalam konteks Otonomi Daerah, dimana desa harus mampu menjalankan peran dan fungsi manajemen dalam pengelolaan berbagai sumberdaya pembangunan. Optimalnya peran dan fungsi desa dapat memacu proses pembangunan daerah akan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana desa (masyarakat) mampu menggerakkan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdayanya bagi menentukan aktivitas pembangunannya sesuai dengan dinamika sosial-budaya-politik di tingkat masyarakatnya. Sehingga pembangunan Perdesaan mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat luas karena memiliki dimensi keadilan dan pertumbuhan yang menjamin keselamatan rakyat.

Yang menjadi persoalan adalah kedudukan desa selama ini hanyalah sebagai obyek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing-masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu sebagai kantor pemerintahan desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan tugas administrasi. Relatif sedikit melihat atau menempatkan desa sebagai miniatur negara, dimana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simplifikasi kedudukan desa tersebut merupakan faktor dari terbatasnya perhatian dan alokasi sumberdaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Kendati secara kuantitatif, cukup banyak aktivitas proyek pembangunan, namun kurang menjawab persoalan kemiskinan dan pengembangan aset masyarakat. Bahkan sebaliknya sumberdaya desa telah dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar. Misalnya, dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan.

Implikasinya, desa nyaris tidak ada atau kurang memiliki asset (sumberdaya alam, kelembagaan, zona ekonomi dan sumberdaya manusia) yang memungkinkan untuk memulai dan mengembangkan kreasi dalam menjawab berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam mengurangi tekanan kemiskinan dan ketidakadilan diantara warga maupun antar wilayah. Salah satu masalah utama yang nampak adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas baik sebagai perencana maupun sebagai penggerak ataupun pelaksana untuk memacu perubahan sosial-ekonomi-politik di tingkat Perdesaan. Walaupun selama ini telah ada personil terdidik yang mendampingi masyarakat, seperti, petugas penyuluh lapangan (PPL) baik dari dinas/instansi pemerintah ataupun LSM, namun keberadaannya seringkali tidak terkait atau bersinergi dengan institusi desa dalam konteks perubahan struktural atas masalah kesenjangan dan ketiadilan antara desa dan kota.

Pendekatan yang fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi masyarakat desa, kelak dapat mewujudkan produktivitas, peningkatan kondisi sosial-ekonomi yang berkelanjutan karena tidak rentan terhadap perubahan kebijakan makro ekonomi. Bahkan mampu menciptakan sinergi dan hubungan antara masyarakat dengan pihak luar dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa. Sehingga dalam Jangka panjang masalah yang sangat fundamental seperti, kemiskinan, ketimpangan dalam pemilikan sumberdaya, disfungsi/inalisasi kelembagaan desa dan hilangnya hak-hak masyarakat, secara bertahap dapat dikurangi. Gagasan pengembangan pemuda terdidik di Perdesaan merupakan salah satu strategi yang dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat potensi masyarakat desa dalam merespon tantangan efektivitas pembangunan di desa melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Pemuda Terdidik

Mencari pendekatan dan pola alternatif dalam pengembangan kepemudaan sesungguhnya tidak mudah. Rasanya masyarakat

dihadapkan pada pengalaman kurang optimalnya sejumlah program kepemudaan sebelumnya. Nama pemuda mandiri, pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan lainnya secara umum tetap memiliki keterbatasan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat program yang relatif sukses dan berhasil, namun secara kuantitatif masih terbatas. Hal ini tidak terlepas dari belum mampunya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan dan mengembangkan sumberdaya kaum muda yang cakap dan terampil selama program dilaksanakan.

Persoalan di atas memberi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan pemikiran ulang dalam menjadikan kaum muda terdidik sebagai aset pembangunan. Di pihak lain, *market feasibility* yang semakin besar karena perkembangan ekonomi, maka kaum muda hanya diingat sebagai obyek dalam pemenuhan tenaga kerja. Selain daya pemerintah dalam mengembangkan produktivitas kaum muda kurang terkoordinasi, perhatian sejumlah pihak (LSM dan swasta) terhadap potensi kaum muda juga relatif terbatas. Kalaupun terdapat program kepemudaan yang dilakukan pihak lain, maka biasanya timbul tenggelam dalam masa singkat, atau kurang menyentuh akar persoalan dan hanya menangkap eksekunya.

Karena itu mengembangkan pendekatan dan alternatif baru dalam program produktivitas kaum muda terutama di Perdesaan perlu melihat konteks sosial, ekonomi dan politik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal. Persoalan apa dari kaum muda yang akan diisi, pendekatan program apa yang mau ditawarkan serta dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan menjadi penting. Hal ini bukan semata untuk menjawab kekosongan, kemandegan ataupun keterbatasan dari program-program yang ada melainkan juga dimaksudkan untuk melengkapi terutama dari sisi pengorganisasian dan pemberdayaan bagi semuanya. Dengan kata lain, maka yang dimaksudkan di sini adalah memperkuat program kepemudaan terdidik yang mampu mensinergikan berbagai sumberdaya yang ada dalam menggerakkan pembangunan Perdesaan.

Program SP-3 yang telah berjalan hampir 21 tahun memerlukan revitalisasi sehingga mampu mendayagunakan sumber daya pemuda untuk tujuan menggerakkan pembangunan di Perdesaan.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi program unggulan yang mampu menghasilkan pemuda penggerak pembangunan di Perdesaan.

2. Misi

- a. Merekrut pemuda terdidik dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya agar mampu menggerakkan pembangunan di Perdesaan.
- b. Memberikan kontribusi dalam pembangunan di Perdesaan dalam rangka meningkatkan produktivitas (terutama komunitas muda) di Perdesaan.
- c. Menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di perdesaan.
- d. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan
- e. Mewujudkan kerjasama dan jaringan antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan di Perdesaan.

D. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan pemuda di Perdesaan.
2. Mengembangkan kapasitas pemuda berpendidikan tinggi yang memiliki karakter kepemimpinan untuk menggerakkan berbagai potensi masyarakat di Perdesaan
3. Meningkatkan sikap dan keterampilan pemuda dalam memfasilitasi, menginisiasi dan mengorganisasi masyarakat

(khususnya pemuda) dalam menggerakkan berbagai sektor pembangunan di Perdesaan,

4. Meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan implementasi program-program pembangunan di Perdesaan,
5. Mengembangkan kerjasama dan jaringan antara pemuda dan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kesejahteraan Perdesaan

E. Sasaran dan Target

1. Sasaran

- a. Tersedianya pemuda berpendidikan tinggi yang menjadi penggerak pembangunan di Perdesaan,
- b. Terwujudnya kerjasama dan jaringan antara pemuda dengan pihak lain dalam mendukung pembangunan di Perdesaan.
- c. Terselenggaranya kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Perdesaan.

2. Target

- a. 520 orang SP-3 Angkatan XVIII yang bertugas pada 520 desa, yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan telah bertugas sejak bulan Juli tahun 2007.
- b. 301 orang SP-3 Angkatan XIX yang telah direkrut dan ditempatkan mulai Bulan Juli 2008 bertugas pada 301 desa, yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.
- c. 555 orang SP-3 Angkatan XX yang telah ditempatkan mulai Bulan Juli 2009 yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.
- d. 960 orang SP-3 Angkatan XXI pada tahun 2010 yang akan ditempatkan di 480 desa pada 99 kabupaten/ kota.
- e. Di samping target a,b, c, dan d sebagaimana tersebut di atas, program SP-3 dapat juga didayagunakan untuk mendukung

program-program pemerintah/ pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan.

F. Peserta Program

Kriteria calon peserta adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan S-1;
2. Usia maksimal 27 tahun;
3. Memiliki pengalaman berorganisasi ekstra kurikuler/ kemasyarakatan minimal 2 tahun;
4. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan;
5. Belum menikah;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berkelakuan baik;
8. Bebas narkoba;
9. Tidak terikat kontrak kerja pada lembaga/ instansi manapun;
10. Bersedia tidak menjadi PNS selama masa kontrak;
11. Bersedia menandatangani kontrak kerja;
12. Bersedia ditempatkan di wilayah propinsi asal calon peserta SP3 atau di wilayah propinsi terdekat;
13. Lulus seleksi penerimaan SP-3.

G. Hak dan Kewajiban Peserta Program

1. Hak
 - a. Mendapatkan biaya hidup, transport lokal, kesehatan bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan ketentuan penganggaran pemerintah;
 - b. Mendapatkan bantuan awal tahun bagi peserta SP-3 Angkatan (IX, X, XXI);
 - c. Mengikuti kegiatan pemilihan SP-3 berprestasi;
 - d. Mendapatkan biaya dokumentasi sesuai dengan ketentuan program SP-3 yang berlaku;

- e. Memberikan informasi kepada pihak luar tentang SP-3;
- f. Mendapatkan cuti maksimal 12 (dua belas) hari dalam satu tahun;
- g. Libur pada hari libur resmi nasional dan lokal;
- h. Mendapatkan pengayoman hukum dalam rangka pelaksanaan tugas.

2. Kewajiban

- a. Mengikuti pembekalan dan pelatihan program SP-3;
- b. Melaksanakan program SP-3 sebagai penggerak, pendampingan dan program kemandirian di wilayah lokasi penempatan;
- c. Menaati kontrak kerja yang telah disepakati;
- d. Melaksanakan kegiatan pemetaan potensi sumberdaya masyarakat, terutama pemuda di Perdesaan;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengorganisasian terhadap potensi sumber daya masyarakat terutama pemuda di perdesaan untuk kegiatan usaha produktif;
- f. Mengikuti pertemuan konsultasi secara reguler (setiap bulan) yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Program SP-3 di tingkat propinsi;
- g. Memberikan laporan secara periodik setiap bulan sekali sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan;
- h. Memberikan informasi yang akurat apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- i. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah dalam rangka membangun program di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda.

H. Lokasi Penempatan

Lokasi penempatan SP-3 adalah desa dan/atau antar desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi dan akses pertumbuhan.
- b. Memiliki potensi untuk bekerjasama dengan pihak lain.
- c. Adanya kebutuhan pengembangan desa oleh pemerintah daerah.
- d. Terintegrasi dengan program pemerintah/ pemerintah daerah.

Penetapan lokasi SP-3 dapat ditempatkan pada tiga kabupaten/kota, yaitu masing-masing kabupaten/ kota ditempatkan 5 kelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang.

Dalam hal program SP-3 ini didayagunakan untuk mendukung program-program pemerintah/ pemerintah daerah maka, persyaratan tentang jumlah keanggotaan, kelompok, dan persebarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

I. Bentuk Penugasan dan Kegiatan

Bentuk penugasan SP3 bersifat perorangan, namun mereka akan bekerja secara tim atau kelompok dalam lingkup desa, antar desa dan kabupaten/kota. Di dalam penugasan tersebut peserta Program SP-3 akan melakukan 3 (tiga) tugas utama, yaitu: (a) menggerakkan; (b) mendampingi dan melakukan *capacity building*, serta (c) penciptaan kemandirian. Secara rinci, tugas-tugas tersebut meliputi:

1. Bidang Penggerakan:

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan program dan usaha, mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga yang menjadi tempat tugas, alternatif-alternatif usaha yang potensial, serta berbagai sumber daya lokal dan luar yang potensial.

- b. Melakukan perencanaan pembangunan desa/kelurahan secara partisipatif yang berbasis pada pemanfaatan sumber daerah.
- c. Memotivasi masyarakat desa/ kelurahan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daerah, baik dalam skala desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota dan provinsi.

2. Bidang Pendampingan:

- a. Melakukan penataan manajemen kegiatan dan usaha masyarakat, terutama pemuda seperti memberikan bantuan teknis manajemen.
- b. Mendorong dan membina pemupukan modal swadaya masyarakat desa/kelurahan, terutama pemuda.
- c. Melakukan fasilitasi dan mediasi masyarakat di perdesaan dengan pihak-pihak dan sumber pengembangan seperti pengurusan ijin usaha, fasilitas pasar dan permodalan, tempat usaha, pemasaran dan sebagainya.
- d. Menyebarluaskan (diseminasi) keunggulan manajemen dan produk lembaga yang didampingi bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Mendorong dan mengembangkan tumbuhnya unit usaha ekonomi produktif yang bersifat kolektif (koperasi atau perseroan terbatas) yang dibangun dari, oleh dan untuk pemuda.

3. Bidang Kemandirian:

- a. Bersama dan melibatkan masyarakat (khususnya pemuda) menyusun rencana usaha dengan komoditas yang potensial dan menjadi unggulan daerah,
- b. Merintis dan mengembangkan usaha mandiri bagi pemuda yang terintegrasi dan menjadi mata rantai dengan usaha-usaha yang dijalankan masyarakat.

J. Indikator Keberhasilan

1. Keberhasilan Jatidiri SP-3

- a. Kemampuan komunikasi dan berintegrasi dengan masyarakat dan stakeholder lainnya;
- b. Dapat menyusun rencana usaha ekonomi masyarakat (khususnya pemuda) di perdesaan;
- c. Mampu menggerakkan potensi lokal sebagai modal dalam merintis kegiatan produktif;
- d. Mampu melakukan konsultasi secara intensif baik kepada tim teknis maupun stakeholder lain dalam mendukung suksesnya program SP-3;
- e. Mampu mendokumentasikan dan melaporkan keadaan, perkembangan, hasil dan persoalan yang dihadapi di dalam tugasnya.

2. Hasil dan Capaian Program

Keberadaan SP3 dengan program-programnya di desa diharapkan mendapat sambutan positif dari masyarakat serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilannya diukur dengan:

- a. Keberadaan SP-3 dikenal oleh masyarakat dan stakeholder lain secara luas, bukan hanya di kalangan tokoh dan pejabat desa/kecamatan.
- b. Terbentuknya minimal 1 (satu) kelembagaan komunitas yang fungsional dalam mendukung usaha ekonomi masyarakat/pemuda)
- c. Minimal 30% penerima manfaat dan sasaran program di desa merupakan masyarakat (pemuda) berasal dari keluarga miskin.
- d. Penerimaan dan respon masyarakat luas (khususnya pemuda) yang ditandai dengan adanya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam bentuk (a) keterlibatan di dalam

kegiatan/ usaha produktif di desa, (b) memberikan modal swadaya/kontribusi minimal 20% dari nilai program.

- e. Tumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi produktif oleh masyarakat dan pemuda, baik kelompok (minimal 2 kelompok) maupun perorangan (minimal 10 orang) dalam jangka waktu 1 tahun dan dalam masa kontrak selama 3 tahun minimal 6 kelompok dan 30 orang.
- f. Adanya dukungan dan keterlibatan minimal 2 (dua) instansi terkait terhadap pelaksanaan program SP-3.

3. Kelembagaan

Kelembagaan pemuda mandiri dianggap baik apabila:

- a. Adanya rumusan rencana usaha mandiri untuk pemuda baik untuk usaha individu maupun kelompok.
- b. Sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) program usaha kemitraan dan kerjasama usaha, baik dalam bidang keuangan, produksi maupun pemasaran.
- c. Terjadi peningkatan penyerapan lapangan kerja.

4. Keberlanjutan

Program yang dirancang dan hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan bahkan dapat dikembangkan dikemudian hari. Indikatornya adalah:

- a. Tersedia kader (SDM lokal) yang dipersiapkannya untuk menjamin keberlanjutan program.
- b. Terdapat sistem manajemen yang dapat dijalankan oleh masyarakat meski tanpa keberadaan SP-3.
- c. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang dapat menjadi unsur pendorong dan penarik program-program dan usaha masyarakat (khususnya pemuda) di pedesaan

- d. Terbentuknya minimal 1 (satu) unit usaha ekonomi produktif yang dirintis oleh SP-3 dan masyarakat menjadi usaha mandiri dan berdaya saing.

K. Tata Kelola

1. Organisasi Pengelola Program

Program SP-3 merupakan program nasional yang dirancang dan dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui tugas dekonsentrasi yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa: *"Gubernur dalam menjalankan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah berkewajiban mengoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta kabupaten dan kota di wilayahnya sesuai bidang tugas yang berkaitan dengan wewenang yang dilimpahkan"*.

2. Pengelolaan di Tingkat Pusat

Program dan kegiatan SP-3 di Tingkat Pusat dikelola oleh deputi Menpora Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda melalui Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda yang bertugas merancang dan mengoordinasikan pelaksanaan program secara nasional

Di tingkat pusat, pengelola dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) pengembangan program yang diangkat oleh Menteri, yang berasal dari unsur-unsur kementerian/ lembaga terkait, para pakar, perguruan tinggi, LSM, dan kalangan pengusaha. Tugas Pokja adalah membantu perancangan konsep dan pengembangan kegiatan secara keseluruhan, termasuk membantu tim pengelola tingkat pusat.

3. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Provinsi

Pada 33 Provinsi dimana program SP-3 berlangsung, dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk Gubernur, antara lain: Dinas Pemuda dan Olahraga/ Dinas Pendidikan. Tugas Dekonsentrasi yang diserahkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur/ Pemerintah Provinsi dalam kaitannya dengan program SP-3 meliputi sepuluh kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu:

- 1) Sosialisasi Program ke Stakeholders Provinsi
- 2) Rekrutmen Peserta
- 3) Penetapan Desa Lokasi Program
- 4) Seleksi Bekerja sama dengan Pusat
- 5) Pembekalan Peserta
- 6) Penempatan Peserta
- 7) Pembayaran Biaya Hidup dan biaya-biaya lainnya
- 8) Pendampingan Teknis di Lapangan
- 9) Penetapan Tim Teknis SP-3
- 10) Monitoring dan Evaluasi

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengacu kepada pedoman yang telah disusun oleh Kementerian, yaitu:

- 1) Pedoman Umum
- 2) Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Rekrutmen
- 3) Petunjuk Teknis Pembekalan
- 4) Petunjuk Teknis Pendampingan dan Monev
- 5) Panduan Kerja Peserta SP-3 dan Tim Teknis SP-3

4. Koordinasi Pelaksanaan Program di Tingkat Kabupaten/ Kota

Kegiatan di tingkat kabupaten/ kota merupakan bagian dari koordinasi dan sinkronisasi program SP-3 dengan program lain yang berada di kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

5. Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dan Desa

Kegiatan di tingkat kecamatan dan desa merupakan bagian dari koordinasi dan sinkronisasi program SP-3 dengan program lain yang berada di kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

6. Tim Teknis

a. Lingkup Tugas

Tim teknis berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas membantu pengelola program dalam perencanaan, pengembangan program, implementasi dan pengendalian program. Tim teknis juga bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, bimbingan, pendampingan dan terhadap SP-3.

b. Organisasi

Tim Teknis dibentuk di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tim Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dispora/Dikpora Provinsi. Tim Teknis provinsi atau kabupaten/kota berjumlah 3 orang, yang berasal dari unsur perguruan tinggi, LSM dan unsur dikpora/dispora yang berkompeten tentang program SP-3.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis mengacu kepada Pedoman Umum, Petunjuk Teknis (Juknis) SP-3 dan Panduan Kerja Tim Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tahun anggaran berjalan. Tim Teknis provinsi atau kabupaten/kota bertanggungjawab kepada Kepala Dispora/Dikpora Provinsi setempat.

Dalam rangka menyarnakan persepsi tentang kebijakan program pada setiap tahun anggaran, maka anggota Tim Teknis provinsi atau kabupaten/kota diharapkan dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan

koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada setiap awal tahun anggaran. Khususnya bagi anggota Tim Teknis yang belum pernah mengikuti kegiatan tersebut.

c. Kriteria

1. Anggota Tim Teknis harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
2. Memiliki wawasan dan pengalaman dalam memberdayakan masyarakat perdesaan minimal 5 tahun yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dan dilengkapi dengan surat referensi dari pemberi pekerjaan;
3. Memiliki jiwa kepemimpinan dan berpengalaman dalam membina masyarakat/ pemuda;
4. Memiliki pengetahuan yang luas menyangkut monitoring, evaluasi, fasilitasi/ pendampingan program pemberdayaan masyarakat;
5. Mempunyai jaringan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, minimai tingkat kabupaten/kota;
6. Pendidikan minimal S1;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kepedulian;
9. Bersedia membuat pernyataan siap membantu dan mengembangkan program SP-3 di wilayah provinsi setempat;
10. Masa tugas Tim Teknis SP-3 tidak melebihi 5 (lima) tahun berturut-turut.

Kriteria di atas, dinyatakan dalam bentuk Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

d. Hak dan Kewajiban Tim Teknis

1. Hak

- a. Mendapatkan honor bulanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Mendapatkan honor lain yang sah sesuai dengan tugas yang diberikan;
- c. Menerima biaya ATK dan pelaporan;
- d. Memperoleh akses informasi pelaksanaan program SP-3.

2. Kewajiban

- a. Memenuhi semua tugas sebagaimana diuraikan dalam buku pedoman dan petunjuk teknis;
- b. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja dengan lembaga terkait dengan tujuan pengembangan program;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pihak pemberT tugas;
- d. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada peserta SP-3;
- e. Membuat program kerja d~lam pembimbingan/ pendampingan untuk keberhasilan SP-3.

L. Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan program SP-3 terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi terdiri dari dua tahap, Pertama, dilakukan oleh pelaksana program tingkat pusat dan Kedua dilakukan oleh pelaksana program tingkat provinsi. Tujuan dari sosialisasi di tingkat Pusat adalah agar program dikenal oleh khalayak, terutama oleh pihak-pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi pelaksanaan program di tingkat provinsi selain

ditujukan untuk masyarakat luas, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa yang berminat menjadi sasaran pelaksanaan program, agar terjadi pemahaman tentang maksud, tujuan, dan tatacara pelaksanaan program SP-3. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarkan surat edaran, poster, booklet (buku saku), leaflet, menyelenggarakan diskusi, dan pemasangan iklan/publikasi informasi di media cetak dan elektronik.

2. Penentuan lokasi penempatan SP-3

Penentuan lokasi penempatan SP-3 dilakukan oleh Pengelola Program di Tingkat Provinsi berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penjajakan kebutuhan (need assesment) untuk penentuan lokasi penempatan SP-3 sesuai kriteria yang ditetapkan,
- b. Penjajakan kebutuhan (need assesment) yang dilakukan minimal mencakup:
 1. Informasi tentang potensi desa;
 2. informasi tentang permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya;
 3. Statistik pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, keterampilan, pekerjaan, dll)
- c. Penentuan lokasi desa/kelurahan penempatan SP-3 dengan memperhatikan saran dan masukan dari instansi yang menangani urusan kepemudaan di Kabupaten/Kota dan kecamatan setempat.

3. Pemilihan Peserta

- a. Pengumuman/Publikasi

- 1) Pengumuman/publikasi penerimaan calon peserta Program SP-3 dilaksanakan oleh Pengelola Program di tingkat pusat dan provinsi;
- 2) Pengumuman/publikasi penerimaan dapat dilakukan melalui selebaran di tempat-tempat terbuka, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik;
- 3) Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah sarjana dan jenis kesarjanaan yang dibutuhkan, (2) tugas-tugas serta hak dan kewajiban peserta program, (3) lokasi tugas (desa/kelurahan), (4) tata cara, batas waktu, dan alamat pendaftaran, (5) syarat-syarat peserta SP-3.

b. Seleksi

- 1) Seleksi calon peserta dilakukan oleh tim seleksi/ panitia seleksi yang dibentuk oleh Pengelola Program di tingkat Pusat bekerjasama dengan pengelola Provinsi.
- 2) Seleksi dilaksanakan dua tahap, yaitu administratif dan substansi (tes tertulis dan wawancara);
- 3) Seleksi administratif meliputi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas administrasi:
 - Surat lamaran;
 - Daftar riwayat hidup;
 - Surat keterangan sehat;
 - Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - Surat pernyataan belum menikah bermaterai;
 - Surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah yang ditentukan;
 - Surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan pihak manapun;
 - Surat pernyataan bersedia tidak menjadi PNS selama masa kontrak;

- Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Pas photo 4x6 : 2 lembar;
- 4) Calon peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi substansi;
- 5) Seleksi substansi dilakukan dengan cara tes tertulis secara nasional, dan wawancara, yang meliputi aspek:
- Motivasi dan minat terhadap program;
 - Kepemimpinan dan kerjasama;
 - Kepeloporan dan Kesukarelawanan Potensi berwirausaha;
 - Kompetensi Pendampingan Pemuda Mandiri;
 - Hobi dan keterampilan khusus;

c. Penetapan Hasil Seleksi

- 1) Kelulusan final ditetapkan oleh Panitia Seleksi Tingkat Pusat;
- 2) Daftar peringkat kelulusan peserta ditetapkan berdasarkan peringkat I dan seterusnya sesuai jumlah peserta tes. Kelulusan peserta ditetapkan berdasarkan peringkat I sampai dengan peringkat tertentu sesuai kebutuhan. Peringkat I sampai dengan peringkat tertentu sesuai kebutuhan merupakan peringkat prioritas yang akan ditempatkan terlebih dahulu;
- 3) Apabila peringkat prioritas mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan penempatan, digantikan oleh peringkat berikutnya dengan batas waktu pemanggilan tertentu setelah disetujui oleh pengelola pusat;
- 4) Batas penggantian calon peserta yang dipanggil adalah satu minggu sebelum pelatihan pembekalan berlangsung.

4. Pelatihan/ Pembekalan

- 1) Pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Pelatihan ditekankan antara lain pada kemampuan teknis dasar-dasar manajemen strategi operasional program pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan dan kepeloporan, teknik memotivasi, dinamika kelompok, identifikasi masalah, pendampingan, kewirausahaan, membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama serta pengenalan struktur pemerintahan/ pembangunan daerah, program, potensi dan permasalahannya, mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten/ kota;
- 3) Pelatihan dilaksanakan oleh pengelola provinsi dengan melibatkan narasumber dari tim pusat yang berkompeten dan memahami program SP-3 dan individu dari lembaga yang berpengalaman dan terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan, serta kewirausahaan;
- 4) Pada akhir pelaksanaan pelatihan dilakukan evaluasi secara komprehensif;

5. Penempatan

- 1) Peserta program SP-3 ditempatkan pada desa/kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas provinsi yang menangani kepemudaan,
- 2) Penempatan di desa/kelurahan berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun program sampai dengan 30 Juni 3 tahun berikutnya.
- 3) Sebelum penempatan, pengelola program provinsi dan peserta SP-3 wajib menandatangani kontrak kerja. Masing-

masing pihak penandatanganan harus bermaterai Rp. 6.000 memiliki satu berkas kontrak asli, dan salinan kontrak kerja harus dikirim ke pengelola program pusat.

- 4) Bentuk kontrak kerja mengacu kepada format yang telah ditentukan.

M. Dukungan dan Pengendalian Program

Sistem pengendalian program yang digunakan bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh unsur terkait dalam pengelolaan program. Pengendalian program diwujudkan dalam bentuk kegiatan monitoring, koordinasi, supervisi dan pelaporan. Sedangkan untuk program pendukung diwujudkan dalam bentuk kegiatan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Kegiatan pengendalian program dimaksudkan agar pelaksanaan program SP-3 berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program SP-3. Sementara untuk dukungan dimaksudkan agar kegiatan program SP-3 berjalan dengan baik dan lancar untuk mencapai sasaran program SP-3.

N. Penilaian

- a. Penilaian kinerja peserta program SP-3 dilakukan secara insidental dan berkala oleh Tim Pengelola Pusat dan Tim Teknis Provinsi secara terpadu dengan proses pendampingan sesuai pedoman yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Substansi penilaian minimal meliputi: pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh peserta, partisipasi, tanggapan pemerintah, masyarakat desa, faktor pendukung, dan penghambat;
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai salah satu masukan dalam penentuan pemberian penghargaan nasional dan proses pelaksanaan program selanjutnya.

O. Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) diberikan kepada pengelola program daerah, tim teknis daerah, SP-3, maupun Desa/Kelurahan penempatan SP-3, mengacu pada matriks sebagai berikut:

1. Pengelola Program

Tabel 4.4 Penghargaan dan Sanksi Pengelola Program SP-3

Aspek yang Dinilai	Penghargaan	Sanksi
1) Kepatuhan terhadap Pedoman Umum, Juknis dan Kebijakan Pusat;	1) Penambahan Kuota Sasaran SP-3 tahun berikutnya;	1) Mulai dari pengurangan kuota sasaran SP-3 hingga penghapusan alokasi peserta baru pada tahun anggaran berikutnya;
2) Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan;	2) Dipertimbangkan sebagai salah satu konsiderans untuk mendapatkan penghargaan kepemudaan;	2) Merekomendasikan kepada Gubernur untuk mempertimbangkan tugas pada tahun berikutnya.
3) Data dan Pelaporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu;	3) Diprioritaskan untuk mendapatkan program-program kepemudaan lainnya yang diselenggarakan oleh Kemenpora.	
4) Aktivitas koordinasi dengan pengelola program pusat;		
5) Program/ Anggaran APBD yang mendukung kegiatan SP-3		

2. Tim Teknis

Tabel 4.5 Penghargaan dan Sanksi Tim Teknis

Aspek yang Dinilai	Penghargaan	Sanksi
1) Kepatuhan terhadap Pedum, Juknis, Kebijakan Pusat dan Provinsi;	1) Pengangkatan kembali sebagai Tim Teknis pada tahun anggaran berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku;	Penghentian sebagai anggota tim teknis.
2) Tingkat keaktifan dan koordinasi dalam menjalankan tugas;	2) Mendapat prioritas sebagai peserta program kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora;	
3) Kegiatan yang telah dilakukan dalam memberikan dukungan teknis dan pendampingan terhadap peserta program SP-3.	3) Mendapat penghargaan dari Kemenpora, berupa piagam/ sertifikat (khusus bagi daerah program SP-3 yang berhasil)	

3. SP-3

Tabel 4.6 Penghargaan dan Sanksi Peserta SP-3

Aspek yang Dinilai	Penghargaan	Sanksi
1) Kepatuhan terhadap kontrak kerja;	1) Dipertimbangkan sebagai kandidat SP-3 Berprestasi tingkat Nasional;	Pemberhentian sebagai peserta program.
2) Pengembangan diri (etos kerja), jejaring kerja sama, fungsi dan peran;	2) Mendapat prioritas sebagai peserta program kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora;	
3) Program dan hasil;	3) Mendapat penghargaan dari pemerintah;	
4) Jumlah dan kualitas Pemuda Mandiri yang dibina;	4) Diikutsertakan dalam program luar negeri, apabila memungkinkan.	
5) Potensi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah dijalankan.		

P. Pelaporan

1. Pelaporan disampaikan oleh setiap unsur (peserta program dan Tim Teknis) secara reguler dan bertingkat sesuai petunjuk teknis pendampingan;
2. Substansi pelaporan meliputi pelaksanaan tugas masing-masing dan hasilnya serta usulan-usulan penyempurnaan.

Q. Pengaduan

Pengaduan berkenaan dengan ketidakpuasan atas perilaku dan kinerja peserta SP-3, tim teknis SP-3 dan pengelola program provinsi dapat disampaikan oleh kalangan manapun kepada tim pengelola pusat dan/atau provinsi melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, seperti surat, telpon, fax, sms, dll. Tim pengelola program harus segera menindak lanjuti pengaduan yang diterimanya.

c. Pelatihan Kepeloporan Pemuda

A. Latar Belakang

Pembangunan bangsa Indonesia harus dilaksanakan di semua sektor. Termasuk membangun keterampilan para pemuda. Pemuda diharapkan dapat menjadi agen pembangunan, cadangan keras bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ini.

Selain itu, kekhasan Indonesia yang dalam bidang budaya, bahasa, dan letak geografis juga harus diperhatikan agar dapat diberdayakan oleh pemuda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda mencoba memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemuda dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pemuda pelopor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Beberapa pelatihan pemuda pelopor yang pernah dilaksanakan oleh Kemenpora antara lain: Pelatihan Pemuda Pelopor Siaga Bencana, Pelatihan Kepeloporan

Pemuda Daerah Tertinggal, Pelatihan Pemuda Pelopor Kewirausahaan, Pelatihan Pemuda Pelopor Seni Budaya, dsb.

B. Tujuan

1. Memberikan pembekalan dan motivasi kepada pemuda agar mampu menjadi garda terdepan dalam menangani masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
2. Memberikan pengetahuan kepada pemuda agar dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam bidang yang dimaksud.
3. Memberikan kontribusi kepada para pemuda agar dapat berperan secara optimal dalam bidangnya masing-masing.

C. Sasaran

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada pemuda agar lebih terampil, dan mampu berperan pada bidangnya masing-masing.
2. Peserta adalah individu, perwakilan dari daerah atau lembaga terkait yang dapat mempraktekkan ilmunya secara langsung di masyarakat.

D. Hasil/ Output

Terlatihnya pemuda sebanyak jumlah yang diinginkan.

E. Outcome

1. Meningkatnya aktivitas pemuda dalam bidangnya masing-masing.
2. Meningkatnya pemahaman keterampilan pemuda dalam bidangnya masing-masing.

F. Metode

Menggunakan metode andragogi yang terdiri dari; ceramah, tanya jawab; diskusi, praktik lapangan dan kunjungan lapangan.

G. Materi

Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap bidang pelatihan, namun secara umum materi pelatihan terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

H. Nara Sumber

Nara sumber adalah para ahli dan praktisi di bidangnya masing-masing yang terkait dengan bidang pelatihan.

4.3. Analisis Kepeloporan

Dalam rangka mengembangkan kepeloporan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI mendefinisikan makna kepeloporan sebagai akumulasi semangat, sikap dan kesukarelawanan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggungjawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dari definisi akan konsep kepeloporan versi Kemenpora tadi ada beberapa dimensi (indikator) yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kepeloporan, yakni:

1. Akumulasi semangat, sikap dan kesukarelawanan,
2. Dilandasi kesadaran diri atas tanggungjawab sosial,
3. Menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata,
4. Dilaksanakan secara konsisten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Selanjutnya akan dijelaskan terperinci mengenai praktik aplikasi kepeloporan pemuda di Kemenpora, yaitu sebagai berikut:

1. Akumulasi semangat, sikap dan kesukarelawanan,

Amir Hamzah selaku Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Kemenpora mengatakan bahwa kepeloporan adalah sama seperti yang tertuang dalam UU

No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, seperti pemaparan beliau di bawah ini:

"Kepeloporan sudah tertuang di UU Kepemudaan, sebentar.... saya lihat dulu. Ada di halaman 24 dan 25. Silakan dilihat dan dikaji lagi. Saya kasih aja bukunya UU kepemudaan ya" – Amir Hamzah-

Beliau juga mengatakan bahwa kepeloporan dimulai dari kerelaan berkorban dan keinginan memberi untuk lingkungan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sebagai berikut:

"Kepeloporan dimulai dari kerelaan berkorban dan memberi untuk lingkungan..." – Amir Hamzah –

Hal ini senada seperti yang dikatakan oleh Bandingan Daulay sebagai staf Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda bahwa kepeloporan ini memunculkan sesuatu yang tidak ada atau belum ada menjadi ada. Hal ini seperti pemaparan beliau berikut:

"Kepeloporan itu seseorang yang menciptakan sesuatu yang belum ada jadi ada. Misalnya seorang pemuda di suatu wilayah yang masyarakatnya belum tahu dan menciptakan sesuatu namun dengan kreatif seorang pemuda pelopor menciptakan sesuatu yang menjadi ada. Intinya, yang belum ada menjadi ada. Itulah kepeloporan itu sehingga masyarakat bisa mengikuti jejak sang pelopor itu. Sehingga berubahlah keadaan wilayah itu" – Bandingan Daulay –

Bandingan Daulay juga menambahkan bahwa kepeloporan itu harus merintis dari awal, bukan hanya meneruskan. Berikut kutipannya:

"...harus merintis dari awal. Kalo hanya melanjutkan bukan pelopor. Maka intinya yang belum ada menjadi ada." – Bandingan Daulay -

Suaeb Mahbub selaku pemuda Pelopor Bidang Bahari tingkat Nasional tahun 2009 lebih menyoroti bahwa kepeloporan harus dilakukan oleh pemuda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau:

"Kepeloporan dan kepemudaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah bangsa ini sangat berkaitan antara peran pemuda dan kepeloporan mereka untuk menggerakkan bangsa. Lihat saja, Budi Oetomo anak muda,

Soekarno ketika bergerak di PNI juga muda, bahkan yang nyepponsorin Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita juga anak muda yang waktu itu mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kepeloporan itu memang harus dilakukan oleh anak muda.” – Suaeb Mahbub –

2. Dilandasi kesadaran diri atas tanggungjawab sosial,

Bandingan Daulay mengatakan bahwa hal yang melatarbelakangi kepeloporan adalah inisiatif diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau berikut:

“Inisiatif dia, tanpa disuruh, menggerakkan apalagi menggaji dia, tidak ada yang beri modal sama dia. Kalo ada yang memberi modal bukan disebut pelopor. Jadi itu banyak yang hanya tamat SMP tapi menciptakan tanaman dan peternakan yang bermanfaat bagi semua...” – Bandingan Daulay –

Bandingan Daulay juga mengatakan bahwa kepeloporan memerlukan kreativitas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“...kalo tidak kreatif dia bukan seorang pemuda pelopor...” – Bandingan Daulay –

Amir Hamzah berpendapat bahwa kepeloporan itu sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab social seorang pemuda kepada lingkungannya. Hal ini seperti apa yang ia katakan dibawah ini:

“Kepeloporan harus memberi imbas kepada lingkungan sosial di sekitarnya dengan memberdayakan potensi lokal yang ada untuk kemakmuran.” – Amir Hamzah-

Hal ini diamini juga oleh Bandingan Daulay yang mengatakan bahwa hubungan antara kepeloporan dan tanggung jawab sosial sangat erat, namun pemuda juga harus memperhatikan kemandirian diri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau berikut:

“Hubungan antara kepeloporan dan tanggung jawab sosial amat erat. Pelopor itu memang jiwa sosialnya tinggi, namun juga diimbangi dengan jiwa kemandirian untuk pribadi juga tinggi. Bukan hanya untuk sosial saja, nanti bisa seperti lilin itu dia, menerangi tapi lama-lama habis dan mati.” – Bandingan Daulay –

Sedangkan Suaeb Mahbub mengatakan bahwa pemuda harus mempunyai dampak luas buat lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau berikut:

“Pemuda harus jadi pelopor di lingkungannya, harus jadi sukarelawan buat masyarakat, harus juga punya dampak luas di lingkungan sosial...” – Suaeb Mahbub –

3. Menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata.

Dr. H. Amir Hamzah, SH., MH berpendapat bahwa kepeloporan itu harus dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan potensi daerah. Hal ini seperti yang dikatakan beliau dibawah ini:

“Kepeloporan harus dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.” – Amir Hamzah –

Bandingan Daulay lebih melihat bahwa seorang pelopor itu bergerak karena ia ingin menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif yang bermanfaat bagi lingkungannya.

“...dia bergerak mungkin karena ingin menciptakan sesuatu dan dia coba – dia coba dan jadilah...” – Bandingan Daulay –

Hal ini sesuai seperti yang dikatakan Suaeb Mahbub selaku Pemuda Pelopor yang menjadi pelaku kepeloporan. Ia mengatakan bahwa ia mengajak kawan-kawannya untuk berbuat sesuatu yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Seperti yang dikatakan Suaeb berikut:

“...saya mencoba ngajakin teman-teman ini buat bikin sesuatu yang bisa buat kita lebih kuat, kompak dan menambah penghasilan kita...” – Suaeb Mahbub –

Suaeb mengajak masyarakat untuk membuat Kelompok Usaha Masyarakat (KUM), agar terjalin komunikasi dan koordinasi antar nelayan, dikutip berikut:

“...awalnya saya bikin KUM buat meningkatkan kesejahteraan teman-teman nelayan. Waktu itu saya belum jadi pemuda pelopor...” – Suaeb Mahbub –

Selain mengajak masyarakat mendirikan KUM, Suaeb juga mengajak masyarakat untuk memberdayakan pendidikan dengan mendirikan PAUD dan menciptakan beberapa alat yang dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan. Seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

"...saya bikin PAUD, bikin perpustakaan, majelis ta'lim, bikin alat-alat mesin yang berguna buat masyarakat sini." – Suaeb Mahbub –

Suaeb juga memperkuat pernyataannya di atas dengan pernyataan berikut:

"...yang ada disitu mesin penggiling udang biar jadi terasi. Lalu saya juga bikin mesin pemadat terasi ada di luar tuh... Nanti saya tunjukkan satu mesin lagi mesin penggiling tambang daur ulang. Nanti tambang daur ulangnya bakal bikin keset. Terus, saya coba modif perahu saya supaya bisa jadi perahu wisata..." – Suaeb Mahbub –

4. Dilaksanakan secara konsisten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kepeloporan harus dirintis dari awal bukan hanya melanjutkan atau meneruskan sesuatu yang telah dirintis seseorang. Berikut kutipannya:

"...harus merintis dari awal. Kalo hanya melanjutkan bukan pelopor. Maka intinya yang belum ada menjadi ada." – Bandingan Daulay –

Amir Hamzah menilai kepeloporan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah cukup lama dengan berkesinambungan, Kemempora menganggap kepeloporan itu harus dilakukan dengan waktu minimal 2 tahun. Berikut kutipan pernyataan Dr. Amir Hamzah, SH., MH.:

"...kami menilai kepeloporan itu harus dilakukan paling cepat 2 tahun untuk bisa disebut kepeloporan." – Amir Hamzah –

Hal senada juga diungkapkan oleh Bandingan Daulay yang menyatakan bahwa kepeloporan itu harus ada hasil yang bisa dilihat dalam jangka waktu tertentu. Berikut kutipannya:

"Biasanya minimal 2 tahun, sudah ada hasil yang bisa dilihat. Untuk memenuhi kriteria pemuda pelopor 2 tahun. Tapi biasanya kami akan melihat yang lebih lama berkiprah di bidangnya masing-masing tadi. Biasanya kalo

sudah 4 tahun maka lurah, camat, masyarakat udah pada lihat hasilnya.” – Bandingan Daulay -

Hal senada juga dapat terlihat dari wawancara dengan Suaeb Mahbub yang mengatakan bahwa ia sudah memulai memelopori komunitas nelayan Marunda jauh sebelum ia mendapat penghargaan sebagai Pemuda Pelopor. Berikut kutipannya:

“...waktu itu saya belum jadi pemuda pelopor.” – Suaeb Mahbub -

Selain empat indikator diatas, menurut Kemenpora kepeloporan juga dapat digolongkan menjadi beberapa bidang, yakni; kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata, juga kebaharian dan kelautan. Hal ini senada seperti yang dikatakan oleh Amir Hamzah, berikut kutipannya:

“...ada bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata, juga kebaharian dan kelautan.” – Amir Hamzah -

Bandingan Daulay lebih cenderung melihat bahwa kepeloporan (terutama Pemuda Pelopor) itu muncul dengan sendirinya berdasarkan inisiatif dan kreativitas mereka sendiri. Sedangkan fungsi Kemenpora hanya mengapresiasi kepeloporan yang sudah ada. Berikut kutipannya:

“...mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Namun kami dari menpora memberikan apresiasi bagi mereka, para pemuda pelopor dan SP3 yang berprestasi.” – Bandingan Daulay -

Berbeda dengan Bandingan Daulay, Suaeb Mahbub mempunyai pendapat yang sama dengan Amir Hamzah, berikut kutipannya:

“...selain bahari ada kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, senibudaya dan pariwisata.” – Suaeb Mahbub -

Dari pemaparan diatas mengenai berbagai hal terkait definisi kepeloporan, ada beberapa hal yang sepertinya perlu ditambahkan dari definisi kepeloporan yang harus dituangkan oleh Kemenpora dalam definisi kepeloporan versi Kemenpora, beberapa hal yang sepertinya harus ditambahkan dalam definisi kepeloporan antara lain:

1. Kepeloporan memerlukan kreativitas dan inovasi sehingga memunculkan suatu hal yang baru dan *original*.
2. Kepeloporan adalah menciptakan suatu hal yang baru, bukan hanya meneruskan apa yang telah ada atau mengembangkannya.

4.4. Analisis Strategi Pengembangan Program Kepeloporan Pemuda Di Kemenpora RI

A. Pelaksanaan Program

Untuk menganalisa program kepeloporan pemuda di Kemenpora, penulis menggunakan pisau analisa efektivitas yang diambil dari teori manajemen organisasi dan lembaga karya Peter Drucker. Drucker mengatakan bahwa sebuah program/ kegiatan dapat dikatakan efektif jika:

1. sasaran dan tujuan tercapai sesuai dengan perencanaan,
2. efisien dalam menggunakan sumber daya, dan
3. punya outcome yang jelas.

Berikut adalah penjabaran dari indikator tersebut:

1. Sasaran dan Tujuan Tercapai sesuai Perencanaan.

Penulis mencoba menggali mengenai pemahaman para stakeholders program tentang tujuan, sasaran dan target program. Secara umum narasumber tidak bisa menjawab dengan tepat dan terperinci apa tujuan, sasaran dan target program, namun mereka memahami tujuan program hanya secara garis besar.

Amir Hamzah menyarankan penulis untuk langsung membaca dari buku-buku panduan program yang telah diterbitkan oleh Kemenpora, berikut petikannya:

"Kalo gitu baca aja, didalamnya sudah ada semua. Tujuan, sasaran, target dan lainnya ada disitu." – Amir Hamzah –

Sedangkan Bandingan Daulay juga menyarankan penulis untuk membaca buku panduan program, namun beliau dapat menjelaskan tujuan umum penyelenggaraan program. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau berikut:

"Kau lihat saja di buku panduan program, kalo disebut satu satu banyak lah. Tapi intinya tadi, memunculkan kepeloporan pemuda juga memberdayakan

pemuda agar menjadi pelopor di daerahnya masing-masing yang sesuai dengan bidangnya.” – Bandingan Daulay –

Berbeda dengan para stakeholders penyelenggaran program, para peserta program sedikitnya memahami inti dari tujuan program yang pernah atau mereka ikuti. Suaeb Mahbub mengatakan bahwa tujuan pemilihan pemuda pelopor adalah untuk memilih pemuda yang telah melakukan hal kepeloporan. Berikut pernyataan beliau:

“Namanya juga pemilihan ya, pastinya memilih para pemuda yang berjiwa kepeloporan dan sudah berbuat banyak buat masyarakatnya.” – Suaeb Mahbub –

Begitu juga Clara Anggraeni selaku peserta program SP-3 angkatan XVIII yang berasal dari Kelurahan Batu Ampar Jakarta Timur, ia dapat menjelaskan secara umum tujuan program SP-3 yang ia ikuti. Berikut petikannya:

“...mempercepat proses pembangunan yang merata di perdesaan, bagi peserta akan meningkatkan wawasan dan pengalaman, mengembangkan kualitas pemuda yang sarjana untuk bisa menggerakkan potensi masyarakat, intinya yang pasti sich untuk mengoptimalkan pemuda untuk mau bergerak membangun perdesaan. Kalo gak salah gitu...” – Clara Anggraeni –

Sedangkan Andi Faishal Yusthi sebagai salah seorang peserta pelatihan kepeloporan pemuda siaga bencana, mengatakan tujuan pelatihan adalah mendidik pemuda untuk bisa menguasai kemampuan dalam menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di Indonesia. Hal ini seperti yang dikatakannya berikut:

“...sepertinya ingin mendidik anak-anak muda untuk bisa menjadi orang yang pertama terjun dalam menangani bencana yang terjadi. Indonesia ini memang negara yang rawan akan bencana.” – Andi Faishal Yusthi –

Pemahaman yang tidak menyeluruh akan tujuan program juga dikatakan oleh Asmari Yogi selaku Wakil Lurah Batu Ampar tempat pelaksanaan program SP-3 di Jakarta Timur, ia mengatakan bahwa keberadaan SP-3 di kelurahannya adalah untuk menggerakkan pemuda dalam rangka kewirausahaan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut kutipannya:

“...kalo gak salah ada yang menggerakkan pemuda untuk wirausaha supaya warga sini lebih baik ekonominya.” – Asmari Yogi –

Berdasarkan dokumen-dokumen (LPJ program dan pencapaian program yang dilihat di buku panduan program tahun berikutnya) yang telah dilihat oleh penulis, untuk program pemilihan pemuda pelopor sudah dapat dikatakan tujuan, sasaran dan target dapat terpenuhi, sedangkan untuk program SP-3 tujuan sudah dapat terpenuhi walaupun belum optimal pelaksanaannya, sasaran terpenuhi, sedangkan target tidak dapat terpenuhi sesuai dengan pedoman karena ini terkait dengan jumlah (kuantitas) orang yang dilibatkan dalam program. Program pelatihan pemuda pelopor dapat dikatakan tujuan, sasaran dan targetnya tercapai seluruhnya. Namun sudut pandang dari Bandingan Daulay selaku stakeholders penyelenggara program mengatakan bahwa tujuan dan sasaran telah tercapai. Seperti ter kutip dibawah ini?

"Tercapai lah... kita khan buat tujuan, sasaran dan target yang terukur, memungkinkan buat kita raih." – Bandingan Daulay –

Bandingan Daulay juga memperkuat pernyataannya dengan menegaskan bahwa program kepeloporan pemuda di Kemenpora telah berjalan efektif, berikut kutipannya:

"...kalo bicara efektif atau tidak yang pasti kita upayakan efektif, kalo gak gitu bahaya." - Bandingan Daulay -

Hal senada juga dikatakan oleh Amir Hamzah selaku Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda, walaupun tidak bisa sempurna sesuai harapan. Berikut kutipannya:

"Alhamdulillah tercapai, tapi tentunya tidak bisa sempurna seperti yang kita harapkan." – Amir Hamzah –

Hal yang berbeda dikatakan oleh Budi Setiawan selaku Deputi II Menpora Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, beliau mengatakan beberapa program memang telah efektif namun program yang lain belum dapat dikatakan efektif, program pemilihan pemuda pelopor dirasakan sudah efektif, namun program yang bertujuan mengembangkan kepeloporan dirasakan belum efektif. Berikut kutipannya:

"Kalo untuk memberikan penyadaran tentang pemuda pelopor efektif, orang tahu tentang kepeloporan karena kita melaksanakan pemilihan pemuda pelopor, pihak kabupaten dan provinsi bergerak mencari pemuda pelopor. Cuma untuk memunculkan kepeloporan ini yang belum efektif." – Budi Setiawan –

Belum optimalnya program untuk memunculkan atau mengembangkan jiwa kepeloporan pemuda juga dikatakan oleh Bandingan Daulay, dalam kutipan berikut:

"...program ini juga dilakukan agar menumbuhkan jiwa kepeloporan. Tapi belum sebesar program SP3 atau pemilihan pemuda pelopor." – Bandingan Daulay -

Budi Setiawan mengatakan lagi bahwa memang Pelatihan Kepeloporan Pemuda yang berfungsi mengembangkan jiwa kepeloporan belum masif dilaksanakan. Berikut kutipan pernyataan beliau:

"...memang gak masif. Sebenarnya tadinya saya pengennya program ini jadi main stream sebagai menumbuhkan jiwa kepeloporan. Tapi anggarannya gak disetujui. Tapi ini bisa diperbanyak, yang melaksanakan bukan kita tapi bekerja sama dengan LSM pake model grant gitu atau bantuan-bantuan dana untuk pelatihan yang content-nya kita atur harus bertemakan kepeloporan. Selama ini kita kalo kasih bantuan ya hanya kasih aja tanpa mengatur isinya dan membuat standarisasinya, memang agak sulit. Yang baru bisa seperti itu hanya pelatihan kepemimpinan, itu sudah seragam, di tingkat kabupaten atau provinsi tinggal lihat aja bukunya. Itu sudah lebih ada keterukurannya tapi kepeloporan itu belum" – Budi Setiawan -

Selain beberapa hal yang telah disampaikan diatas, ada beberapa fenomena yang dapat dilihat dari pelaksanaan program-program kepeloporan pemuda, antara lain terkait dengan masalah insentif peserta dan masalah rekrutmen, hal ini dikemukakan oleh Amir Hamzah dalam pernyataannya berikut:

"...SP3 misalnya, kendala yang ada gaji dan tunjangan peserta belum dibaya 2 atau 3 bulan, belum dibayar lho... bukan tidak dibayar. Rekrutmen yang dilakukan oleh Dispora kurang optimal, jadi kadang-kadang peserta tidak sesuai harapan." – Amir Hamzah. -

Atau pun adakalanya peserta program tidak sesuai dengan yang diharapkan, berikut kutipan Amir Hamzah:

“Jumlahnya kurang dari target, ataupun kadang-kadang tidak bisa sesuai kriteria di buku pedoman.” – Amir Hamzah -

“Bukan tidak terpenuhi, tapi ada toleransi. Jika masalah usia tidak ada toleransi karena sesuai UU, sehat rohani juga tapi sehat jasmani ini kadang-kadang masih ada toleransi. Contohnya, ada masalah seorang peserta SP3 yang menggunakan kursi roda, tapi dia bagus dan kinerjanya bisa dilihat.” – Amir Hamzah -

Sedangkan hal lain yang dapat diangkat dari program SP-3 sebagai salah satu program kepeloporan pemuda di Kemenpora adalah permasalahan karena adanya peserta yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Amir Hamzah berikut:

“...biasanya ada peserta yang mengundurkan diri sebelum masanya (3 tahun) berakhir. Bila mereka mengundurkan diri maka peserta cadangan akan menggantikan.” – Amir Hamzah -

Alasan mengundurkan diri biasanya karena masalah pribadi sang peserta, demikian pernyataan Amir Hamzah:

“Ada yang tidak betah, tapi itu kami anggap sebagai alasan yang tidak tepat, jadi bila yang seperti ini kami berikan sanksi. Tapi biasanya mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan ditempat lain. Bahkan tidak sedikit peserta SP3 yang akhirnya diangkat menjadi CPNS di tempat mereka bertugas.” – Amir Hamzah -

2. Efisien dalam Menggunakan Sumber Daya

Penulis mencoba menggali mengenai sejauhmana efisiensi sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan program kepeloporan pemuda. Salah satu sumber daya yang penulis coba mencari tahu adalah pendanaan program. Untuk pendanaan, Amir Hamzah mengatakan bahwa sumber pendanaan program kepeloporan pemuda adalah dari APBN, baik yang terpusat atau di dekonkan. Berikut pemaparan beliau:

“Dana APBN, baik yang terpusat ataupun yang di-dekonkan. Jika program itu dilakukan di daerah maka menggunakan dana APBD.” – Amir Hamzah -

Hal senada juga ditegaskan oleh Bandingan Daulay, bahwa pendanaan program kepeloporan pemuda berasal dari negara. Berikut petikannya:

“Dana APBN, baik yang terpusat ataupun yang di-dekonkan, sesuai PP. No. 99. Jika program itu dilakukan di daerah maka menggunakan dana APBD.” – Bandingan Daulay –

Pendapat yang sama mengenai sumber pendanaan program kepeloporan pemuda juga muncul dari Suai Mahbub, Clara Anggraeni dan Andi Faishal Yusthi selaku peserta program kepeloporan pemuda Kemenpora. Berikut kutipannya:

“Ya dari pemerintah, ada yang dari pusat, ada yang dari daerah.” – Suaeb Mahbub –

“Dari negara, dari APBN, kalo gaji saya yang ngambilnya di Disorda berarti pake dana dekon.” – Clara Anggraeni –

“Dari Negara, tapi kayaknya kurang optimal dalam penggunaannya.” – Andi Faishal Yushi –

Untuk hal lain terkait pendanaan, misalnya pembagian porsi tiap daerah, stake holders penyelenggara program mengatakan bahwa dana dibagi secara proporsional ke tiap daerah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:

“Contohnya dana untuk SP3, kami membaginya secara proporsional kepada 33 provinsi yang ada. Untuk Pemilihan Pemuda Pelopor pelaksanaannya dilakukan sesuai tingkatan pemilihan.” – Amir Hamzah –

“Tentu saja dibagi secara proporsional. Untuk daerah yang luas akan dapat kuota lebih banyak. Anggaran yang sudah ditentukan harus dipakai, harus habis dan bisa dipertanggungjawabkan.” – Bandingan Daulay –

Sedangkan untuk penggunaan dana, para peserta program memandang tidak ada hal yang ganjil dari proses prosedur keuangan dan bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

“Saya tanda tangan SPJ keuangan ya Disorda.” – Clara Anggraeni –

“Kami dapat akomodasi di hotel yang cukup mewah, tiket pesawat dan pulang dapat uang saku.” – Andi Faishal Yusthi –

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Asmari Yogi selaku wakil lurah Batu Ampar tempat pelaksanaan SP-3 yang mengetahui dan berinteraksi dengan Clara Anggraeni selaku peserta program SP-3 di kelurahan Batu Ampar. Berikut pernyataan beliau:

“Digaji, tapi bukan ma kami. Katanya dia dapat dari Disorda DKI.” – Asmari Yogi –

Namun pernyataan yang agak berbeda diutarakan oleh Suaeb Mahbub, ia mengaku tidak mendapatkan daa transport dari pemerintah walikotamadya Jakarta Utara untuk mengikuti seleksi di tingkat DKI Jakarta. Berikut kutipannya:

“Yang pasti bertingkat. Saya khan gak ujuk-ujuk langsung dikirim di tingkat nasional, tapi diseleksi dulu di Jakarta Utara, terus di Provinsi baru ke tingkat nasional. Tapi waktu diutus di tingkat Jakarta Utara saya khan dapat transpor dari kecamatan karena maju atas nama kecamatan, waktu maju di tingkat propinsi saya ga dikasih transpor jalan buat seleksi. Padahal khan harusnya dapat, dibuku panduannya soalnya bilang begitu.” – Suaeb Mahbub -

Dalam wawancara selanjutnya Suaeb Mahbub menegaskan lagi apa yang ia alami. Berikut kutipannya:

“Harusnya gak bisa gitu, khan buku panduan dah jelas bilang apa. Buktinya waktu saya menang, piala saya dibawa pak wali kemana-mana kayak adipura. Berarti khan dalam hal ini saya mengharumkan nama Jakarta Utara.” – Suaeb Mahbub -

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana program, pihak stakeholders terlihat mencoba efisien dengan melibatkan dan bersinergi dengan unsure terkait yang ada di daerah. Amir Hamzah mengatakan bahwa kepanitiaan program sering dilakukan secara gabungan dengan unsur Dispora/ Disorda di daerah, juga melakukan sinergi dengan instansi terkait. Berikut kutipannya:

“Panitianya melibatkan semua staf asdep kepeloporan dan juga pihak terkait, misalnya; jika kami melaksanakan kegiatan di daerah maka panitianya menjadi panitia gabungan dengan personil dari Dispora setempat.” – Amir Hamzah –

Hal senada juga dikatakan oleh staf Kemenpora di Asdep Kepeloporan Pemuda Bandingan Daulay, bahkan pelibatan unsur perguruan tinggi dalam program kepeloporan pemuda-pun ada. Berikut pernyataan beliau:

“Dilakukan oleh kami, tapi ada yang gabungan ada yang tidak. Tapi intinya dilakukan dengan bersinergi dengan instansi terkait, seperti perguruan tinggi, dispora/ disorda dan pemerintah daerah.” – Bandingan Daulay –

Para peserta program juga mengamini 2 pernyataan di atas. Berikut petikan wawancaranya:

“Ada tim pusat yang dari Menpora, ada Tim Teknis di Disorda, ada juga tim tenis di Walikota. Jadi kayaknya kepanitiaannya gabungan, ada koordinasi dari pusat sampai ke bawah...” – Clara Anggrani –

“Kayaknya panitianya gabungan, ada yang dari kantor menpora pusat ada yang dari dinas Lombok.” – Andi Faishal Yusthi –

3. Outcome yang dirasakan oleh masyarakat.

Outcome dari program kepeloporan pemuda adalah dapat dirasakannya kebermanfaatan program bagi masyarakat. Selain kebermanfaatan bagi masyarakat juga dapat dilihat sejauh mana imbas program bagi peserta program dan bagi masyarakat.

Imbas program kepeloporan pemuda bagi peserta program berimbas baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Amir Hamzah dan Bandingan Daulay. Berikut petikannya:

“Yang namanya program pasti harapan kami imbasnya baik, namun kadar imbasnya pasti berbeda tiap orang.” – Amir Hamzah –

“Program yang telah didanai pemerintah tentunya ada imbasnya, manfaatnya pasti terasa bagi peserta. Ada yang dari tidak tahu lalu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, herbeda-beda imbasnya.” – Bandingan Daulay –

Sedangkan untuk imbas dan kebermanfaatan program bagi masyarakat, hampir semua informan mengatakan bahwa program kepeloporan pemuda di Kemenpora punya imbas positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan berikut:

"...yang berinspirasi dengan pemuda pelopor dan SP-3 ini banyak juga. Kalo kita lihat factfinding di lapangan ya mereka ngenal down to earth para pemudanya itu bahkan ada yang bisa sampai jadi anggota dewan karena mereka memang dicintai rakyat dan pemuda yang menjadikan mereka sebagai role model..." – Budi Setiawan –

"Seperti yang telah saya katakan diatas, sejauh ini imbasnya baik. Membuai masyarakat sekitar lebih makmur, contohnya; ada seorang pemuda pelopor di Brebes Jawa Tengah yang bisa mempekerjakan sekitar 500 orang dari daerahnya." – Amir Hamzah –

"Sejauh ini program yang dilaksanakan pasti bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kalo program gak bermanfaat buat masyarakat gak akan kita teruskan lagi itu program. Manfaatnya banyak, ada yang bisa membuat lapangan kerja bagi masyarakat, mendidik anak-anak dan pemuda, membiasakan kepada kebiasaan baik." – Bandingan Daulay –

Kebermanfaatan program juga dirasakan oleh para peserta program kepeloporan pemuda. Berikut kutipannya:

"Ya, pastinya bermanfaat." – Clara Anggraeni –

"...buat peserta yang lain ya pastinya akan ada, kalo nanti ada bencana para peserta seharusnya bisa mengaplikasikan ilmunya untuk digunakan di masyarakat dengan jadi tim penolong. Atau minimal ilmu yang kemarin di dapat juga diajarkan di organisasi atau kelompoknya masing-masing, jangan cuma diendapin aja." – Andi Faisha Yusthi –

Hal yang agak berbeda dialami oleh Suaeb Mahbub selaku orang yang terpilih sebagai pemuda pelopor. Ia memang sudah dari dahulu beraktivitas menggerakkan masyarakat nelayan Marunda, jauh sebelum terpilih menjadi pemuda pelopor. Jadi keberadaan Suaeb-lah yang bermanfaat bagi masyarakat bukan program pemilihan pemuda pelopor yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung. Berikut kutipannya:

"...khan tadi situ udah bilang ada kepeloporan yang sifatnya alami. Mereka yang jadi pelopor alami ini khan udah gerak sejak dulu sebelum diberi penghargaan jadi ya saya buat mereka tetap saya yang dulu, yang suka membantu mereka, suka berinovasi dan ngomporin mereka." -- Suaeb Mahbub --

Sueb memperkuat lagi pernyataannya diatas dalam kutipan berikut:

"Sebenarnya, masyarakat sini gak ngerti saya tuch dapat penghargaan apa. Mereka bingung aja kadang saya bisa ngobrol ma walikota, dengan gubernur, atau pejabat pemerintahan lainnya. Tapi mereka gak ngerasa heran, karena emang dari dulu saya udah bergerak, udah jadi pelopor disini." – Suaeb Mahbub -

Suaeb Mahbub juga menyayangkan kurangnya *follow up* pemerintah pasca program. Ia merasa perlu adanya kerjasama antara Kemenpora dengan Kementerian yang lain untuk dapat memajukan suatu daerah. Berikut kutipannya:

"...sebenarnya masalah kepemudaan terutama kepeloporan ini bukan cuma tanggung jawab Menpora aja. Harus ada juga kerja sama dengan lembaga lain. Misalnya departemen lain, swasta dan masyarakat lain yang peduli." – Suaeb Mahbub -

Suaeb juga memperkuat pendapatnya dengan contoh kasus yang ia rasakan, ia menilai bahwa Kemenpora perlu menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memajukan masalah bahari dan kelautan pasca terpilihnya seorang pemuda pelopor pada bidang bahari dan kelautan. Berikut kutipannya:

"...waktu saya belum jadi pemuda pelopor saya udah bergerak disini, setelah jadi juga masih bergerak disini dan tetap hampir kayak gitu juga. Seharusnya ada peningkatan, misalnya ada unsur departemen yang menangani kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga kemari membantu disini. Khan masalah laut dan bahari yang nanganin Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan Menpora." – Suaeb Mahbub -

Suaeb mengharapkan agar pihak Kemenpora sebelum merancang suatu program juga memikirkan kerjasama dengan instansi lain sebagai *follow-up* pasca program-nya dengan instansi terkait. Berikut pernyataannya:

"...Menpora punya ajang pemuda pelopor, tapi seharusnya sebelum bikin penghargaan juga ada komunikasi dengan departemen lain yang terkait supaya ke depannya cantik." – Suaeb Mahbub -

Melihat dari hasil wawancara dan data diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa belum semuanya program kepeloporan pemuda dapat dikatakan efektif, program kepeloporan pemuda yang dapat dikatakan efektif

dikatakan efektif, program kepeloporan pemuda yang dapat dikatakan efektif adalah Pemilihan Pemuda Pelopor, hal ini karena sudah adanya keterlibatan dari stakeholders kepemudaan dalam program ini, namun ada juga beberapa hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan program Pemilihan Pemuda Pelopor, antara lain dengan perlu adanya sinergisitas dan kerjasama dengan instansi lain (Kementerian lain, swasta, dll.) dalam rangka menindaklanjuti kepeloporan yang telah terbangun di suatu daerah yang telah dimotori oleh figur Pemuda Pelopor, contohnya; Kemenpora perlu mengadakan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti pemberdayaan masyarakat nelayan di Marunda yang dipelopori oleh Suaeb Mahbub.

Untuk program SP-3 dapat dikatakan cukup efektif karena para peserta SP-3 berhasil menjadi figur dan dianggap cukup membumi di masyarakat dan imbas program yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan SP-3 antara lain permasalahan rekrutmen yang kurang optimal, pemenuhan hak (insentif) peserta yang terkadang tidak dibayar tepat pada waktunya dan terkadang panitia memberikan toleransi terhadap persyaratan peserta SP-3.

Untuk program pelatihan kepeloporan pemuda, program ini belum dilaksanakan secara masif. Saat ini yang baru dilaksanakan hanya pelatihan kepeloporan pemuda siaga bencana dan daerah tertinggal, sedangkan pelatihan untuk bidang yang lain belum berjalan. Seharusnya program pelatihan ini lebih ditingkatkan karena program pelatihan inilah yang nantinya akan memunculkan jiwa kepeloporan dikalangan pemuda Indonesia.

B. Pengembangan Program Kepeloporan Pemuda

Penulis akan melihat proses evaluasi program sampai pada proses pengembangan program supaya menjadi program yang lebih baik. Beberapa indikator terkait upaya pengembangan program menurut Harty, Wholey & Newcomer antara lain:

1. Evaluasi program.
2. Pengukuran Kinerja Program
3. Proses Pengembangan Pasca Evaluasi, yang terdiri atas:

- 1) perubahan terencana;
- 2) berorientasi kepada persoalan dan usaha pemecahannya;
- 3) menggunakan pendekatan kesisteman;
- 4) bagian integral dari proses manajemen;
- 5) usaha yang dilakukan secara terus-menerus;
- 6) memberikan perhatian utama kepada peningkatan kualitas;
- 7) berorientasi kepada pelaksanaan.

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan indikator di atas satu-persatu.

1. Evaluasi Program (secara kualitatif dan kuantitatif)

Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpora dalam pelaksanaan program kepeloporan pemuda dilakukan dengan berbagai cara. Namun secara umum cara yang dipakai oleh pihak Kemenpora melalui 2 cara yakni; pengawasan dan pelaporan. Hal ini dikatakan oleh Amir Hamzah dalam pernyataannya berikut:

"Melalui pengawasan dan pelaporan." – Amir Hamzah -

Dr. H. Amir Hamzah juga mengatakan bahwa monitoring merupakan bentuk pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau:

"...monitoring termasuk pengawasan." – Amir Hamzah -

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bandingan Daulay, bahwa evaluasi dilakukan dengan melihat ke lapangan dan membuat LPJ. Berikut kutipannya:

"Evaluasi dilakukan dengan melihat dan membuat LPJ. Bagi peserta SP-3 wajib membuat LPJ kegiatan mereka, biasanya bulanan. Juga melalui monitoring ke daerah." – Bandingan Daulay -

Bandingan Daulay juga menambahkan bahwa yang proses evaluasi yang dilakukan bukan hanya melalui kunjunga, tapi melalui kunjungan monitoring dan evaluasi yang akan dibahas di kantor Kemenpora nantinya. Berikut kutipannya:

"...tapi bukan hanya kunjungan aja. Tapi monitoring dan evaluasi. Setelah monitoring di-bahas di pusat." – Bandingan Daulay -

2. Pengukuran Kinerja Program

Pengukuran kinerja program kepeloporan pemuda di Kemenpora dilakukan dengan melihat laporan pertanggungjawaban dan data-data yang masuk, demikian kata Dr. H. Amir Hamzah, SH., MH dalam kutipannya berikut:

“Lihat di LPJ dan data-data yang masuk” – Amir Hamzah –

Hal ini dikuatkan dengan pendapat Bandingan Daulay yang mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja program dilihat dari kesesuaian antara perencanaan (buku pedoman program) dengan pelaksanaan di lapangan. Berikut kutipannya:

“...dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan program dan apa yang kita targetkan sesuai sasaran yang ada di buku pedoman program.” – Bandingan Daulay –

Bandingan Daulay menambahkan lagi tentang permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan, sehingga terkadang program berjalan tidak sesuai harapan. Berikut kutipannya:

“Kita melihat antara yang kita rencanakan dan pelaksanaan nyatanya di lapangan, karena di lapangan banyak hal yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan tidak bisa optimal.” – Bandingan Daulay –

Sedangkan contoh kendala yang biasanya dihadapi adalah masalah rekrutmen pada program SP-3. Berikut pemaparan Bandingan Daulay:

“SP-3 misalnya, kendalanya adalah rekrutmen. Rekrutmen yang dilaksanakan oleh dispora di daerah kadang tidak optimal, kita minta 90 orang yang direkrut dapat cuma 20 orang. Sedangkan kita butuh 30 orang peserta.” – Bandingan Daulay –

3. Proses Pengembangan Pasca Evaluasi

Setelah dievaluasi tentunya program yang telah berjalan perlu diperbaiki dan dikembangkan agar menjadi semakin baik. Proses pengembangan setelah dievaluasi seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut; perubahan terencana, berorientasi kepada persoalan dan usaha pemecahannya, menggunakan pendekatan kesisteman, bagian integral dari proses manajemen, usaha yang dilakukan secara terus-menerus, memberikan perhatian utama kepada peningkatan

kualitas, dan berorientasi kepada pelaksanaan. Namun pelaksanaan proses pengembangan setelah evaluasi di Kemenpora hanya berjalan apa adanya, tanpa melakukan prosedur sesuai dengan teori yang penulis gunakan, semuanya hanya berjalan sesuai dengan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.

Bandingan Daulay mengatakan bahwa setelah dievaluasi melalui rapat kemudian mencatat kekurangannya dan mencari solusinya kemudian mengisikannya di RKAKL. Demikian kutipan pernyataan beliau:

"...kita rapatkan, catat kekurangannya, lalu coba diperbaiki lagi dalam pelaksanaan tahun berikutnya dan kita isikan: di RKAKL." – Bandingan Daulay -

Hal yang sama juga dikatakan oleh Amir Hamzah, berikut pernyataan beliau:

"Setelah dilakukan tahapan pengawasan, pelaporan, dilakukan evaluasi. Jika kita melihat ada kekurangan di sisi ini maka tahun berikutnya akan kita perbaiki... jika memungkinkan." – Amir Hamzah -

Sedangkan untuk langkah-langkah mengembangkan program yang dilakukan di Kemenpora adalah dengan mencatat kekurangannya, membuat resume bahan kajian dan mengisikannya di RKAKL atau DIPA. Itulah yang dikatakan Bandingan Daulay dalam kutipan berikut:

"Pengembangannya ya kita coba lihat dari kekurangan tahun sebelumnya dan kita coba memperbaiki. Langkah-langkahnya ya tadi, dicatat kekurangannya, dibuat resumanya, dibuat apa-apa yang perlu dikaji disana khan? Tapi itu semua bisa jalan kalo dananya dikasih dari RKAKL atau DIPA. Di DIPA itu rancangannya semua sudah ada inputnya, outputnya, berapa orang, berapa hari, narasumber, mulai dari TOR, semua sudah ada disitu." – Bandingan Daulay -

Hal hampir senada juga diungkapkan oleh Dr.H. Amir Hamzah, SH., MH, berikut kutipannya:

"...seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jika programnya masih dianggap baik, maka tahun berikutnya akan diusulkan kembali dengan mengisi RKAKL." – Amir Hamzah -

Hal yang agak berbeda dikatakan oleh Budi Setiawan selaku Deputy II Menpora, beliau mengatakan seharusnya bahwa ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam rangka mengembangkan program, bukan hanya mencatat kekurangan kemudian memperbaikinya di tahun berikutnya. Berikut kutipannya:

"Sebenarnya kita punya rakornis dan rakornas. Rakor Teknis bersifat internal menpora, rakornas dengan dispora se-Indonesia. Seharusnya aktivitas intelektual dalam rangka pengembangan disitu. Itu tujuannya, walaupun aplikasinya dilapangan agak melenceng. Di momen itu terjadi proses memberikan masukan dan pengembangan ke depan, itu harusnya dilakukan disitu. Bahkan juga membuat program yang namanya pelatihan promosi kepemimpinan, kenapa disebut promosi karena kita ingin melatih 2 belah pihak, baik stakeholders maupun pemudanya sendiri dalam satu kamar, satu ruangan antara pengambil kebijakan di daerah dengan pemudanya. Nah, kalau program ini jalan maka komunikasi akan lebih intens lagi. Jadi memang ada beberapa mekanisme, tapi mungkin yang digambarkan Pak Amir dkk itu memakai mekanisme direct aja, udah dapat masukan langsung masukin RKAKL Tapi bagaimana masuk RKAKL-nya juga harus dilihat, tapi mungkin kalo cuma pake feeling-feeling aja kurang tepat juga, kalo ada yang bilang insentifnya terlalu kecil ya naikkan. Jadi cuma by case aja, gak semuanya dituangkan dalam prosedur yang benar walaupun mekanisme itu ada..." - Budi Setiawan -

Dari penjelasan Budi Setiawan diatas dapat dilihat bahwa ternyata seharusnya ada tahapan lain yang harus dilalui sebelum menuangkan program ke RKAKL pasca dievaluasi, namun perlu juga dibicarakan dalam rapat di tingkat Kemenpora melalui Rakornis dan Rapat dengan seluruh stakeholders kepemudaan di Indonesia melalui Rakornas. Hal ini penting dilakukan sebagai ajang penajaman konsep dan memberikan masukan bagi berjalannya program.

Sedangkan untuk pendekatan manajemen yang dipakai untuk memperbaiki program di Kemenpora hanya menggunakan prosedur yang sudah ada dan ditentukan. Demikian yang dikatakan oleh Bandingan Daulay dalam kutipan berikut:

"...semuanya disini sudah ada tahapannya, sudah jelas prosedurnya. Jadi kami tinggal jalankan saja sesuai prosedur yang ada." - Bandingan Daulay -

Hal ini juga diamini oleh Amir Hamzah dalam kutipan berikut:

"Prosedur kerja di lembaga pemerintahan sudah jelas, kami hanya mengikuti prosedur saja." – Amir Hamzah -

Untuk mengerjakan program dengan berorientasi utama pada kualitas, stakeholders mengatakan sudah berupaya optimal dalam menyelenggarakan program. Hal ini dikatakan oleh Bandingan Daulay dalam pernyataan berikut:

"Iya lah, masa' hanya menjalankan program saja tanpa melihat keberhasilan program dan fungsinya di masyarakat. Sayang anggaran kalo cuma buat program yang seperti hanya formalitas saja." – Bandingan Daulay -

Sedangkan Amir Hamzah mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya optimal dalam menyelenggarakan program. Berikut kutipannya:

"Kami berusaha mengerjakan program-program yang ada dengan optimal dan sungguh-sungguh." – Amir Hamzah-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan program kepeloporan pemuda di Kemenpora belum berjalan sesuai dengan teori Harty, Wholey & Newcomer tentang pengembangan organisasi. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpora hanya berdasarkan monitoring dan LPJ kegiatan yang masuk. Proses evaluasi dilakukan dengan membuat resume kekurangan yang harus diperbaiki, merapatkannya kemudian menuangkannya dalam RKAKL. Dalam hal ini tidak ada pembahasan yang menyeluruh dan komprehensif dari stakeholders lain yang terkait dengan kepemudaan, sedangkan upaya memperbaiki program untu dilaksanakan pada tahun berikutnya terlihat hanya dengan menutupi apa yang kurang dan terlihat berdasarkan apa yang dapat diamati oleh pihak Asdep Kepeloporan Pemuda selaku penyelenggara program dan lebih cenderung menggunakan mekanisme "*direct*" saja sehingga terlihat penanganan masalah dan upaya memperbaikinya hanya *case by case*.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab 4 dan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Belum semua program kepeloporan pemuda berjalan baik. Program kepeloporan pemuda yang dapat dikatakan cukup baik adalah Pemilihan Pemuda Pelopor, hal ini karena sudah adanya keterlibatan dari *stakeholders* kepemudaan. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan program kepeloporan pemuda, antara lain: pada program Pemilihan Pemuda Pelopor, perlu adanya sinergisitas dan kerjasama dengan instansi lain (Kementerian lain, swasta, dll.) dalam rangka menindaklanjuti kepeloporan yang telah terbangun di suatu daerah yang telah dimotori oleh figur Pemuda Pelopor. Sedangkan untuk program SP-3, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan SP-3 antara lain permasalahan rekrutmen yang kurang optimal, pemenuhan hak (insentif) peserta yang terkadang tidak dibayar tepat pada waktunya dan terkadang panitia memberikan toleransi terhadap persyaratan peserta SP-3. Untuk program pelatihan kepeloporan pemuda, program ini belum dilaksanakan dengan efektif karena belum dilakukan dengan masif. Saat ini yang baru dilaksanakan hanya pelatihan kepeloporan pemuda siaga bencana dan daerah tertinggal, sedangkan pelatihan untuk bidang yang lain belum berjalan.
2. Pengembangan program kepeloporan pemuda di Kemenpora belum berjalan sesuai dengan teori Harty, Wholey & Newcomer tentang pengembangan program dalam organisasi. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpora hanya berdasarkan monitoring dan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang masuk. Proses evaluasi dilakukan dengan membuat resume kekurangan yang harus diperbaiki, merapatkannya di internal Asdep Kepeloporan Pemuda kemudian menuangkannya dalam perencanaan. Dalam hal ini tidak ada pembahasan yang menyeluruh dan komprehensif dari *stakeholders* lain yang

terkait dengan kepemudaan, sedangkan upaya memperbaiki program untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya terlihat hanya dengan menutupi apa yang kurang dan terlihat berdasarkan apa yang dapat diamati oleh pihak Asdep Kepeloporan Pemuda selaku penyelenggara program dan lebih cenderung menggunakan mekanisme “*direct*” saja sehingga terlihat penanganan masalah dan upaya memperbaikinya hanya *case by case*.

5.2. Saran

Sebagai penutup dari laporan hasil penelitian, ada beberapa saran yang disampaikan peneliti terkait dengan pembahasan ini, yakni:

5.2.1. Saran Bagi Kemenpora RI

Beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk Kemenpora antara lain:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap definisi kepeloporan oleh Kemenpora, beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam definisi kepeloporan tersebut antara lain:
 - a. Kepeloporan adalah menciptakan suatu hal yang baru, bukan hanya meneruskan apa yang telah ada atau mengembangkannya.
 - b. Kepeloporan memerlukan kreativitas dan inovasi sehingga memunculkan suatu hal yang baru dan original.
2. Meningkatkan kemampuan adaptasi atau adaptabilitas program dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan peserta program, khususnya melalui pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia dengan cara optimalisasi pembekalan dan pelatihan, membangun kerjasama yang memadai dengan berbagai pihak terkait guna mendukung aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan program SP-3 dan Pemilihan Pemuda Pelopor, serta melakukan tindak lanjut program yang mempunyai arah jangka panjang dalam mensejahterakan masyarakat.
3. Menciptakan dan menjaga pola komunikasi yang baik dan efektif dengan stakeholders kepemudaan dan masyarakat sehingga pihak Kemenpora lebih terbuka, transparan, dan sensitif akan kebutuhan para peserta dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan program pelatihan kepeloporan pemuda sebagai wahana

- memunculkan dan mengembangkan jiwa kepeloporan pemuda di Indonesia.
5. Menata ulang kembali prioritas dalam menentukan target yang ingin dicapai. Hal ini menjadi signifikan karena akan terkait langsung dengan strategi yang digunakan dalam merealisasikannya. Sebagai contoh dalam program SP-3 sepertinya diprioritaskan bidang mana yang akan didahulukan untuk dikerjakan apakah penggerakkan, pendampingan atau kemandirian.
 6. Dalam proses evaluasi dan pengembangan program sebaiknya melakukan prosedur Rakornis dan Rakornas agar mendapatkan masukan dari berbagai pihak supaya dapat dicari solusi yang komprehensif dari permasalahan yang ada.

5.2.2. Saran Bagi Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan

Sementara bagi organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan yang memfokuskan dirinya pada pembinaan, kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana penting yang patut diikutsertakan sebagai input dalam program yang dirancang atau dilaksanakan.

5.2.3. Saran untuk Penelitian Lanjutan

1. Mengingat penelitian yang memfokuskan diri pada kepeloporan pemuda masih sangat minim, maka diperlukan penelitian-penelitian lain yang serupa dengan menggunakan metode *grounded theory* atau *mixed-method* untuk mengembangkan dan memperkaya lagi hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.
2. Selain penelitian yang memfokuskan pada program kepeloporan pemuda di Kemenpora, maka akan menarik pula apabila diadakan sebuah penelitian yang justru melihat peran serta masyarakat atau para pengikut dalam mempengaruhi, mendukung, atau memunculkan jiwa kepeloporan di kalangan pemuda.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Dari segi informan yang berjumlah 7 orang, peneliti hanya dapat menemui dan mewawancarai 7 orang tersebut dengan waktu yang terbatas dan proses wawancara pun hanya berlangsung satu kali sehingga Penulis tidak melakukan proses *member-checking* dan *triangulasi* dalam penelitian ini.
2. Minimnya ketersediaan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat atau membahas topik ini. Di lingkup civitas akademika Universitas Indonesia sendiri sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada yang menyentuh permasalahan ini secara khusus. Akibatnya, pengembangan yang dilakukan serta teori atau konsep yang digunakan lebih merupakan sebuah bentuk adaptasi dari penelitian yang memiliki kemiripan atau substansi yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, John. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd ed). California: Sage Publications, Inc.
- Lewis, G., Morkel, A., & Hubbard, G. (1993). *Australian Strategic Management: Concept, Context, and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mintzberg, H. (1988), "Opening up the definition of strategy", in Quinn, B.,
- Mintzberg, H & James, R (Eds). *The Strategy Process: Concepts, Context, and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed). Allyn & Bacon.
- Parry, K.W. (1996), "Leadership research: themes, implications, and a new leadership challenge", in: Parry, K.W. (Ed.), *Leadership Research and Practice: Emerging Themes and New Challenges*. Melbourne: Pitman Publishing.
- Terry, Robert W. (1993). *Authentic Leadership Courage in Action*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Bogdan, C.R. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Ally and Bacon Inc.
- Berger, Lance A, Martin J. Sikora (1994). *The Change Management Handbook: A Road Map to Corporate Transformation*. London: Irwin Professional Publishing
- Clarke, Thomas & Stewart Clegg (1998). *Changing Paradigms: The Transformational of Management Knowledge for the 21st Century*, London: Harper Collins Publishers
- Wholey, J.S., Harty, H.P., & Newcomer, K.E. (1994). *Handbook of practical program evaluation*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Lewis, G., Morkel, A., & Hubbard, G. (1993). *Australian Strategic Management: Concept, Context, and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Mintzberg, H & James, R (Eds) (1988). *The Strategy Process: Concepts, Context, and Cases*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches* (4th ed). Allyn & Bacon.

- Koter Phillip, John (1997). *Leading Change: The Challenge*. Jossey – Bass, San Francisco
- Franklin C. (1999). *Revitalize Your Corporate Culture*. Houston: Cashman Dudley
- Leemans, Arne F. (1976). *The Management of Change in Government*, Netherland: Martinus Nijhof/ The Hague
- Gouillart, Francis J. & James Kelly (1995). *Transforming the Organization*. Newyork : McGraw-Hill, Inc
- Lowenthal N., Jeffrey (1994). *Reengineering the Organization : A Step By Step Approach to Corporate Revitalization*. Milwaukee: ASQC Quality Press
- Prawirosentono, Suyadi, (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Terry, George R. (1984). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Drucker, Peter F. (2007). *The Essential Drucker*. UK: Elsevier Ltd.
- Poerwadarminta, WJS.(2002) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda (2009). *Buku Panduan Program Pemilihan Pemuda Pelopor*. Jakarta: Kemenpora RI
- Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda (2009). *Buku Panduan Program SP-3*. Jakarta: Kemenpora RI
- Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda (2009). *Buku Panduan Program Pelatihan Kepeloporan Pemuda Siaga Bencana*. Jakarta: Kemenpora RI
- Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan* (2009). Jakarta: Bappenas RI
- Laporan Pertanggungjawaban Program Pemilihan Pemuda Pelopor tahun 2009*. Jakarta: Kemenpora RI
- Laporan Pertanggungjawaban SP-3 tahun 2009*. Jakarta: Kemenpora RI
- American Journal of Evaluation*.(1996); 17: 163-167
- Harvard Business Review. (2004); *Effective Executive* by Peter F. Drucker

Usman, Wan. (2007); *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: UI Press

<http://www.aje.sagepub.com/cgi/reprint/17/2/163>

<http://www.telelavoro.rassegna.it/fad/socorg03/14/barnard.pdf>

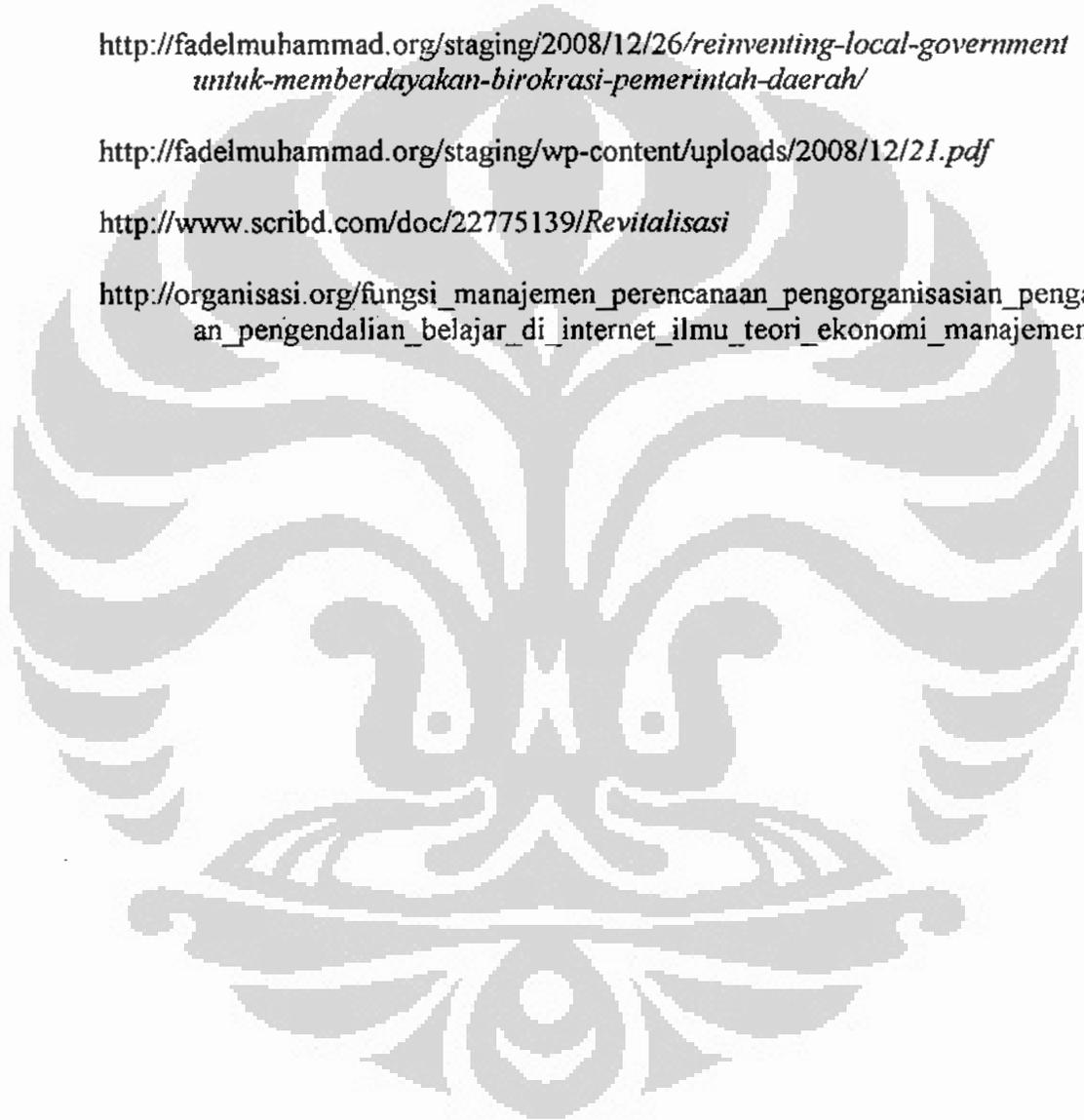
<http://www.thinkingmanagers.com/blog/2005/11/23/peter-drucker-effective-efficient>

<http://fadelmuhammad.org/staging/2008/12/26/reinventing-local-government-untuk-memberdayakan-birokrasi-pemerintah-daerah/>

<http://fadelmuhammad.org/staging/wp-content/uploads/2008/12/21.pdf>

<http://www.scribd.com/doc/22775139/Revitalisasi>

http://organisasi.org/fungsi_manajemen_perencanaan_pengorganisasian_pengaruh_an_pengendalian_belajar_di_internet_ilmu_teoris_ekonomi_manajemen







Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

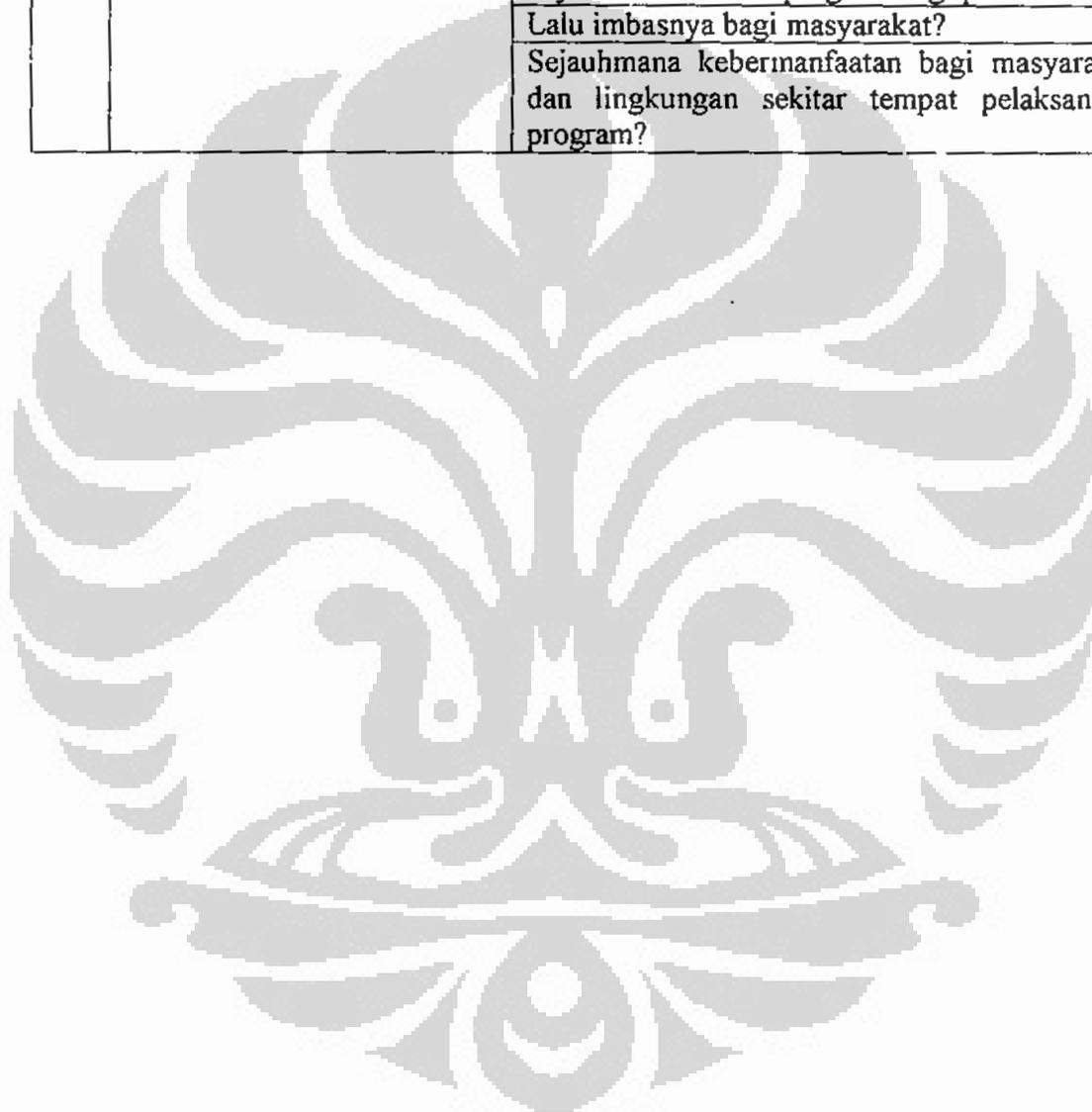
No.	Informan	Pertanyaan
1.	Deputi II Kemenpora	<p>Menurut Bapak apakah definisi kepeloporan itu?</p> <p>Adakah korelasi antara kepeloporan dan semangat kesukarelawanan? Apa korelasinya? Sejauh mana?</p> <p>Hal apa sajakah yang melatarbelakangi munculnya kepeloporan?</p> <p>Disaat sekarang ini, kepeloporan dan tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang seharusnya sangat berkorelasi, bagaimana menurut bapak?</p> <p>Apakah kepeloporan harus dikembangkan menjadi hal yang nyata dan konkret serta bermanfaat untuk masyarakat?</p> <p>Apakah kepeloporan harus ditransformasikan menjadi gerak nyata?</p> <p>Perlukah konsistensi dalam pelaksanaan kepeloporan?</p> <p>Jenis pembinaan/ pengembangan kepeloporan yang dilaksanakan di Kemenpora?</p> <p>Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda?</p> <p>Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.)</p> <p>Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/ program kepeloporan pemuda?</p> <p>Sejauh mana imbas program bagi peserta?</p> <p>Lalu imbasnya bagi masyarakat?</p> <p>Sejauhmana kebermanfaatannya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?</p> <p>Bagaimana teknis proses evaluasi program yang ada di kemenpora?</p> <p>Evaluasi secara kualitatif</p> <p>Evaluasi secara kuantitatif</p> <p>Bagaimanakah cara mengukur kinerja program?</p> <p>Bagaimanakah cara mengembangkan program setelah dievaluasi?</p> <p>Lalu, setelah dievaluasi, bagaimana langkah-langkah mengembangkan/ memperbaiki program?</p> <p>Pendekatan manajerial perbaikan program yang digunakan?</p>

No.	Informan	Pertanyaan
		Apakah program-program kepeloporan pemuda berorientasi utama pada kualitas program?
2.	Asdep kepeloporan pemuda	<p data-bbox="836 331 1451 401">Menurut Bapak apakah definisi kepeloporan itu?</p> <p data-bbox="836 407 1451 512">Adakah korelasi antara kepeloporan dan semangat kesukarelawanan? Apa korelasinya? Sejauh mana?</p> <p data-bbox="836 518 1451 588">Hal apa sajakah yang melatarbelakangi munculnya kepeloporan?</p> <p data-bbox="836 594 1451 699">Disaat sekarang ini, kepeloporan dan tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang seharusnya sangat berkorelasi, bagaimana menurut bapak?</p> <p data-bbox="836 705 1451 810">Apakah kepeloporan harus dikembangkan menjadi hal yang nyata dan konkret serta bermanfaat untuk masyarakat?</p> <p data-bbox="836 816 1451 886">Apakah kepeloporan harus ditransformasikan menjadi gerak nyata?</p> <p data-bbox="836 892 1451 961">Perluakah konsistensi dalam pelaksanaan kepeloporan?</p> <p data-bbox="836 968 1451 1037">Jenis pembinaan/ pengembangan kepeloporan yang dilaksanakan di Kemenpora?</p> <p data-bbox="836 1043 1451 1113">Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda?</p> <p data-bbox="836 1119 1451 1188">Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.)</p> <p data-bbox="836 1194 1451 1264">Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/ program kepeloporan pemuda?</p> <p data-bbox="836 1270 1451 1339">Sejauh mana imbas program bagi peserta?</p> <p data-bbox="836 1346 1451 1415">Lalu imbasnya bagi masyarakat?</p> <p data-bbox="836 1421 1451 1526">Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?</p> <p data-bbox="836 1533 1451 1602">Bagaimana teknis proses evaluasi program yang ada di kemenpora?</p> <ul data-bbox="836 1608 1451 1677" style="list-style-type: none"> o Evaluasi secara kualitatif o Evaluasi secara kuantitatif <p data-bbox="836 1684 1451 1753">Bagaimanakah cara mengukur kinerja program?</p> <p data-bbox="836 1759 1451 1829">Bagaimanakah cara mengembangkan program setelah dievaluasi?</p> <p data-bbox="836 1835 1451 1904">Lalu, setelah dievaluasi, bagaimana langkah-langkah mengembangkan/ memperbaiki program?</p> <p data-bbox="836 1911 1451 1980">Pendekatan manajerial perbaikan program yang digunakan?</p>

No.	Informan	Pertanyaan
		Apakah program-program kepeloporan pemuda berorientasi utama pada kualitas program?
3.	Staf Asdep Kepeloporan Pemuda	<p>Menurut Bapak apakah definisi kepeloporan itu?</p> <p>Adakah korelasi antara kepeloporan dan semangat kesukarelawananan? Apa korelasinya? Sejauh mana?</p> <p>Hal apa sajakah yang melatarbelakangi munculnya kepeloporan?</p> <p>Disaat sekarang ini, kepeloporan dan tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang seharusnya sangat berkorelasi, bagaimana menurut bapak?</p> <p>Apakah kepeloporan harus dikembangkan menjadi hal yang nyata dan konkret serta bermanfaat untuk masyarakat?</p> <p>Apakah kepeloporan harus ditransformasikan menjadi gerak nyata?</p> <p>Perlukah konsistensi dalam pelaksanaan kepeloporan?</p> <p>Jenis pembinaan/ pengembangan kepeloporan yang dilaksanakan di Kemenpora?</p> <p>Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda?</p> <p>Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.)</p> <p>Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/ program kepeloporan pemuda?</p> <p>Sejauh mana imbas program bagi peserta?</p> <p>Lalu imbasnya bagi masyarakat?</p> <p>Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?</p> <p>Bagaimana teknis proses evaluasi program yang ada di kemenpora?</p> <p>Evaluasi secara kualitatif</p> <p>Evaluasi secara kuantitatif</p> <p>Bagaimanakah cara mengukur kinerja program?</p> <p>Bagaimanakah cara mengembangkan program setelah dievaluasi?</p> <p>Lalu, setelah dievaluasi, bagaimana langkah-langkah mengembangkan/ memperbaiki program?</p> <p>Pendekatan manajerial perbaikan program</p>

No.	Informan	Pertanyaan
		yang digunakan? Apakah program-program kepeloporan pemuda berorientasi utama pada kualitas program?
4.	Pemuda Pelopor	Apakah tujuan program Pemilihan Pemuda Pelopor? Siapakah sasaran program Pemilihan Pemuda Pelopor? Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda? Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.) Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/program kepeloporan pemuda? Sejauh mana imbas program bagi peserta? Lalu imbasnya bagi masyarakat? Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?
5.	Peserta program SP3	Apakah tujuan program SP3 ini? Siapakah sasaran program SP3? Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda? Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.) Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/program kepeloporan pemuda? Sejauh mana imbas program bagi peserta? Lalu imbasnya bagi masyarakat? Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?
6.	Peserta program pelatihan kepeloporan	Menurut saudara apakah tujuan program Pelatihan Kepeloporan? Siapakah sasaran program Pemilihan Pemuda Pelopor? Darimanakah sumber pendanaan program ini? Sistem pendanaan (LPJ keuangan, akomodasi peserta, dll.) Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/program kepeloporan pemuda? Sejauh mana imbas program bagi peserta? Lalu imbasnya bagi masyarakat? Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?

No.	Informan	Pertanyaan
7.	Warga tempat pelaksanaan program SP3	Apakah bapak mengetahui tujuan program SP3 ini?
		Sasaran program SP3 ini siapa saja?
		Darimanakah sumber pendanaan program ini?
		Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/program kepeloporan pemuda?
		Sejauh mana imbas program bagi peserta?
		Lalu imbasnya bagi masyarakat?
		Sejauhmana kebermanfaatannya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA
Drs. Bandingan Daulay
Staf Asdep Kepeloporan Pemuda Menpora
Jum'at, 23 April 2010

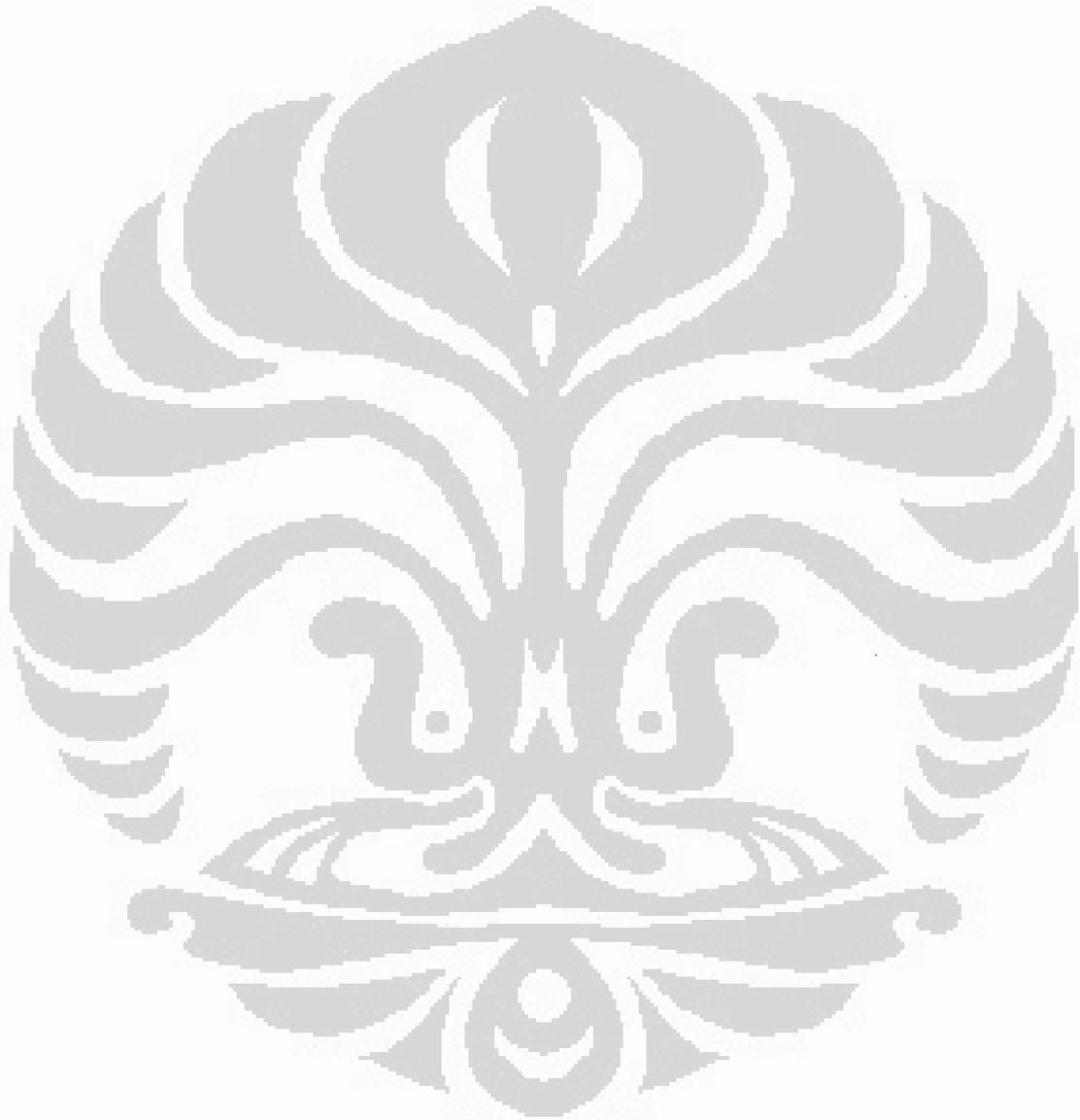
Pertanyaan	Jawaban
Menurut Bapak apakah kepeloporan itu?	Kepeloporan itu seseorang yang menciptakan sesuatu yang belum ada jadi ada. Misalnya seorang pemuda di suatu wilayah yang masyarakatnya belum tahu dan menciptakan sesuatu namun dengan kreatif seorang pemuda pelopor menciptakan sesuatu yang menjadi ada. Intinya, yang belum ada menjadi ada. Itulah kepeloporan itu sehingga masyarakat bisa mengikuti jejak sang pelopor itu. Sehingga berubahlah keadaan wilayah itu.
Berarti perlu kreativitas disitu?	Iya, kalo tidak kreatif dia bukan seorang pemuda pelopor. Kemudian pelopor misalnya hanya melanjutkan usaha kreatif bapaknya bukan disebut pelopor.
Harus merintis dari awal	Iya, harus merintis dari awal. Kalo hanya melanjutkan bukan pelopor. Maka intinya yang belum ada menjadi ada.
Intinya harus ada kreativitas dan inovasi baru pak.	Betul sekali.
Kira-kira hal yang melatarbelakangi kepeloporan apa pak?	Inisiatif dia, tanpa disuruh, menggerakkan apalagi menggaji dia, tidak ada yang beri modal sama dia. Kalo ada yang memberi modal bukan disebut pelopor. Jadi itu banyak yang hanya tamat SMP tapi menciptakan tanaman dan peternakan yang bermanfaat bagi semua. Bayangkan apalah yang bisa dikerjakan oleh seorang tamatan SMP? Jadi dia bergerak mungkin karena ingin menciptakan sesuatu dan dia coba – dia coba dan jadilah. Kalo saya lihat itu ilham yang datang dari hati dan dari kesadaran untuk menciptakan hal yang baik. Jadi tidak ada yang menggerakkan dia kecuali kemauan dan ketulusan. Saya ambil contoh lain, sekarang banyak PAUD diberi bantuan oleh diknas 20 juta tiap tahunnya maka itu bukan pelopor, sudah banyak yang seperti itu. Tapi mencari modalnya sehingga ia menjadi besar maka itulah inisiatif. Kalo ada yang menjual harta

Pertanyaan	Jawaban
	bapaknya untuk melakukan itu juga bukan pelopor. Jadi intinya dari kemauan dia sendiri dan tidak mengharapkan pamrih apapun.
Dibuku panduan pemilihan pemuda pelopor tertera bahwa kepeloporan berangkat dari kesukarelawanan dan punya tanggung jawab sosial.	Betul itu. Hubungan antara kepeloporan dan tanggung jawab sosial amat erat. Pelopor itu memang jiwa sosialnya tinggi, namun juga diimbangi dengan jiwa kemandirian untuk pribadi juga tinggi. Bukan hanya untuk sosial saja, nanti bisa seperti lilin itu dia, menerangi tapi lama-lama habis dan mati.
Seberapa lama kepeloporan dapat dikatakan sebagai kepeloporan?	Biasanya minimal 2 tahun, sudah ada hasil yang bisa dilihat. Untuk memenuhi kriteria pemuda pelopor 2 tahun. Tapi biasanya kami akan melihat yang lebih lama berkiprah di bidangnya masing-masing tadi. Biasanya kalo sudah 4 tahun maka lurah, camat, masyarakat udah pada lihat hasilnya.
Pembinaan yang dilakukan untuk para pemuda pelopor?	Pemuda pelopor tidak perlu dibina. Mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Namun kami dari menpora memberikan apresiasi bagi mereka, para pemuda pelopor dan SP3 yang berprestasi. Indonesia ini khan miskin dalam menghargai karya atau prestasi orang, kita pelit dalam menghargai.
Kalo tujuan program-program kepeloporan pemuda apa pak?	Yang mana?
Semuanya?	Kau lihat saja di buku panduan program, kalo disebut satu satu banyak lah. Tapi intinya tadi, memunculkan kepeloporan pemuda juga memberdayakan pemuda agar menjadi pelopor di daerahnya masing-masing yang sesuai dengan bidangnya.
Kalo sasaran pak?	Di buku panduan program ada semua itu, baca saja lah...
Kalo selama ini sudah tercapai belum tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam program?	Tercapai lah... kita khan buat tujuan, sasaran dan target yang terukur, memungkinkan buat kita raih.
Saya mencoba melihat bahwa kepeloporan itu terbagi dua, ada yang genuine dan ada yang by design. Yang genuine ini oleh pemerintah diberikan apresiasi	Betul itu. Bagi mereka yang telah melakukan kepeloporan secara mandiri kami memberikan penghargaan melalui Pemilihan Pemuda Pelopor dan kami berusaha memunculkan kepeloporan

Pertanyaan	Jawaban
melalui program Pemilihan Pemuda Pelopor. Sedangkan yang by design melalui program SP3 dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda sesuai bidang. Menurut Bapak penilaian saya tadi tepat tidak?	dengan pelatihan, juga SP-3 yang titik tekannya pada kewirausahaan. Kalo pelatihan... ada tapi belum banyak, belum masif, baru saja dilakukan pelatihan Pelatihan Kepeloporan Siaga Bencana. Iya, saya pikir tepat bila dikatakan begitu. Bahkan kalo kita mau lihat, para pemuda pelopor itu hanya lulusan SMP, SMA, bayangkan SMP SMA bisa apa sich? Tapi mereka bisa menciptakan sesuatu. Kalo semua pemuda Indonesia seperti itu, tidak ada lagi pengangguran di Indonesia, malah mereka akan membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Buat SP-3 Pak, bagaimana bisa seorang bisa merubah suatu daerah?	Jadi begini, ini desa, didalamnya banyak orang, ada yang buta huruf, ada yang hanya tamatan SD, SMP atau SMA. Ini sarjana, berarti ada orang intelek khan? Inilah yang harus dia motivasi masyarakatnya supaya bergerak ini pembangunan, jadi didesa itu dialah semacam konsultannya. Sebenarnya tugas SP-3 ini mulia, hanya mau ke desa pun kita udah bersyukur, bahkan dahulu ketika Pak Napitupulu menjadi Dirjen beliau bilang walaupun sang sarjana hanya tidur saja di desa itu sudah baik. Atau saya bilang pengerahan tenaga terdidik ke pedesaan. Tugas utama mereka ada 3 yaitu; penggerakkan, pendampingan dan kemandirian.
Mirip PNPM Mandiri pak ya? Atau PNPM Mandiri yang meniru SP-3?	Begitulah, namun SP-3 sudah ada sejak dulu dan peserta SP-3 datang gak bawa modal hanya bawa intelektual.
Kalo pelatihan kepeloporan pemuda bagaimana pak?	Program ini juga dilakukan agar menumbuhkan jiwa kepeloporan. Tapi belum sebesar program SP3 atau pemilihan pemuda pelopor.
Kenapa begitu pak?	Ya karena dipencanaan hanya dilaksanakan sedikit.
Begitu ya pak. Darimanakah sumber pendanaan program kepeloporan pemuda?	Dana APBN, baik yang terpusat ataupun yang di-dekonkan, sesuai PP. No. 99. Jika program itu dilakukan di daerah maka menggunakan dana APBD.
Yang didanai APBD apa saja pak?	Seleksi Pemuda pelopor tingkat daerah.
Sistem pendanaannya bagaimana pak?	Tentu saja dibagi secara proporsional. Untuk daerah yang luas akan dapat kuota

Pertanyaan	Jawaban
	lebih banyak. Anggaran yang sudah ditentukan harus dipakai, harus habis dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kalo untuk kepanitiaan kegiatan bagaimana pak?	Dilakukan oleh kami, tapi ada yang gabungan ada yang tidak. Tapi intinya dilakukan dengan bersinergi dengan instansi terkait, seperti perguruan tinggi, dispora/ disorda dan pemerintah daerah.
Sejauh mana imbas program bagi peserta?	Program yang telah didanai pemerintah tentunya ada imbasnya, manfaatnya pasti terasa bagi peserta. Ada yang dari tidak tahu lalu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, berbeda-beda imbasnya.
Lalu imbasnya bagi masyarakat?	Pastinya ada, walaupun kadang memang kurang signifikan.
Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?	Sejauh ini program yang dilaksanakan pasti bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kalo program gak bermanfaat buat masyarakat gak akan kita teruskan lagi itu program. Manfaatnya banyak, ada yang bisa membuat lapangan kerja bagi masyarakat, mendidik anak-anak dan pemuda, membiasakan kepada kebiasaan baik.
Kebiasaan baik gimana pak?	Contohnya ada desa yang warganya masih suka buang air besar (BAB) di kebun atau di tegalan, nah dengan peran peserta SP-3 maka kebiasaan buruk itu bisa dihilangkan.
Bagaimana teknis proses evaluasi program yang ada di Kemenpora?	Evaluasi dilakukan dengan melihat dan membuat LPJ. Bagi peserta SP-3 wajib membuat LPJ kegiatan mereka, biasanya bulanan. Juga melalui monitoring ke daerah.
Monitoring ke lapangan aja pak?	Iya, tapi bukan hanya kunjungan aja. Tapi monitoring dan evaluasi. Setelah monitoring di-bahas di pusat.
Jika sudah di-monev, dudah dibahas, dianalisis tentunya kita akan bicara mengenai perbaikan program.	Iya, kalo dananya ada. Walaupun sudah dibahas, dievaluasi, sudah ketauan penyakitnya tapi dananya gak ada maka gak bisa hilang itu penyakitnya.
Bagaimanakah cara mengukur kinerja program?	Ya dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan program dan apa yang kita targetkan sesuai sasaran yang ada dibuku pedoman program.
Hanya kesesuaian saja pak?	Kita melihat antara yang kita rencanakan dan pelaksanaan nyatanya di lapangan, karena di lapangan banyak hal yang

Pertanyaan	Jawaban
	menjadi kendala sehingga pelaksanaan tidak bisa optimal.
Contoh kendalanya apa pak?	SP-3 misalnya, kendalanya adalah rekrutmen. Rekrutmen yang dilaksanakan oleh dispora di daerah kadang tidak optimal, kita minta 90 orang yang direkrut dapat Cuma 20 orang. Sedangkan kita butuh 30 orang peserta.
Kalo begitu khan berarti tidak perlu diseleksi lagi?	Tidak begitu, kami coba memperpanjang deadline rekrutmen agar sesuai target,
Bagaimanakah cara mengembangkan program setelah dievaluasi?	Ya kita rapatkan, catat kekurangannya, lalu coba diperbaiki lagi dalam pelaksanaan tahun berikutnya dan kita isikan di RKAKL.
Lalu, setelah dievaluasi, bagaimana langkah-langkah mengembangkan/memperbaiki program?	Pengembangannya ya kita coba lihat dari kekurangan tahun sebelumnya dan kita coba memperbaiki. Langkah-langkahnya ya tadi, dicatat kekurangannya, dibuat resumennya, dibuat apa-apa yang perlu dikaji disana khan? Tapi itu seua bisa jalan kalo dananya dikasih dari RKAKL atau DIPA. Di DIPA itu rancangannya semua sudah ada inputnya, outputnya, berapa orang, berapa hari, narasumber, mulai dari TOR, semua sudah ada disitu.
Pendekatan manajerial perbaikan program yang digunakan?	Khan semuanya disini sudah ada tahapannya, sudah jelas prosedurnya. Jadi kami tinggal jalankan saja sesuai prosedur yang ada.
Menurut Bapak program-program yang dilaksanakan asdep kepeloporan sudah efektif belum?	Maksudnya?
Ya tadi, sesuai dengan sasaran dan target yang kita inginkan.	Ya, kalo bicara efektif atau tidak yang pasti kita upayakan efektif, kalo gak gitu bahaya.
Menurut Bapak, apakah program-program kepeloporan pemuda berorientasi utama pada kualitas program?	Iya lah, masa' hanya menjalankan program saja tanpa melihat keberhasilan program dan fungsinya di masyarakat. Sayang anggaran kalo cuma buat program yang seperti hanya formalitas saja.



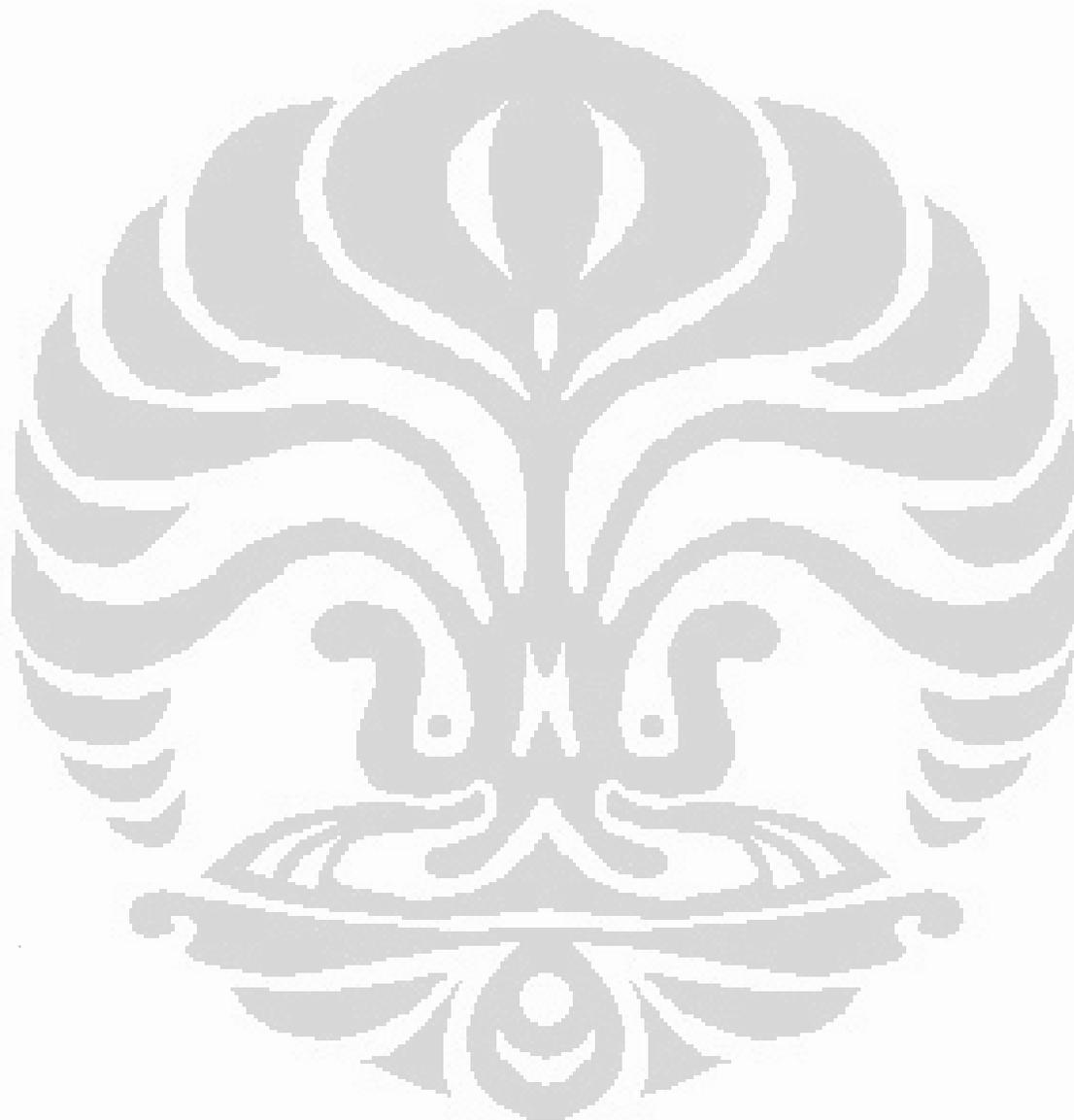
TRANSKRIP WAWANCARA
Dr. H. Amir Hamzah, SH., MH.
Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda
Rabu, 28 April 2010

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Bapak apakah definisi kepeloporan itu?	Kepeloporan sudah tertuang di UU Kepemudaan, sebentar.... saya lihat dulu. Ada di halaman 24 dan 25. Silakan dilihat dan dikaji lagi. Saya kasih aja bukunya UU kepemudaan ya?
Kebetulan saya sudah punya pak. Adakah korelasi antara kepeloporan dan semangat kesukarelawanan?	Kepeloporan dimulai dari kerelaan berkorban dan memberi untuk lingkungan. Mereka memodalkan sendiri dan kami mencoba memberikan penghargaan/apresiasi dalam bentuk pemilihan pemuda pelopor yang kami anugerahkan setiap tanggal 28 Oktober.
Hal apa sajakah yang melatarbelakangi munculnya kepeloporan?	Kepeloporan diawali rasa keterpanggilan untuk menjadikan sesuatu lebih baik.
Disaat sekarang ini, kepeloporan dan tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang seharusnya sangat berkorelasi, bagaimana menurut bapak?	Iya, sangat berkorelasi. Kepeloporan harus memberi imbas kepada lingkungan sosial di sekitarnya dengan memberdayakan potensi lokal yang ada untuk kemakmuran.
Kepeloporan harus dikembangkan menjadi hal yang nyata dan konkret serta bermanfaat untuk masyarakat, kepeloporan dan transformasi gagasan menjadi gerak nyata?	Kepeloporan harus dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.
Perlukah konsistensi dalam pelaksanaan kepeloporan?	Harus, kami menilai kepeloporan itu harus dilakukan paling cepat 2 tahun untuk bisa disebut kepeloporan.
Saya menilai bahwa kepeloporan itu terbagi dua, ada yang genuine dan ada yang by design. Yang genuine ini oleh pemerintah diberikan apresiasi melalui program Pemilihan Pemuda Pelopor. Sedangkan yang bu desing melalui program SP3 dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda sesuai bidang. Menurut Bapak penilaian saya tadi tepat tidak?	Betul, kami memfasilitasi proses pengembangan kepeloporan pemuda. Untuk kepeloporan yang sudah muncul secara alami kami memberikan apresiasi, sedangkan untuk pemuda-pemuda yang lain dimunculkan jiwa kepeloporannya melalui pelatihan, sedangkan SP3 ini adalah program long term yang membuat pemuda sarjana menjadi bermanfaat bagi lingkungan.
Kalc kepeloporan ini dapat digolongkan tidak pak?	Maksudnya?
Bidang-bidang kepeloporan?	Ada bidang kewirausahaan, pendidikan,

Pertanyaan	Jawaban
	teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata, juga kebaharian dan kelautan.
Kalo tujuan program-program kepeloporan pemuda yang ada di menpora apa pak?	Sebentar... Sudah punya buku ini belum?
Sudah pak, kemarin dipinjem pak Daulay.	Kalo gitu baca aja, didalamnya sudah ada semua. Tujuan, sasaran, target dan lainnya ada disitu.
Baik pak, kira-kira tujuan, sasaran dan targetnya tercapai gak?	Alhamdulillah tercapai, tapi tentunya tidak bisa sempurna seperti yang kita harapkan.
Lalu sumber pendanaan program kepeloporan pemuda dari mana?	Dana APBN, baik yang terpusat ataupun yang di-dekonkan. Jika program itu dilakukan di daerah maka menggunakan dana APBD.
Sistem pendanaannya bagaimana pak?	Contohnya dana untuk SP3, kami membaginya secara proporsional kepada 33 provinsi yang ada. Untuk Pemilihan Pemuda Pelopor pelaksanaannya dilakukan sesuai tingkatan pemilihan.
Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/ program kepeloporan pemuda?	Panitianya melibatkan semua staf asdep kepeloporan dan juga pihak terkait, misalnya; jika kami melaksanakan kegiatan di daerah maka panitianya menjadi panitia gabungan dengan personil dari Dispora setempat.
Sejauh mana imbas program bagi peserta?	Yang namanya program pasti harapan kami imbasnya baik, namun kadar imbasnya pasti berbeda tiap orang.
Lalu imbasnya bagi masyarakat?	Seperti yang telah saya katakan diatas, sejauh ini imbasnya baik. Membuat masyarakat sekitar lebih makmur, contohnya; ada seorang pemuda pelopor di Brebes Jawa Tengah yang bisa mempekerjakan sekitar 500 orang dari daerahnya.
Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?	Sangat bermanfaat tentunya.
Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam program-program kepeloporan apa saja pak?	Kita ambil satu dulu ya... SP3 misalnya, kendala yang ada gaji dan tunjangan peserta belum dibaya 2 atau 3 bulan, belum dibayar lho... bukan tidak dibayar. Rekrutmen yang dilakukan oleh Dispora kurang optimal, jadi kadang-kadang peserta tidak sesuai harapan. Mungkin pekerjaan mereka banyak, jadi hal yang berkaitan dengan kita jadi tidak tertangani optimal.

Pertanyaan	Jawaban
Buat SP3 sendiri, sepertinya ini program unggulan Deputy II ya pak? Saya melihat dipenyajian data kementerian tahun ini hanya SP3 yang dimasukkan.	Betul, SP3 saat ini adalah program yang diunggulkan dari deputy II.
Kenapa SP-3? Kenapa banyak program lain.	Karena SP-3 program yang menyerap dana terbesar. Juga sudah dari dulu ada.
Tidak sesuai harapan bagaimana?	Jumlahnya kurang dari target, ataupun kadang-kadang tidak bisa sesuai kriteria di buku pedoman.
Kriteria mana yang harus dipenuhi dan mana yang boleh tidak terpenuhi?	Bukan tidak terpenuhi, tapi ada toleransi. Jika masalah usia tidak ada toleransi karena sesuai UU, sehat rohani juga tapi sehat jasmani ini kadang-kadang masih ada toleransi. Contohnya, ada masalah seorang peserta SP3 yang menggunakan kursi roda, tapi dia bagus dan kinerjanya bisa dilihat.
Ada tidak pak kasus dalam pelaksanaan yang SP3 yang menarik untuk diangkat?	Apa ya... biasanya ada peserta yang mengundurkan diri sebelum masanya (3 tahun) berakhir. Bila mereka mengundurkan diri maka peserta cadangan akan menggantikan.
Biasanya mengundurkan diri kenapa pak?	Ada yang tidak betah, tapi itu kami anggap sebagai alasan yang tidak tepat, jadi bila yang seperti ini kami berikan sanksi. Tapi biasanya mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan ditempat lain. Bahkan tidak sedikit peserta SP3 yang akhirnya diangkat menjadi CPNS di tempat mereka bertugas.
Bagaimana teknis proses evaluasi program yang ada di Kempenpora?	Melalui pengawasan dan pelaporan
Apakah dilakukan juga proses monitoring?	Iya, monitoring termasuk pengawasan.
Bagaimanakah cara mengukur kinerja program?	Lihat di LPJ dan data-data yang masuk.
Bagaimanakah cara mengembangkan program setelah dievaluasi?	Setelah dilakukan tahapan pengawasan, pelaporan, dilakukan evaluasi. Jika kita melihat ada kekurangan di sisi ini maka tahun berikutnya akan kita perbaiki... jika memungkinkan.
Lalu, setelah dievaluasi, bagaimana langkah-langkah mengembangkan/memperbaiki program?	Iya, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Jika programnya masih dianggap baik, maka tahun berikutnya akan diusulkan kembali dengan mengisi RKAKL.
Pendekatan manajerial perbaikan program yang digunakan?	Prosedur kerja di lembaga pemerintahan sudah jelas, kami hanya mengikuti prosedur

Pertanyaan	Jawaban
Apakah program-program kepeloporan pemuda berorientasi utama pada kualitas program?	saja. Kami berusaha mengerjakan program-program yang ada dengan optimal dan sungguh-sungguh.



TRANSKRIP WAWANCARA
Suaeb Mahbub
Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Bahari tahun 2009
Minggu, 2 Mei 2010

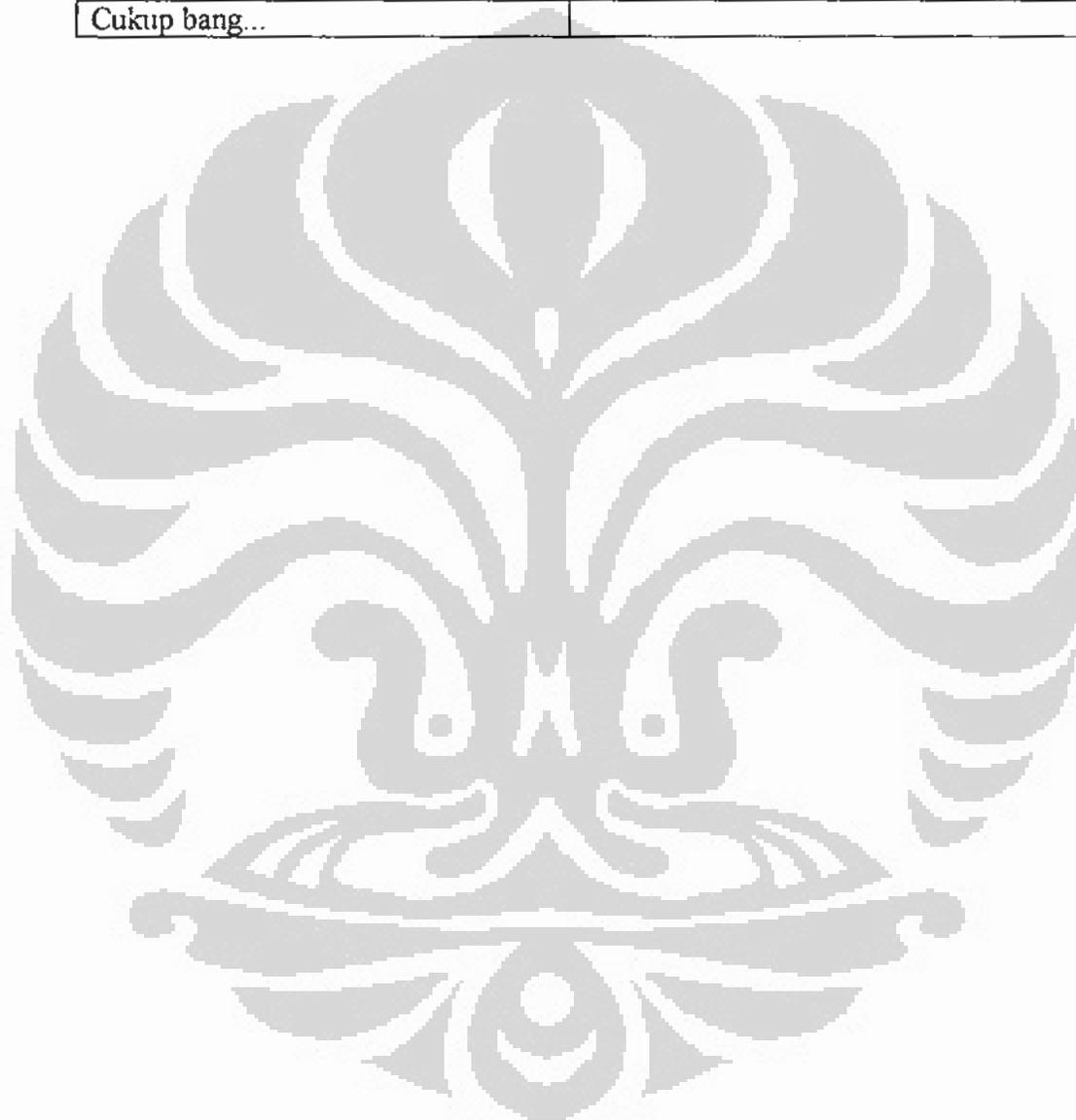
Pertanyaan	Jawaban
Menurut Abang kepeloporan itu apa sich?	Kepeloporan dan kepemudaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah bangsa ini sangat berkaitan antara peran pemuda dan kepeloporan mereka untuk menggerakkan bangsa. Lihat saja, Budi Oetomo anak muda, Soekarno ketika bergerak di PNI juga muda, bahkan yang nyepponsorin Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita juga anak muda yang waktu itu mereka menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi kepeloporan itu memang harus dilakukan oleh anak muda. Pemuda harus jadi pelopor di lingkungannya, harus jadi sukarelawan buat masyarakat, harus juga punya dampak luas di lingkungan sosial.
Memang harusnya pemuda itu kayak bagaimana sich bang?	Pemuda itu harus bergerak, harus bisa bikin inovasi dan mereka juga harus kreatif. Mereka harus bisa bikin sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Kalo saya menilai bahwa pemuda itu terbagi menjadi 3, yang pertama istimewa, mereka adalah pemuda yang kreatif, punya inovasi dan mau bergerak, mau ngajak lingkungan sekitarnya berubah untuk maju. Yang kedua, mereka yang sedang-sedang saja, mereka ini sebenarnya punya kemampuan, punya ide, tapi gak diwujudkan dan gak dituliri ke masyarakat jadi ibaratnya ngendap aja tuh ilmunya. Dan yang terakhir yang pasif, ini yang paling jelek dech... Udah gak kreatif gak mau gerak juga. Alhamdulillahnya saya tuch kayaknya masuk yang pertama, jadi saya peduli ma masyarakat sini. Kamu lihat aja daerah sekitar sini, masyarakatnya rata-rata miskin. Mereka Cuma nelayan biasa yang melautnya kadang dapat kadang nggak, kalo cuaca lagi bagus berangkat, kalo nggak ya udah di rumah aja. Kalo lautnya jelek terus-terusan, anak istrinya mau dikasih makan apa? Maka saya mencoba ngajakin teman-teman ini buat bikin sesuatu yang bisa buat kita lebih kuat, kompak dan menambah

Pertanyaan	Jawaban
	penghasilan kita.
Kalo abang khan pemuda pelopor bidang bahari, selain bahari ada lagi yang lain gak?	Ada, selain bahari ada kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, senibudaya dan pariwisata.
Kira-kira Bang, tujuan pemilihan pemuda pelopor apa?	Namanya juga pemilihan ya, pastinya memilih para pemuda yang berjiwa kepeloporan dan sudah berbuat banyak buat masyarakatnya.
Hal apa saja yang telah abang lakukan buat masyarakat sini?	Awalnya saya bikin KUM buat meningkatkan kesejahteraan teman-teman nelayan. Waktu itu saya belum jadi pemuda pelopor.
KUM itu apa bang?	Kelompok Usaha Masyarakat. Itu kumpulan nelayan-nelayan di Marunda sini. Nah, setelah saya bikin KUM itu mulai banyak yang ngelirik komunitas nelayan sini. Ada pemodal yang masuk, CSR dari perusahaan masuk, perhatian dari pemerintah daerah mulai ada. Dan itu semua bikin kesejahteraan masyarakat sini lebih baik.
Selain KUM apa lagi yang Abang lakukan untuk masyarakat sini?	Banyak, saya bikin PAUD, bikin perpustakaan, majelis ta'lim, bikin alat-alat mesin yang berguna buat masyarakat sini.
Mesin apa bang?	Itu, yang ada disitu mesin penggiling udang biar jadi terasi. Lalu saya juga bikin mesin pemadat terasi ada diluar tuh... Nanti saya tunjukkan satu mesin lagi mesin penggiling tambang daur ulang. Nanti tambang daur ulangnya bakal bikin keset. Terus, saya coba modif perahu saya supaya bisa jadi perahu wisata.
Subhanallah... Nah, bang kalo setahu abang sumber pendanaan program ini dari mana?	Program apa nich? Kalo semua hal yang udah saya kerjain tadi ya dana saya, saya sisihkan buat mengawali. Ada juga dana patungannya dari teman-teman.
Bukan dana yang abang pake, maksudnya dana penyelenggaraan program pemilihan pemuda pelopor.	Oh. Ya dari pemerintah, ada yang dari pusat, ada yang dari daerah.
Kalau saya menilai bahwa kepeloporan itu terbagi dua, ada yang genuine dan ada yang by design. Yang genuine ini oleh pemerintah diberikan apresiasi melalui program Pemilihan Pemuda Pelopor. Sedangkan yang by design melalui program SP3 dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda sesuai bidang. Nah, kalo abang pernah dengar atau	Kalo gak salah SP3 itu yang nurunin sarjana ke daerah itu ya?

Pertanyaan	Jawaban
tahu gak program SP3 dan Pelatihan Pemuda Pelopor?	
Betul bang..	Mereka sich enak, dikasih duit ma pemerintah, dapat transpor, gaji dan lainnya. Beda ma kita yang disini. Tapi saya pikir yang namanya kepeloporan emang harusnya muncul secara alami dari diri sendiri. Baru itu namanya pemuda pelopor.
Kalo yang abang tahu, bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan/ program kepeloporan pemuda?	Yang pasti bertingkat. Saya khan gak ujuk-ujuk langsung dikirim di tingkat nasional, tapi diseleksi dulu di Jakarta Utara, terus di Provinsi baru ke tingkat nasional. Tapi waktu diutus di tingkat Jakarta Utara saya khan dapat transpor dari kecamatan karena maju atas nama kecamatan, waktu maju di tingkat propinsi saya ga dikasih transpor jalan buat seleksi. Padahal khan harusnya dapat, dibuku panduannya soalnya bilang begitu.
Jadi, intinya kenapa bang?	Berarti ada yang kurang beres dngan manajemennya.
Maksudnya?	Entah ada komunikasi yang gak nyambung, atau uangnya kemana gitu.
Mungkin kalo buat Jakarta Utara yang cuma Kodya Administratif beda. Dia khan gak punya duit sendiri kayak kabupaten/ kota yang lain.	Harusnya gak bisa gitu, khan buku panduan dah jelas bilang apa. Buktinya waktu saya menang, piala saya dibawa pak wali kemanmana kayak adipura. Berarti khan dalam hal ini saya mengharumkan nama Jakarta Utara.
Ok bang, nanti saya coba tuangkan masalah komunikasi ini di tesis saya. Terus bang, kalo program pemilihan pemuda pelopor ini imbasnya buat abang itu apa?	Sebenarnya masyarakat sini tuah bingung kok saya jadi pemuda pelopor, mereka tahunya saya tuah Suaeb kepal nelayan Marunda.. Jadi agak bingung penamaannya. Saya mengerjakan ini udah dari lama, jauh sebelum dikasih penghargaan.
Setelah jadi pemuda pelopor ada yang beda gak bang?	Sama aja, saya tetap ke laut. Tetap ngajarin ilmu saya yang autodidak itu ke pemuda kampung sini. Tapi emang sering juga dipanggil ma himpunan nelayan dari daerah lain buat jadi pembicara, bagi-bagi pengalaman atau juga sering dipanggil ke walikota buat dimintai pendapat tentang masalah kelautan dan perikanan. Saya juga udah gak asing ma orang-orang kab. Bekasi yang berbatasan dengan sini. Mereka juga sering minta saya datang buat kasih masukan dan membina nelayan di daerah sana. Yah... hitung-itung amal taker pengalaman sekalian refreshing karena acara gak jarang di hotel, hehehe...

Pertanyaan	Jawaban
Imbasnya buat masyarakat setelah abang jadi pemuda pelopor apa bang?	Sebenarnya, masyarakat sini gak ngerti saya tuah dapat penghargaan apa. Mereka bingung aja kadang saya bisa ngobrol ma walikota, dengan gubernur, atau pejabat pemerintahan lainnya. Tapi mereka gak ngerasa heran, karena emang dari dulu saya udah bergerak, udah jadi pelopor disini.
Jadi maksudnya abang kepilih jadi pemuda pelopor gak ngaruh buat masyarakat?	Nggak gitu juga, khan tadi situ udah bilang ada kepeloporan yang sifatnya alami. Mereka yang jadi pelopor alami ini khan udah gerak sejak dulu sebelum diberi penghargaan jadi ya saya buat mereka tetap saya yang dulu, yang suka membantu mereka, suka berinovasi dan ngomporin mereka.
Ada yang abang rasakan setelah menjadi pemuda pelopor?	Gini, sebenarnya masalah kepemudaan terutama kepeloporan ini bukan Cuma tanggung jawab Menpora aja. Harus ada juga kerja sama dengan lembaga lain. Misalnya departemen lain, swasta dan masyarakat lain yang peduli.
Maksudnya bagaimana bang?	Saya ngerasa gini, waktu saya belum jadi pemuda pelopor saya udah bergerak disini, setelah jadi juga masih bergerak disini dan tetap hampir kayak gitu juga. Seharusnya ada peningkatan, misalnya ada unsur departemen yang menangani kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga kemari membatu disini. Khan masalah laut dan bahari yang nanganin Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan Menpora.
Jadi Menpora harus bisa sinergis dengan kementerian lain?	Oke-lah Menpora punya ajang pemuda pelopor, tapi seharusnya sebelum bikin penghargaan juga ada komunikasi dengan departemen lain yang terkait supaya ke depannya cantik.
Ini juga berlaku untuk pemenang pemuda pelopor pada kriteria yang lain juga bang?	Iya, misalnya dalam bidang pendidikan ada kerjasamanya juga dengan Dinas, masalah seni budaya dan pariwisata dengan departemen kebudayaan dan pariwisata, masalah teknologi tepat guna dengan Menristek dan lainnya dech...
Iya juga sich bang, harusnya untuk masalah pemberdayaan masyarakat sini bisa dilakukan dengan CSR dan CSR itu bisa direalitas oleh Depsos. Mereka punya CFCD (Coorporate Forum for Community Development).	Ada ya yang seperti itu di Depsos?

Pertanyaan	Jawaban
Seingat saya ada...	Wah kalo gitu boleh dicoba tuch... Emang harusnya gini ada sinergis antar departemen untuk masalah kepemudaan. Mungkin harus jadi catatan nanti waktu tesisnya jadi.
Ok bang, insya Allah...	Gimana ada lagi yang lain mau ditanyain? Kayaknya cukup aja ya... saya mau melaut dulu...
Cukup bang...	



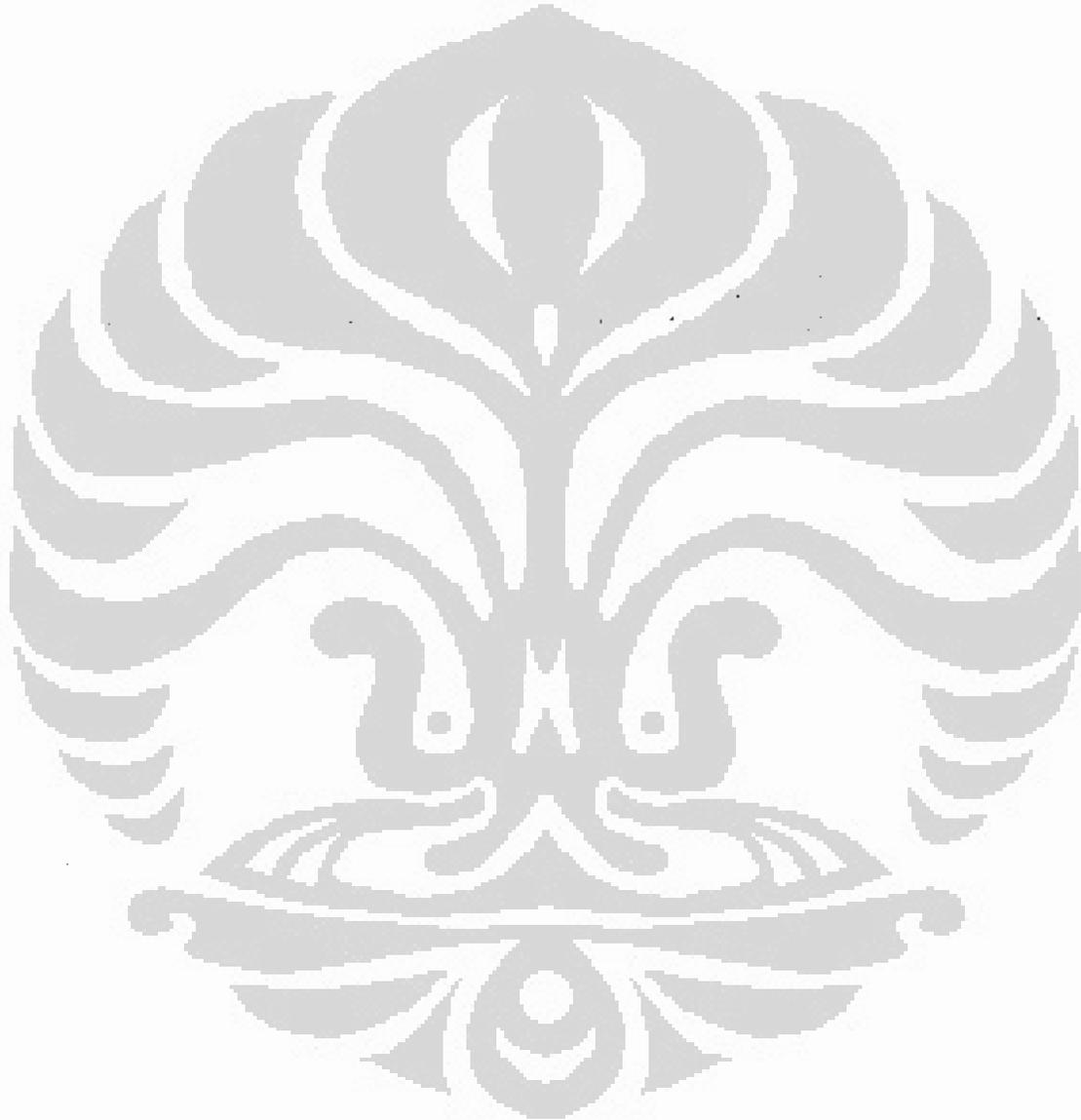
TRANSKRIP WAWANCARA

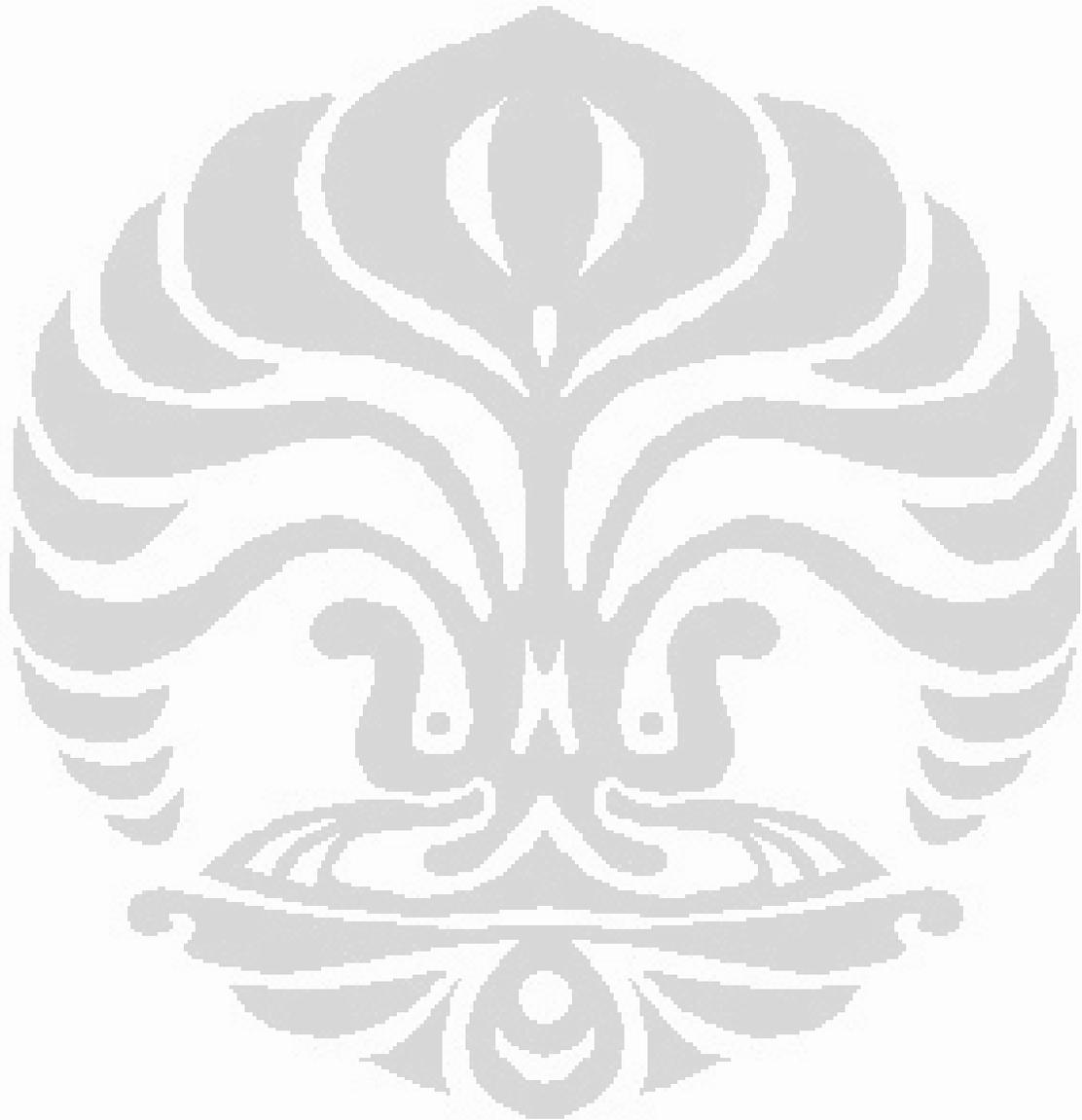
Dr. Budi Setiawan
Asisten II Menpora
Jum'at, 7 Mei 2010

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana menurut bapak tentang program-program kepeloporan pemuda di Kemenpora?</p>	<p>Saya menilai bahwa kepeloporan itu terbagi dua, ada yang genuine dan ada yang by design. Yang genuine ini oleh pemerintah diberikan apresiasi melalui program Pemilihan Pemuda Pelopor. Sedangkan yang by design melalui program SP3 dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda sesuai bidang. Sedangkan SP3 lebih cenderung bu desing tapi dengan cara pemberdayaan, melakukan intervensi secara sosial langsung ke masyarakat.</p>
<p>Bagaimana cara mengevaluasi program untuk memperbaikinya dimasa depan?</p>	<p>Sebenarnya kita punya rakornis dan rakornas. Rakor Teknis bersifat internal menpora, rakornas dengan dispora se-Indonesia. Seharusnya aktivitas intelektual dalam rangka pengembangan disitu. Itu tujuannya, walaupun aplikasinya dilapangan agak melenceng. Di momen itu terjado proses memberikan masukan dan pengembangan ke depan, itu harusnya dilakukan disitu. Bahkan juga membuat program yang namanya pelatihan promosi kepemimpinan, kenapa disebut promosi karena kita ingin melatih 2 belah pihak, baik stakeholders maupun pemudanya sendiri dalam satu kamar, satu ruangan antara pengambil kebijakan di daerah dengan pemudanya. Nah, kalau program ini jalan maka komunikasi akan lebih intens lagi. Jadi memang ada beberapa mekanisme, tapi mungkin yang digambarkan Pak Amir dkk itu memakai mekanisme direct aja, udah dapat masukan langsung masukin RKAKL. Tapi bagaimana masuk RKAKL-nya juga harus dilihat, tapi mungkin kalo Cuma pake feeling-feeling aja kurang tepat juga, kalo ada yang bilang insentifnya terlalu kecil ya naikkan. Jadi Cuma bu case aja, gak semuanya dituangkan dalam prosedur yang benar walaupun mekanisme itu ada. Itu bisa disentuh juga, Rakornis dan Rakornas yang bisa sampai tingkat kabupaten diundang juga harusnya bisa jadi momen</p>

Pertanyaan	Jawaban
	<p>buat exercise intelektual, mensimulasikan, membuat model-model, tapi itu masih terlalu mewah untuk birokrat, maksudnya terlalu mewah masih sulit untuk dilaksanakan karena mungkin ada perbedaan background akademis.</p>
<p>Menurut bapak program-program kepeloporan di menpora efektif tidak?</p>	<p>Kalo untuk memberikan penyadaran tentang pemuda pelopor efektif, orang tahu tentang kepeloporan karena kita melaksanakan pemilihan pemuda pelopor, pihak kabupaten dan provinsi bergerak mencari pemuda pelopor. Cuma untuk memunculkan kepeloporan ini yang belum efektif.</p>
<p>Termasuk SP-3? Kalo saya melihatnya "how could" seorang pemuda bisa memunculkan kepeloporan di suatu wilayah. Kayaknya susah sekali. Bagaimana bisa mereka yang melaksanakan bisa ideal menjalankannya sesuatu buku pedoman. Sedangkan Pak Amir Hamzah dan pak Daulay dengan bangganya bilang SP-3 adalah program unggulan Deputy II, itu juga tertera di pengemasan data menpora tahun 2009 yang dimunculkan dari Deputy II hanya SP-3, padahal banyak program lainnya seperti pemilihan pemuda pelopor, beasiswa S2 kepemimpinan,</p>	<p>Ya karena anggarannya aja besar, dan ada di seluruh propinsi. Cuma SP3- belum efektifnya karena dibandingkan lulusan dan lainnya tidak didukung publikasi yang luas, jadi dana itu habis hanya untuk pelaksanaannya saja, orang tidak banyak tahu. Tapi pihak lain jadi tidak tahu, walaupun di kampung yang berinspirasi dengan pemuda pelopor dan SP-3 ini banyak juga. Kalo kita lihat factfinding di lapangan ya mereka ngenal down to earth para pemudanya itu bahkan ada yang bisa sampai jadi anggota dewan karena mereka memang dicintai rakyat dan pemuda yang menjadikan mereka sebagai role model, nah hal itu yang gak terangkat.</p>
<p>Yang punya masalah pribadi dan jadi PNS juga banyak pak, jadi harus berhenti dari kontraknya.</p>	<p>Ya, kalo itu masalah lain ya. Itu masalah peluang kerja. Kita gak bisa menghalangi kalo mereka minta.</p>
<p>Saya belum bisa banyak menggali tentang program pelatihan kepeloporan pemuda, mungkin program itu gak masif kali ya?</p>	<p>Iya, memang gak masif. Sebenarnya tadinya saya pengennya program ini jadi main stream sebagai menumbuhkan jiwa kepeloporan. Tapi anggarannya gak disetujui. Tapi ini bisa diperbanyak, yang melaksanakan bukan kita tapi bekerja sama dengan LSM pake model grant gitu atau bantuan-bantuan dana untuk pelatihan yang content-nya kita atur harus bertepatan kepeloporan. Selama ini kita kalo kasih bantuan ya hanya kasih aja tanpa mengatur isinya dan membuat standarisasinya,</p>

Pertanyaan	Jawaban
	memang agak sulit. Yang baru bisa seperti itu hanya pelatihan kepemimpinan, itu sudah seragam, di tingkat kabupaten atau provinsi tinggal lihat aja bukannya. Itu sudah lebih ada keterukurannya tapi kepeloporan itu belum.





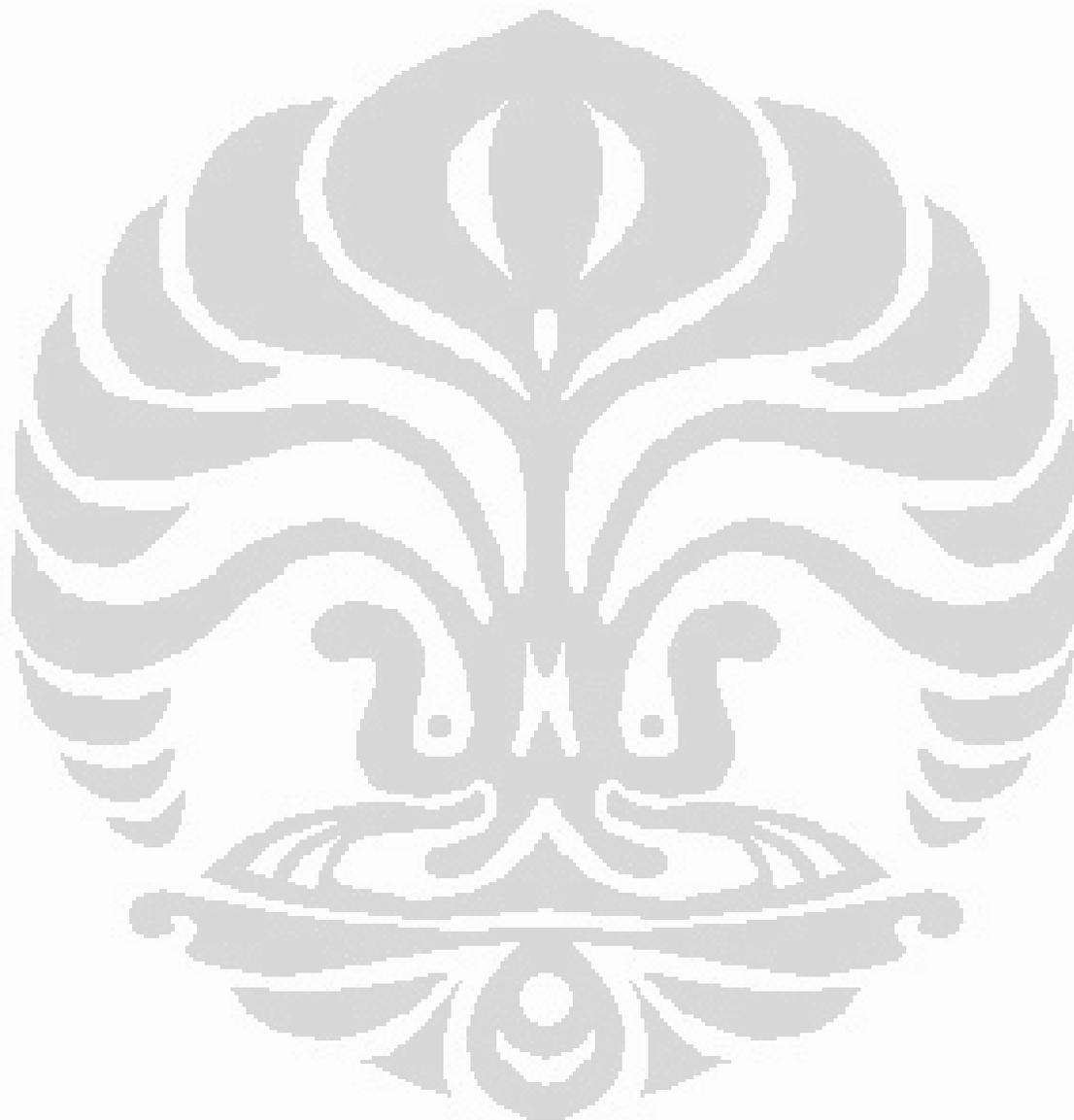
TRANSKRIP WAWANCARA
Andi Faishal Yusthi
Peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Siaga Bencana
Kamis, 13 Mei 2010

Pertanyaan	Jawaban
Bang Faisal, apa aktivitasnya sekarang?	Saat ini saya banyak terjun di bidang pembinaan pemuda, saya aktif di Paskibra Jakarta Utara, seni rakyat Jakarta Utara, lalu juga di SAR Jakarta Utara. Sehari-hari saya mangkal di dispora di kantor Walikota.
Menurut Abang, kepeloporan pemuda itu apa sich?	Kepeloporan pemuda, apa ya... ya, intinya memang pemuda harus jadi pelopor. Pelopor dalam segala hal, sejarah Indonesia juga menceritakan itu, Budi Utomo didirikan pemuda, Sumpah Pemuda yang punya peran besar dalam kemerdekaan juga digerakkan pemuda. Pemuda itu harus pandai, soleh juga peduli dengan sesama, dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, lingkungan kita sekarang rusak maka pemuda harus bisa mengajak masyarakat untuk memperbaiki lingkungan.
Bang Faisal, bisa tolong ceritain gak? Gimana ceritanya bisa jadi peserta Pelatihan Pemuda Pelopor Siapa Bencana?	Sejak dahulu saya memang aktif di SAR tepatnya di Indonesian Valuunter, saya aktif juga di Utara Rescue, SAR-nya Jakarta Utara, di dalamnya bergabung beberapa elemen antara lain Pramuka, Pecinta Alam, beberapa orang Tagana, anggota TNI dan lainnya. Ketika itu saya diminta mewakili Jakarta Utara untuk seleksi Pelatihan itu di tingkat DKI. Dan Alhamdulillah di tingkat DKI saya lulus dan diberangkatkan menjadi peserta pelatihan Siaga Bencana.
Bagaimana rasanya jadi peserta disana?	Kalo saya boleh jujur... saya kecewa.
Kenapa?	Materi yang diberikan tidak sesuai harapan, materinya lebih rendah dari pelatihan lain yang pernah saya ikuti.
Rendah gimana?	Lebih mudah, dan tidak menantang buat acara tingkat nasional. Asal tahu aja mas, anak-anak Utara Rescue udah dapat materi yang lebih baik bahkan lebih berat dari yang diajarkan di Lombok kemarin. Dan juga saya anggap diajar oleh orang yang kurang tepat.

Pertanyaan	Jawaban
Kurang tepat bagaimana tuch?	Contohnya begini, buat pelatihan Water Rescue yang ngisi dari TNI AU, emang apa sich kapasitas AU di air? Kalo Water Rescue yang jago khan Marinir. Mungkin kalo TNI AU akan bagus kalo ngisi Air Rescue. Tapi harapan saya yang ngisi itu udah instruktur taraf Internasional dari luar negeri. Bukan sombong ya mas... Saya ini instruktur TNI buat Open Water Rescue, di laut, sungai dan air yang mengalir lainnya. Jadi materi kemarin kalo buat saya mah cuma pemanasan aja, gak ada apa apanya.
Gitu ya...	Nanti ni mas, bulan Juni besok saya akan buat pelatihan dasar SAR untuk pelajar Jakarta Utara di Cibubur, saya jamin materinya akan lebih bagus dari pelatihan di Lombok kemarin. Mas datang aja nanti ya, ajak juga Pak Daulay.
Menurut saudara apakah tujuan program Pelatihan Kepeloporan?	Ya, sepertinya ingin mendidik anak-anak muda untuk bisa menjadi orang yang pertama terjun dalam menangani bencana yang terjadi. Indonesia ini memang negara yang rawan akan bencana.
Kata siapa?	Kemarin salah satu yang mengisi adalah orang dari BMKG, dan mereka menceritakan bahwa negara kita memang rawan bencana, terutama gempa, walaupun belum sesering Jepang intensitasnya. Dan mereka sudah memperkirakan bahwa retakan yang terjadi di selatan Indonesia yang memanjang dari Thailand, lalu di Selatan Jawa, Lombok, kemudian belok ke utara ke arah Kepulauan Maluku. Itu semua akhirnya terbukti, gempa selalu terjadi daerah jalur tadi. Pertama mulai di Aceh, Padang, Bengkulu, Selatan Jawa Barat, Jogja, Lombok, dan Maluku. Subhanallah... dengan informasi ini saya merasa bersyukur tinggal di Jakarta, walaupun bukan berarti di Jakarta gak akan ada bencana.
Dari pelatihan kemarin, kelihatannya siapakah sasaran program itu?	Ya para pemuda dong, mereka yang punya potensi besar untuk memajukan bangsa. Pemuda juga yang nantinya akan menjadi barisan paling depan untuk penyelamatan dan menolong jika ada bencana.
Berapa orang pesertanya kemarin?	Kalo gak salah sekitar 60 orang, tapi yang

Pertanyaan	Jawaban
	paling banyak memang dari Lombok. Peserta yang dari Lombok ini kayaknya asal comot aja, gak pake diseleksi. Kemampuan mereka dalam bidang SAR dan Rescue gak ada. Ini khan kegiatan nasional, maka pesertanya juga harusnya bukan orang sembarangan.
Darimanakah sumber pendanaan program ini?	Dari Negara, tapi kayaknya kurang optimal dalam penggunaannya.
Maksudnya?	Sepertinya hanya sekedar menjalankan kewajiban program aja, intinya itu malah gak dapat.
Begitu ya... kalo sistem pendanaan untuk SPJ keuangan, akomodasi peserta, dll. bagaimana?	Kami dapat akomodasi di hotel yang cukup mewah, tiket pesawat dan pulang dapat uang saku.
Bagaimana sistem kepanitiaan kegiatan itu?	Kayaknya panitianya gabungan, ada yang dari kantor menpora pusat ada yang dari dinas Lombok.
Sejauh mana imbas program bagi peserta?	Kalo buat saya sich agak kurang, karena saya tidak mendapat hal yang baru disana. Hampir semua materinya sudah pernah saya dapat bahkan kalo boleh sombong mungkin seharusnya saya yang jadi instruktur, saya yakin saya akan bisa lebih baik kalo saya yang ngisi.
Ok, tapi gini, sekiranya itu materi merupakan hal yang baru gimana? Nah, kayaknya khan kalo buat peserta dari Lombok ini hal baru, kira-kira kalo buat mereka gimana?	Kalo buat mereka kayaknya bermanfaat banget, karena mereka jadi tahu dan minimal menguasai hal-hal dasar dalam bidang SAR. Walaupun seharusnya pelatihan kemarin bisa punya bobot yang lebih dalam bukan hanya dasar saja.
Lalu imbasnya bagi masyarakat?	Kalo buat peserta yang lain ya pastinya akan ada, kalo nanti ada bencana para peserta seharusnya bisa mengaplikasikan ilmunya untuk digunakan di masyarakat dengan jadi tim penolong. Atau minimal ilmu yang kemarin di dapat juga diajarkan di organisasi atau kelompoknya masing-masing, jangan cuma diendapin aja.
Sejauhmana kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?	Akan bermanfaat kalo itu digunakan atau diajarkan. Mungkin seharusnya para peserta kemarin harus ada kegiatan follow upnya seperti misalnya forum SAR Pemuda atau minimal buat mereka yang di Lombok, jadi ada proses pemantauan kebermanfaatan program bagi peserta dan masyarakat. Kita harusnya bisa liat ilmu

Pertanyaan	Jawaban
	yang kemarin diajarkan dalam forum apa, diorganisasi apa, sehingga jelas gunanya. Khan ilmu yang baik adalah imu yang diajarkan kepada orang lain bukan cuma disimpan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Clara Anggraeni, S.Sos

Peserta Program SP-3

Sabtu, 15 Mei 2010

Pertanyaan	Jawaban
Mbak Clara, apa aktivitasnya sekarang?	Saya mengelola TK si Mungil, ini usaha keluarga.
Ikut program SP-3 juga khan?	Ya, saya ikut SP-3 sebagai angkatan 18. Mulai tahun 2008.
Berarti sekarang tahun ke...?	Sekarang masuk tahun ke-2, sudah berjalan 1,5 tahun.
Mbak bisa tahu program SP-3 ini dari siapa?	Dari teman.
Kok dia bisa tahu tentang SP-3?	Iya, kebetulan dia juga salah seorang peserta SP-3 juga, kalo gak salah angkatan 16.
Oooo, pantes... Menurut mbak program SP-3 ini apa sich?	Sebenarnya sich ini upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan terutama di perdesaan dengan memaksimalkan peran pemuda terdidik, yang sarjana buat turun di masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakat. Terutama potensi lokalnya, atau busa juga mengupayakan masyarakat untuk punya kebiasaan yang lebih baik dari sebelumnya, contohnya membiasakan hidup sehat, dan lain sebagainya.
Kira-kira tujuan program SP3 ini apa sich?	Iya tadi, mempercepat proses pembangunan yang merata di perdesaan, bagi peserta akan meningkatkan wawasan dan pengalaman, mengembangkan kualitas pemuda yang sarjana untuk bisa menggerakkan potensi masyarakat, intinya yang pasti sich untuk mengoptimalkan pemuda untuk mau bergerak membangun perdesaan. Kalo gak salah gitu.
Perdesaan ya? Bukan pedesaan? Kenapa?	Kalo gak salah ini mengacu pada struktur tatanan pemerintahan tingkat desa, yang berarti kelurahan juga setingkat desa, itulah makannya di Jakarta yang bukan desa juga dilaksanakan SP-3.
Kalo mbak berarti SP-3 di kelurahan Batu Ampar sini ya?	Iya, kebetulan rumah saya juga d Batu Ampar.
Lalu siapakah sasaran program SP3?	Yang pastinya pemuda yang sudah sarjana yang mau berkontribusi buat pembangunan didesa.
Sebenarnya, gimana sich cara para	Dengan memfasilitasi masyarakat untuk

Pertanyaan	Jawaban
sarjana ini membangun perdesaan?	bisa lebih mudah berkoordinasi dengan kelurahan, kalo ada yang bisa mengajarkan suatu skill atau keterampilan yang berguna buat masyarakat juga boleh, kayak teman saya yang di Kalibata sana dia mengajarkan masyarakat membudidayakan lele.
Kalo mbak, apa yang dikembangkan?	Saya mengembangkan bidang yang dari dulu saya dan keluarga geluti, yaitu bidang pendidikan. Saya mengembangkan PAUD dan Taman Kanak-Kanak agar masyarakat mendapatkan pendidikan Pra Sekolah yang berkualitas. Saya sudah mendirikan 6 PAUD di kelurahan Batu Ampar bersama ibu-ibu PKK disini. Rencananya saya mu tambah lagi PAUD-nya. Selain itu saya juga mendata usaha kecil khas Condet yang ada di sekitar sini.
Apa aja mbak?	Ada emping Condet, pabrik tahu dan tempe juga ada, apa lagi ya... oh iya pabrik tas juga ada disana.
Selain mendata apa lagi mbak?	Saya juga bantu-bantu di kelurahan, setelah saya mengajar di TK lalu saya ke kelurahan.
Ngapain mbak?	Kadang-kadang saya memasukan data, mengurus administrasi kelurahan, bahkan pernah jadi petugas entry data waktu pemilu kemarin.
Seingat saya tugas seperti itu tidak ada di buku pedoman SP-3	Memang tidak ada, tapi untuk pelaksanaan tuhas saya selaku SP-3 di kelurahan maka saya harus berkoordinasi dengan lurah, beliau juga yang meng-ACC laporan saya tiap bulannya. Jadi saya harus baik-baik ma orang-orang kelurahan biar lancar semuanya. Bahkan tadinya mereka kira saya pegawai baru di kelurahan, tapi setelah saya jelaskan bahwa saya SP-3 yang tugas utamanya memberdayakan potensi lokal dan pemuda mereka paham.
Berarti tadinya mereka gak tau apa itu SP-3?	Iya, bahkan Pak Lurahnya juga gak ngerti. Waktu pertama saya jadi SP-3 saya menghadap Pak Lurah dan beliau bingung, katanya gak ada pos buat menggaji saya. Saya jelasin, saya udah digaji ma menpora, jadi saya disini gak usah digaji. Akhirnya saya akrab ama orang-orang kelurahan. Tapi sekarang saya gak mesti tiap hari datang ke kelurahan, hari tertentu aja, 3

Pertanyaan	Jawaban
	hari dalam seminggu.
Kenapa sich harus ke kelurahan?	Tiap bulan saya harus buat laporan kerja, dan harus ditulis aktivitas kita hari ke harinya. Jadi jujur aja saya perlu baik ma orang-orang kelurahan dan pak lurah agar mereka mau bantu saya buat laporan.
Sebegitu penting ya laporan itu?	Penting sekali, karena laporan itu buat mencairkan gaji saya ke dispora.
Jadi kalo ngambil gaji di dispora ya?	Iya, kalo di DKI namanya Disorda.
Ada masalah gak ama gajinya selama ini.	Masalah sich gak ada, lancar-lancar aja. Paling cuma gaji iya gak tiap bulan cair, dirapel 3 bulan sekali biasanya.
Ngomong-ngomong gaji, jadi mu tanya darimanakah sumber pendanaan program SP-3?	Dari negara, dari APBN, kalo gaji saya yang ngambilnya di Disorda berarti pake dana dekon.
LPJ keuangannya bagaimana?	Saya tanda tangan SPJ keuangan ya Disorda.
Bagaimana sistem kepanitiaan SP-3?	Ada tim pusat yang dari Menpora, ada Tim Teknis di Disorda, ada juga tim teknis di Walikota. Jadi kayaknya kepanitiaannya gabungan, ada koordinasi dari pusat sampai ke bawah
Pernah di monev gak?	Pernah, pernah ama orang pusat, waktu itu pak Haji Amir yang datang, seringnya dimonitoring ma tim teknis dan orang Disorda.
Mbak khan ikut program ini udah lumayan lama, kira-kira sejauh mana imbas program bagi peserta?	Ya, saya jadi tahu potensi daerah saya sendiri, saya kenal dan dikenal ma banyak orang. Jaringan saya nambah, pengetahuan saya nambah juga.
Kalo kantong nambah tebal gak?	Alhamdulillah, disyukuri aja, hehehe...
Lalu imbasnya bagi masyarakat?	Gunanya buat masyarakat sini mereka jadi tahu pentingnya pendidikan bagi anak dini usia, mereka jadi sadar akan pendidikan itu penting. Mereka juga jadi tahu bahwa ternyata ada anggaran yang bisa dimanfaati buat keperluan bersama.
Anggaran apa?	PPMK misalnya...
Oh....	
Sejauhmana kebermanfaatn bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pelaksanaan program?	Ya, pastinya bermanfaat

Pertanyaan	Jawaban
	di tempat kita PAUD-nya lumayan banyak jadi insya Allah kualitas pendidikan kita akan tambah baik.
Terus apa lagi pak?	Dia juga membantu menggerakkan pemuda buat menggunakan dana-dana yang ada supaya lebih bermanfaat, misalnya dana PPMK, ada juga dana-dana hibah dari DKI buat Karang Taruna atau buat organisasi lain, dia tahu tuch cara prosedur ngurusnya jadi pemuda sini lebih banyak channel sekarang.
Apa harapan bapak tentang program SP3 ini?	Ya, ditingkatkan terus. Program ini bagus.
Pastinya pengen juga SP3 disini nambah ya, bukan cuma 1	Gak, 1 aja. Tapi optimal.